

NILAI-NILAI DASAR BPK

Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu.

Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/ atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

LAPORAN TAHUNAN BPK 2019



**LAPORAN TAHUNAN
BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN
(BPK 2019)**

Copyright

**Laporan Tahunan
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK 2019)**

Cetakan pertama,
April 2020

Diterbitkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jalan Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp: (021) 255 49000
Faks: (021) 570 5376
www.bpk.go.id



BAB PENGANTAR

Sekapur Sirih Sambutan Ketua BPK

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun dan merampungkan Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2019. Laporan Tahunan ini memuat semua dinamika dan pencapaian BPK selama tahun 2019, baik dalam bidang pemeriksaan maupun non pemeriksaan.

Laporan Tahunan ini sebagai wujud komitmen transparansi BPK sebagai Badan Publik, yang berkewajiban memberikan informasi akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Sehingga pencapaian BPK dapat menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di mata publik.

Tahun 2019 ini ditandai dengan adanya pergantian pimpinan BPK, yang berakhir masa pengabdiannya. Tahun 2019 juga menjadi langkah untuk memantapkan tekad BPK menerapkan nilai-nilai dasar Badan yaitu Integritas, Profesionalisme dan Independensi. Berbagai upaya dilakukan untuk itu, di antara meningkatkan kinerja dan kemampuan pemeriksa, melengkapi fasilitas dan meningkatkan kemandirian penganggaran.

Di bidang pemeriksaan, pada semester I 2019 BPK berhasil menyelesaikan 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan mengungkapkan 9.116 temuan dengan 14.965 permasalahan terdiri atas 48% permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 51% permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp9,68 triliun, serta 1% permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp676,81 miliar.

BPK juga berhasil mendorong pengembalian kerugian negara/daerah sebesar Rp 1,29 triliun dari kerugian yang ditetapkan sebesar Rp 3 triliun.

Di bidang non-pemeriksaan, BPK pada tahun 2019 kembali menggelar sejumlah pelatihan kepada ASN dan profesional, pengenalan tugas BPK ke Generasi Milenial dengan acara BPK Goes to Campus, serta penyelenggaraan pameran.

Perlu pula disampaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus membaik dengan semakin banyaknya laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika pada tahun 2006 hanya 3 LKPD (0,65%) yang mendapat Opini WTP,

maka pada tahun 2017 ada 411 LKPD (76%) dan tahun 2018 meningkat menjadi 443 (82%) yang mendapat Opini WTP.

Pencapaian ini tentu tidak lepas dari intensitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan BPK untuk mendorong terciptanya pengelolaan anggaran yang baik dan transparan.

BPK juga semakin mendapat pengakuan di tingkat internasional dengan ditunjuknya sebagai auditor eksternal di Organisasi Maritim Internasional (IMO) dengan mengungguli Italia dan Inggris untuk periode 2020 – 2023. Prestasi ini melengkapi kepercayaan badan dunia terhadap BPK, yang sebelumnya ditunjuk sebagai *external auditor* International Atomic Energy Agency (IAEA) tahun 2016-2021, serta International Anti Corruption Academy (IACA) tahun 2015-2016 dan 2018-2020.

Tahun 2019 BPK mendapat *peer review* dari 3 Supreme audit institution negara lain, yaitu: Polandia, Estonia dan Norwegia dengan fokus 6 domain, yaitu Independensi dan Kerangka Hukum, Perencanaan Pemeriksaan, Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan, Teknologi Informasi, SDM dan Pelatihan, serta Hubungan dengan Pemangku Kepentingan.

Perlu pula kami sampaikan, bentuk Laporan Tahunan 2019 ini sedikit berbeda dari sebelumnya, yaitu disajikan dalam bentuk grafis agar lebih segar dan mudah dipahami. Hal ini dilakukan karena semakin hari waktu untuk membaca narasi terus berkurang seiring meningkatnya kesibukan, sehingga Laporan Tahunan dalam bentuk grafis ini diharapkan bisa diserap dalam waktu lebih cepat dan tidak melelahkan.

Akhirnya, kami berharap Laporan Tahunan BPK Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi publik dalam memperoleh pemahaman tentang cara kerja BPK beserta hasil pemeriksaan keuangan negara bagi kesejahteraan rakyat.

Jakarta, April 2020

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.
Ketua BPK RI 2019-2024



Daftar Isi

Sekapur Sirih Sambutan Ketua BPK	IV	5. Sertifikasi Profesi CSFA 98
Bab Pendahuluan	9	6. Manajemen Talenta 100
Ketua BPK dari Masa ke Masa	10	7. Capaian Pembangunan Zona Integritas 105
A. Visi BPK	12	8. SAI Performance Measurement Framework (SAI PMF) 110
B. Misi BPK	13	9. Majelis Kehormatan Kode Etik (Mkke) BPK 112
C. Tujuan Strategis BPK	13	10. Biro Teknologi Informasi BPK 116
D. Nilai-Nilai Dasar BPK	15	11. Sarana dan Prasarana 123
E. Tugas Pokok dan Fungsi BPK	16	3. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
F. Wewenang BPK	18	
G. Profil Pimpinan BPK RI Periode 2014-Oktober 2019	20	
H. Profil pimpinan BPK RI Periode 2019-2024	22	
I. Struktur Organisasi BPK	32	
Bab 1		Bab 3
Hasil Pemeriksaan BPK	35	Capaian Kelembagaan
1. Hasil Pemeriksaan BPK 2019	36	1. Pencapaian Internasional Pada 2019 128
2. Tiga Jenis Pemeriksaan BPK	38	2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 138
2.A. Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan tiga jenis pemeriksaan	40	3. Capaian Bidang Komunikasi dan Layanan Publik 142
2.B. Pemeriksaan Laporan Keuangan		4. Capaian Pembinaan dan Pengembangan Hukum 143
2.B.1. Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	47	5. Peer Review BPK 2019 148
2.B.2. Peta Opini LPKD Tahun 2018	48	6. Hasil Audit Laporan Keuangan BPK 150
2.C. Pemeriksaan Kinerja	62	7. Gugatan terhadap BPK 152
2.D. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 2019	64	
2. D.1. Hasil Pemeriksaan Signifikan	66	
3. Pemeriksaan Investigatif	69	Bab 4
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	70	Pelayanan Publik
5. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	71	1. Pusat Informasi dan Komunikasi BPK 154
6. Auditorat Keuangan Negara	72	2. Museum BPK RI 158
Bab 2		3. Website BPK 164
Penguatan Organisasi dan Kelembagaan	87	4. Warta Pemeriksa 165
1. Sumber Daya Manusia di BPK	88	5. Edukasi Peran BPK 168
2. Karier di BPK	91	
3. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	93	
4. Peningkatan Kompetensi Pegawai	95	
		Bab 5
		Tantangan ke Depan
		1. Institut Pemeriksa Keuangan Negara 184
		2. Budaya BPK ber-IIP 186
		3. WBK dan WBBM 188
		Penutup 191

BAB PENDAHULUAN

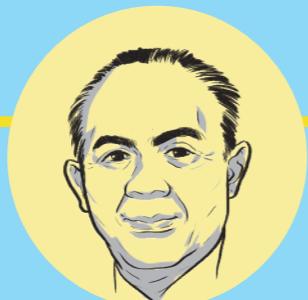


KETUA BPK DARI MASA KE MASA

Bangsa yang Besar adalah Bangsa yang menghargai Pahlawannya. —Ir. Sukarno



R. Soerasno
1946-1957



K. Pringgodigdo
1957-1961



I Gusti Ketut Pudja
1961-1964



Hamengku
Buwono IX
1964-1966



Dadang
Suprayogi
1966-1973



Umar
Wirahadikusumah
1973-1983



Muhammad
Jusuf
1983-1993



J.B. Sumarlin
1993-1998



Satrio Budihardjo
Joedono
1998-2004



Anwar Nasution
2004-2009



Hadi Poernomo
2009-2014



Rizal Djalil
2014-2014



Harry
Azhar Azis
2014-2017



Moermahadi
Soerja Djanegara
21 April 2017 – 20 Oktober 2019



Agung Firman
Sampurna
21 Oktober 2019 – sekarang

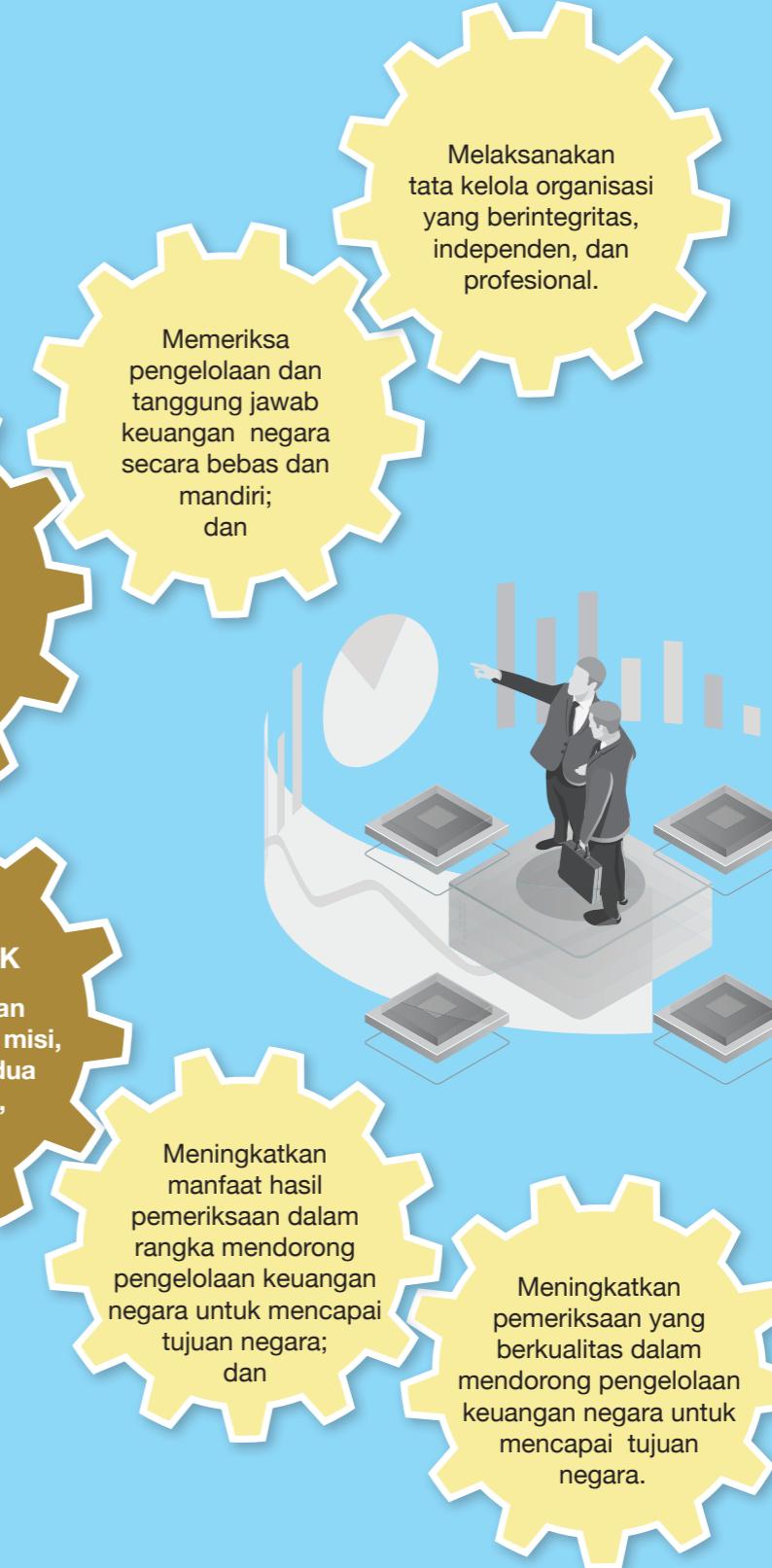
Pemilihan Anggota BPK Periode 2019 – 2024

Lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) periode jabatan 2019-2024 dipilih DPR dari 55 calon pada 25 September 2019. Mereka yang terpilih adalah Achsanul Qosasi, Daniel Lumaban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto, dan Pius Lustrianang untuk menggantikan Moermahadi Soerja Djanegara, Achsanul Qosasi, Rizal Djalil, Harry Azhar Azis, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Kelima anggota terpilih ini bergabung dengan empat anggota lain, yang masa jabatannya belum berakhir, yakni Agung Firman Sampurna, Agus Joko Pramono, Bahrullah Akbar, dan Isma Yatun.



TUJUAN STRATEGIS BPK

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu:



Sumber: Rencana Strategis BPK 2016-2020

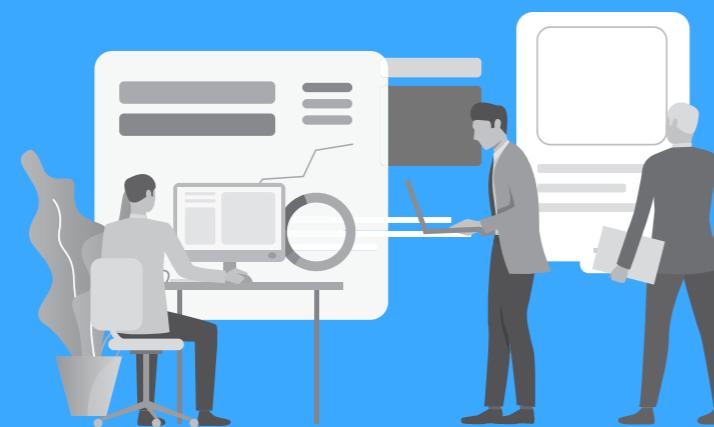
INTEGRITAS



PROFESIONALISME



INDEPENDENSI



Sumber: Peraturan BPK No.2 tahun 2011 tentang kode etik Badan Pemeriksa Keuangan

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPK

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kesemuanya dilakukan dengan standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan.

UU No. 15 Tahun 2006
Pasal 6

Hasil pemeriksaan BPK diserahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang. Sesuai ketentuan perundang-undangan, laporan diajukan paling lama satu bulan sejak diketahui ada unsur pidana untuk dijadikan dasar penyidikan.

UU No. 15 Tahun 2006
Pasal 7

Undang- Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 5 memberikan amanat bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas mandiri. Pemeriksaan itu mulai dari pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Baik hal itu dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian, yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, atau lembaga/ badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK juga akan memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

UU No. 15 Tahun 2006
Pasal 10

Hasil pemeriksaan BPK juga disampaikan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

UU No. 15 Tahun 2006
Pasal 8

E. WEWENANG BPK

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 pasal 9 wewenang BPK adalah:

Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;

Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

Meminta keterangan dan/ atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;

Membina jabatan fungsional Pemeriksa;

Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

F. PROFIL PIMPINAN BPK RI PERIODE 2019-2024

BPK mempunyai sembilan orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan keputusan Presiden. Susunan BPK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota (UU No. 15 tahun 2006 pasal 4).



Dr. Achsanul Qosasi,
CSFA.

ANGGOTA III/
PIMPINAN
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
NEGARA III
BPK RI

Dr. Pius Lustrilanang,
S.I.P., M.Si., CSFA.

ANGGOTA II/
PIMPINAN
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
NEGARA II
BPK RI

Prof. Harry Azhar Azis,
M.A., Ph.D., CSFA.

ANGGOTA VI/
PIMPINAN
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
NEGARA VI
BPK RI

Ir. Isma
Yatun, M.T

ANGGOTA IV/
PIMPINAN
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
NEGARA IV
BPK RI

Dr. Agung Firman
Sampurna,
CSFA.

KETUA
BPK RI

Dr. Agus Joko
Pramono, M.Acc., Ak.,
CA, CSFA., CPA.

WAKIL KETUA
BPK RI

Dr. Hendra Susanto,
S.T., M.Eng.,
M.H., CFrA., CSFA.

ANGGOTA I/
PIMPINAN
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
NEGARA I
BPK RI

Ir. Daniel Lumban
Tobing, CSFA.

ANGGOTA VII/
PIMPINAN
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
NEGARA VII
BPK RI

Prof. Dr. Bahrullah
Akbar, M.B.A., CIPM.,
CSFA., CPA.

ANGGOTA V/
PIMPINAN
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
NEGARA V
BPK RI

**Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.
KETUA BPK RI**

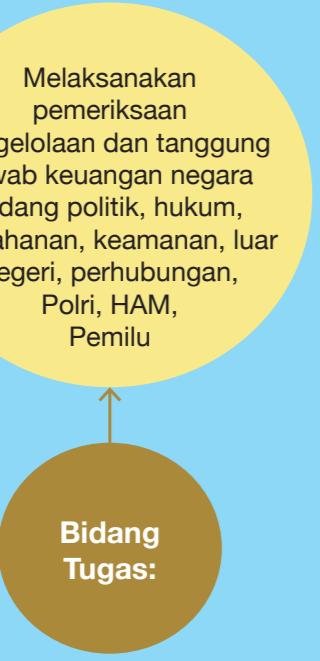


**Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA.
WAKIL KETUA BPK RI**





**Dr. Hendra Susanto, S.T.,
M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.**
ANGGOTA I BPK RI/ PIMPINAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA I



**Dr. Pius Lustrilanang,
S.I.P., M.Si., CSFA.**
ANGGOTA II BPK RI/
PIMPINAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN NEGARA II

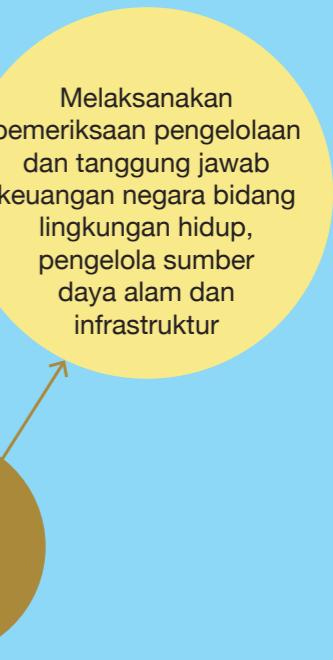


Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.
ANGGOTA III BPK RI/
PIMPINAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN NEGARA III

Sesuai dengan UU Nomor 15 / 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 anggota yang dipilih DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan bisa dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan.



Ir. Isma Yatun, M.T
ANGGOTA IV BPK RI
PIMPINAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN NEGARA IV



PROFIL PIMPINAN BPK



Prof. Dr. Bahrullah Akbar,
M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.
ANGGOTA V BPK RI/PIMPINAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN
NEGARA V



Prof. Harry Azhar Azis,
M.A., Ph.D., CSFA.
ANGGOTA VI BPK RI/PIMPINAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN
NEGARA VI



PROFIL PIMPINAN BPK

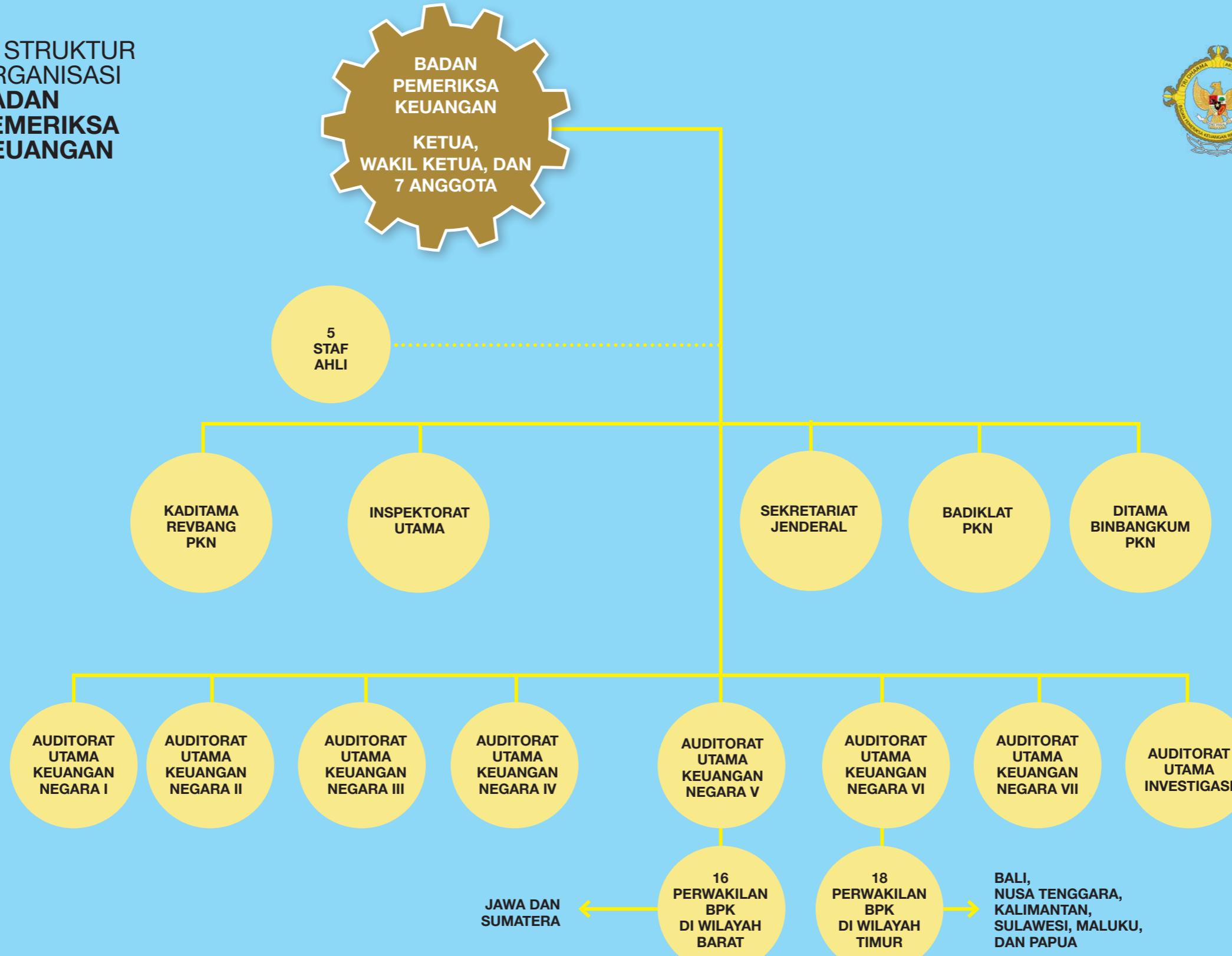
Sesuai dengan UU Nomor 15 / 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 anggota yang dipilih DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan bisa dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan.



Ir. Daniel Lumban
Tobing, CSFA.
ANGGOTA VII BPK RI/
PIMPINAN
PEMERIKSAAN
KEUANGAN NEGARA VII



G. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Struktur Organisasi BPK

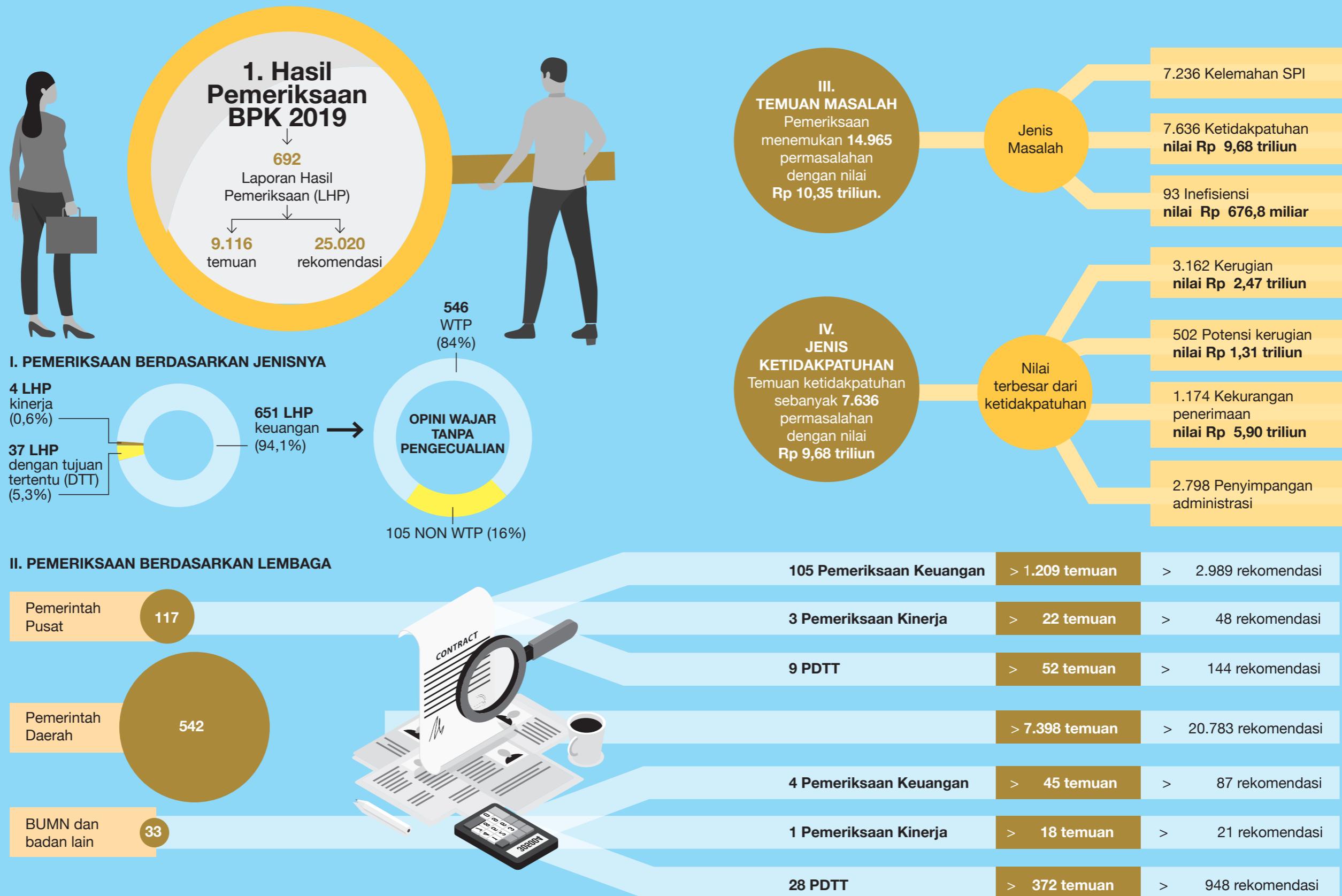
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipimpin sembilan anggota dengan kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Pimpinan BPK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota. Masing-masing anggota BPK mempunyai tugas, yang telah diatur secara terperinci. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, pimpinan BPK dibantu Pelaksana BPK, yang masing-masing dipimpin pejabat eselon I.



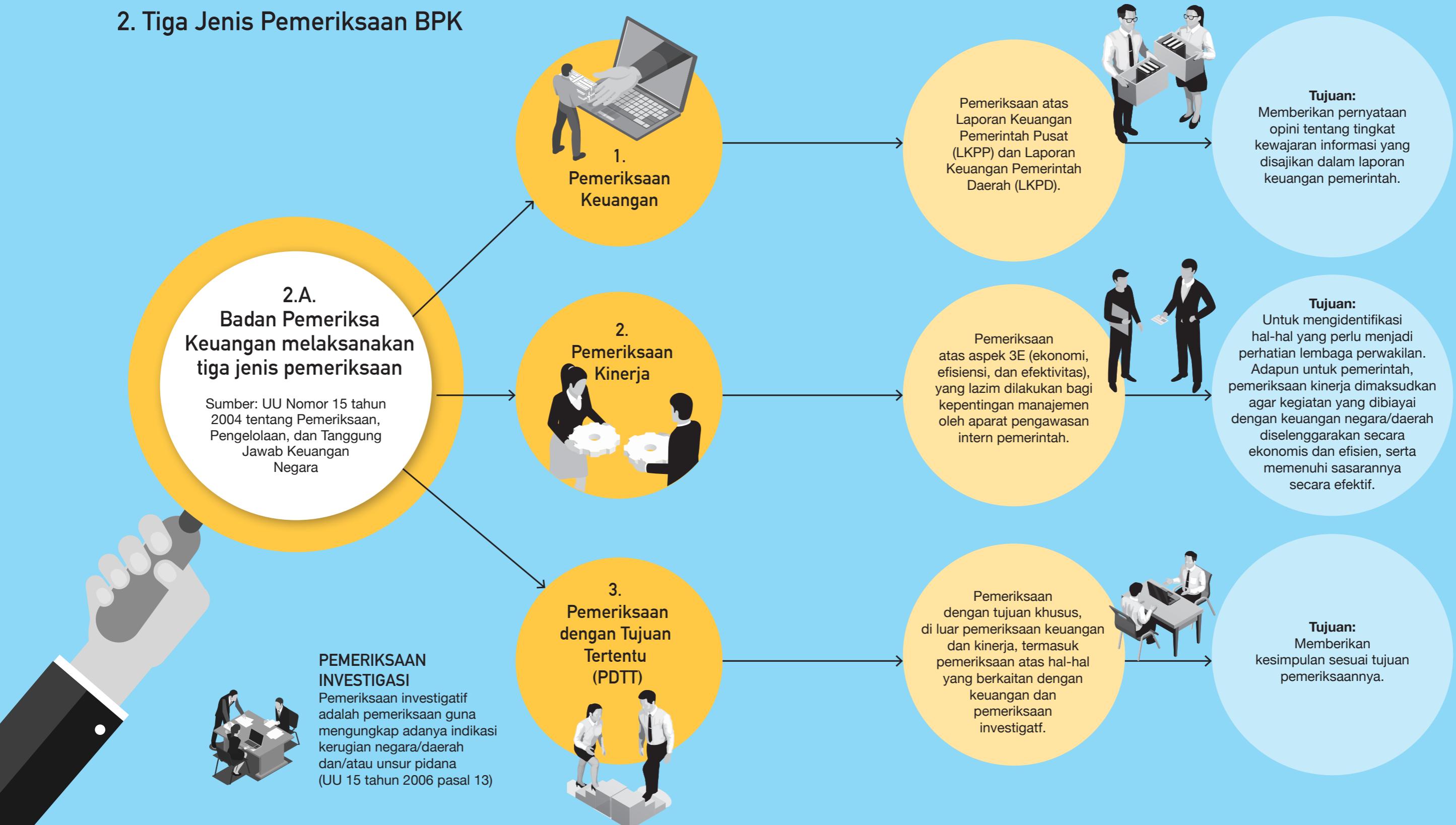




BAB 1 HASIL PEMERIKSAAN BPK



2. Tiga Jenis Pemeriksaan BPK

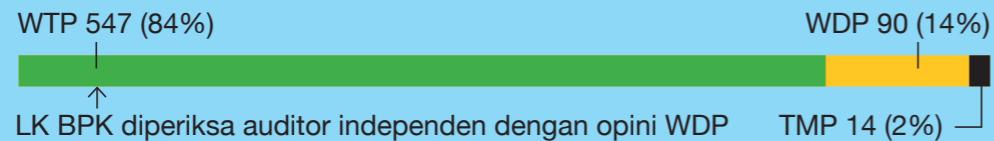


2.B. Pemeriksaan Laporan Keuangan

IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan atas satu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 85 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL), satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN), 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan 4 BUMN

Opini Hasil Pemeriksaan

Total: 651



Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah

Total: 542



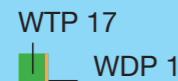
Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Pusat/Kementerian dan Lembaga/Bendahara Umum Negara

Total: 87



LKPHLN

Total: 18



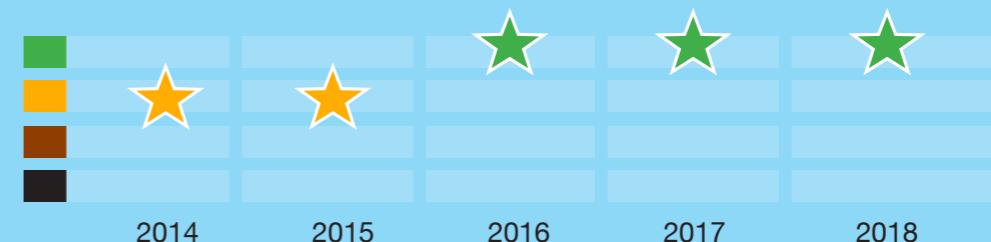
Badan lainnya

Opini WTP untuk 4 dari 4 yang diperiksa



Opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2014-2018

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pemerintah pusat 2018. Yang ketiga selama tiga tahun berturut-turut.

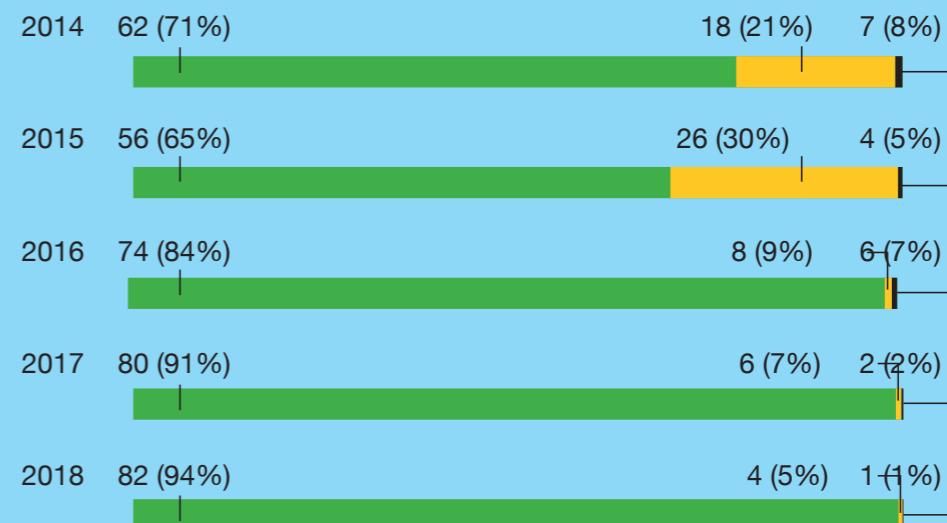


(WTP) Wajar Tanpa Pengecualian
(WDP) Wajar Dengan Pengecualian
(TW) Tidak Wajar
(TMP) Tidak Menyatakan Pendapat

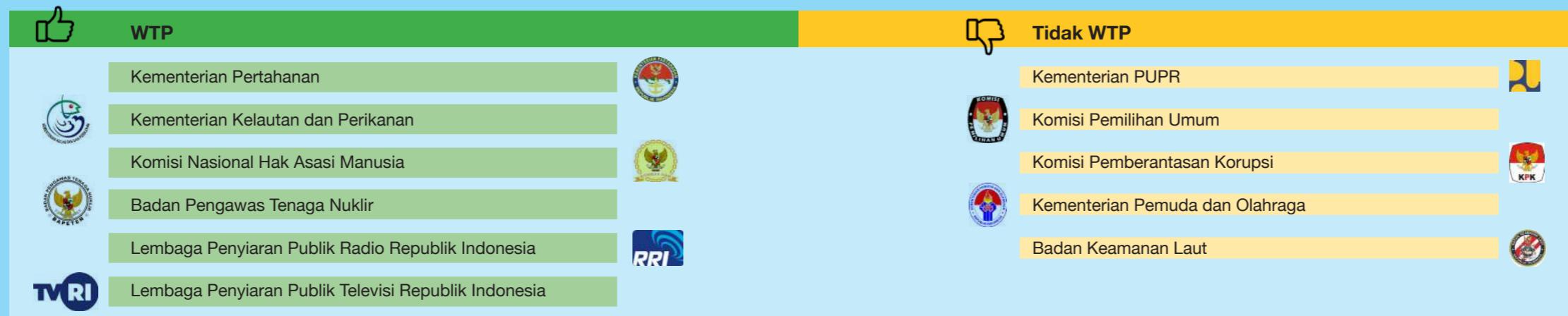
Opini Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga 2014-2018

Capaian WTP terus meningkat setiap tahun sejak 2015. Target WTP 2019 (Rp JMN) sebesar 95% bisa tercapai?

Tahun WTP WDP TMP

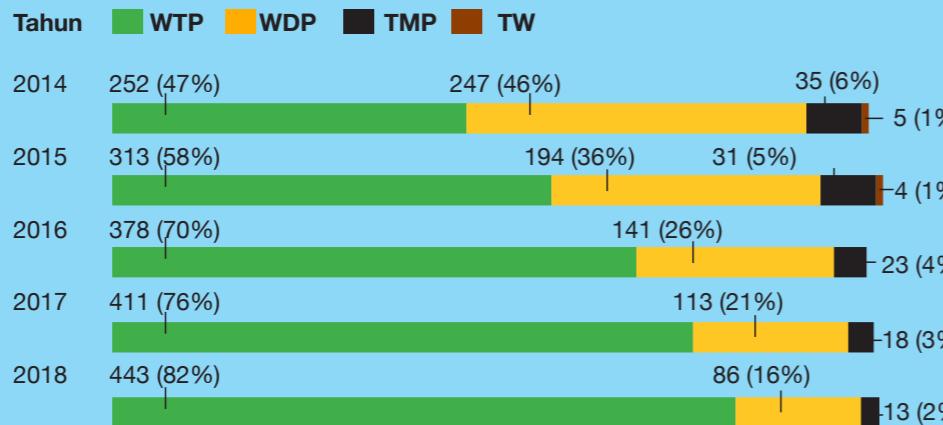


Siapa yang mengalami kenaikan opini menjadi WTP di 2018



Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2014-2018

(data gabungan provinsi, kabupaten dan kota)



Kenaikan Opini Tahun 2018

1 Pemprov
44 Pemkab
7 Pemkot

Penurunan Opini Tahun 2018

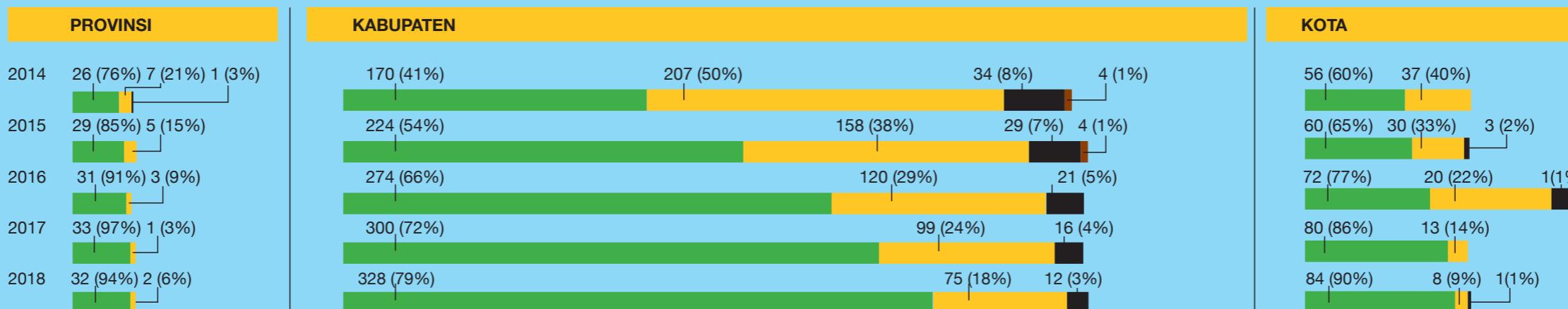
2 Pemprov
9 Pemkab
4 Pemkot

LKPD Tahun 2018 (Rp Triliun)

Neraca	
Aset	2.648,60
Kewajiban	50,88
Ekuitas	2.597,72
Laporan Realisasi Anggaran	
Pendapatan	1.104,29
Belanja	933,62
Laporan Operasional	
Pendapatan-LO	1.129,65
Beban	989,70

Data 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota terpilih

WTP WDP MP TW



Opini Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya 2014-2018

PADA semester I tahun 2019 BPK telah memeriksa 4 Laporan Keuangan (LK) Badan Lainnya Tahun 2018 yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).



Keterangan:

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

diberikan jika sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.



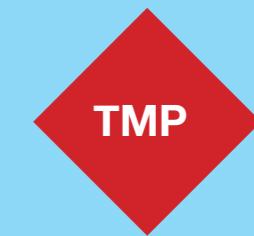
Opini WDP (Wajar dengan Pengecualian)

diberikan jika sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.



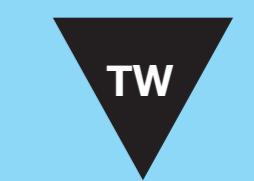
Opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat)

diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.



Opini TW (Tidak Wajar)

diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.



2. B.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Pada Semester 1 2019, BPK melakukan pemeriksaan atas 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN), naik dari 16 laporan pada tahun sebelumnya. Sebanyak 17 LKPHLN memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dan 1 LKPHLN memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Jumlah Pemeriksaan BPK 2015-2019 atas LKPHLN

2015:	7 LKPHLN	■■■■■■■
2016:	8 LKPHLN	■■■■■■■■
2017:	9 LKPHLN	■■■■■■■■■
2018:	16 LKPHLN	■■■■■■■■■■■■■■■■
2019:	18 LKPHLN	■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Pinjaman IBRD No. 8121-ID JUFMP/JEDI mendapat opini WDP karena pekerjaan *dredging with barge and disposal* senilai

Rp 20,88 miliar
tidak sesuai dengan metode pelaksanaan dalam kontrak.

Dan BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan cukup dan tepat untuk dapat melakukan penyesuaian.



Pemeriksaan LKPHLN pada 2019 Berdasarkan Kementerian/Lembaga

	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 9 Laporan	■■■■■■■■■
	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 1 Laporan	■
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 2 Laporan	■■
	Kementerian Pertanian: 1 Laporan	■
	Kementerian Kelautan dan Perikanan: 1 Laporan	■
	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 2 Laporan	■■
	Kementerian Keuangan: 1 Laporan	■
	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: 1 Laporan	■

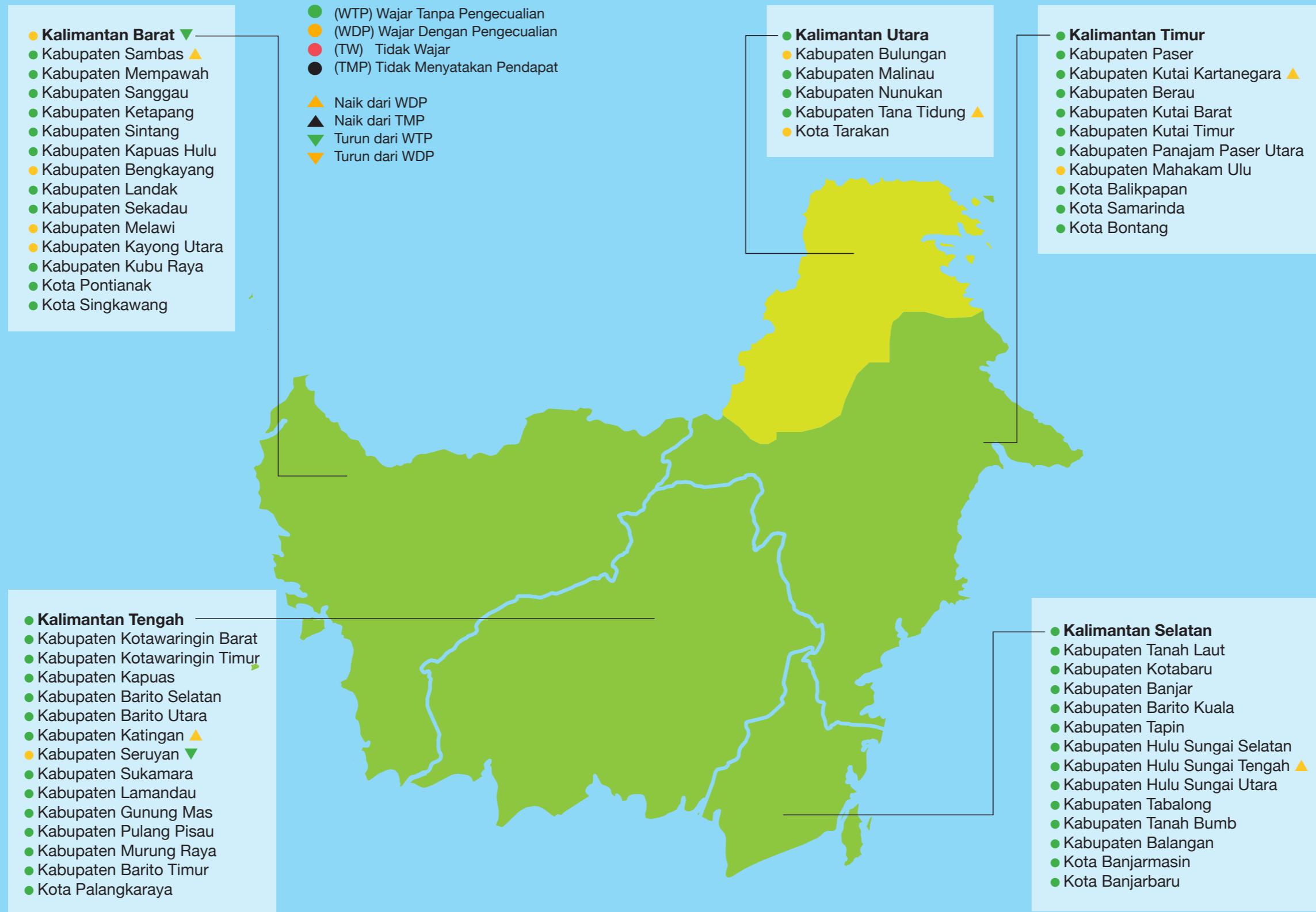
2. B.2. Peta Opini LPKD Tahun 2018

- WTP 70%-100%
- WTP 50%-69%









● (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian
● (WDP) Wajar Dengan Pengecualian
● (TW) Tidak Wajar
● (TMP) Tidak Menyatakan Pendapat

▲ Naik dari WDP
▲ Naik dari TMP
▼ Turun dari WTP
▼ Turun dari WDP

● **Provinsi Nusa Tenggara Barat**

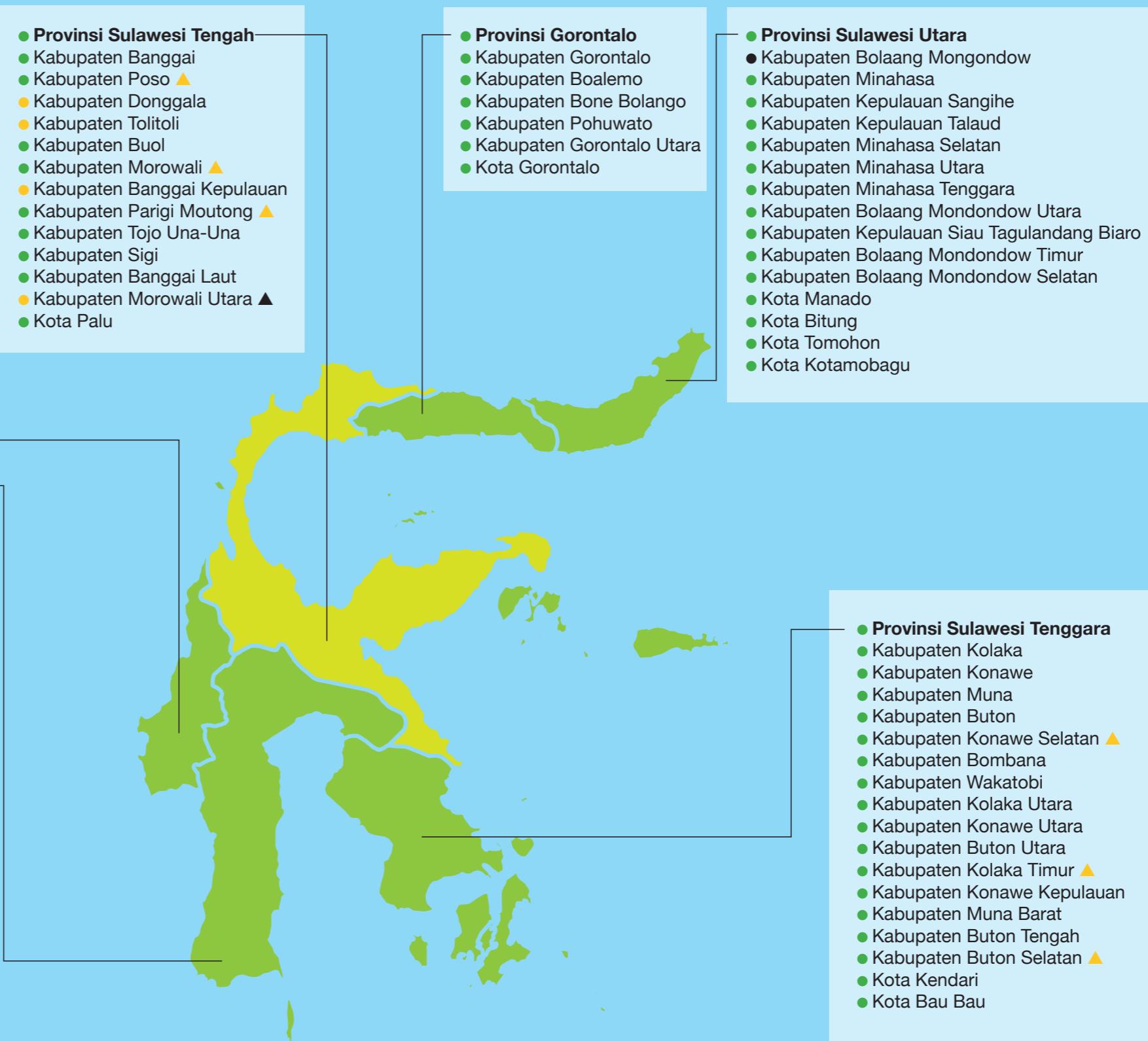
● Kabupaten Lombok Barat
● Kabupaten Lombok Tengah
● Kabupaten Lombok Timur
● Kabupaten Sumbawa
● Kabupaten Dompu
● Kabupaten Bima
● Kabupaten Sumbawa Barat
● Kabupaten Lombok Utara
● Kota Mataram
● Kota Bima

● **Provinsi Nusa Tenggara Timur**
● Kabupaten Kupang
● Kabupaten Timor Tengah Selatan
● Kabupaten Timor Tengah Utara
● Kabupaten Belu ▲
● Kabupaten Alor
● Kabupaten Flores Timur
● Kabupaten Sikka
● Kabupaten Ende
● Kabupaten Ngada ▲
● Kabupaten Manggarai Timur ▲
● Kabupaten Manggarai ▲
● Kabupaten Sumba Timur ▲
● Kabupaten Sumba Barat
● Kabupaten Lembata
● Kabupaten Rote Ndao
● Kabupaten Manggarai Barat ▲
● Kabupaten Manggarai Timur ▲
● Kabupaten Nagekeo
● Kabupaten Sumba Tengah
● Kabupaten Sumba Barat Daya
● Kabupaten Sabu Raijua
● Kabupaten Malaka
● Kota Kupang

- (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian
- (WDP) Wajar Dengan Pengecualian
- (TW) Tidak Wajar
- (TMP) Tidak Menyatakan Pendapat
- ▲ Naik dari WDP
- ▲ Naik dari TMP
- ▼ Turun dari WTP
- ▼ Turun dari WDP

- **Provinsi Sulawesi Barat**
- Kabupaten Mamuju Utara
- Kabupaten Mamuju
- Kabupaten Mamasa
- Kabupaten Polewali Mandar
- Kabupaten Majene
- Kabupaten Mamuju Tengah

- **Provinsi Sulawesi Selatan**
- Kabupaten Kepulauan Selayar
- Kabupaten Bulukumba
- Kabupaten Bantaeng
- Kabupaten Jeneponto
- Kabupaten Takalar
- Kabupaten Gowa
- Kabupaten Sinjai
- Kabupaten Bone
- Kabupaten Maros
- Kabupaten Pangkajene
- Kabupaten Barru
- Kabupaten Soppeng
- Kabupaten Wajo
- Kabupaten Sidenreng Rappang
- Kabupaten Pinrang
- Kabupaten Enrekang ▲
- Kabupaten Luwu
- Kabupaten Tana Toraja
- Kabupaten Luwu Utara
- Kabupaten Luwu Timur
- Kabupaten Toraja Utara
- Kota Makassar
- Kota Parepare ▼
- Kota Palopo



- **Provinsi Maluku Utara** ▲
 - Kabupaten Halmahera Barat
 - Kabupaten Halmahera Tengah ▲
 - Kabupaten Halmahera Utara ▲
 - Kabupaten Halmahera Selatan
 - Kabupaten Kepulauan Sula
 - Kabupaten Halmahera Timur
 - Kabupaten Pulau Morotai
 - Kabupaten Pulau Taliabu
 - Kota Ternate
 - Kota Tidore Kepulauan

- **Provinsi Maluku** ▼
 - Kabupaten Maluku Tengah
 - Kabupaten Maluku Tenggara
 - Kabupaten Maluku Tenggara Barat
 - Kabupaten Buru
 - Kabupaten Seram Bagian Timur
 - Kabupaten Seram Bagian Barat ▲
 - Kabupaten Kepulauan Aru
 - Kabupaten Kepulauan Tanimbar ▲
 - Kabupaten Maluku Barat Daya
 - Kabupaten Buru Selatan ▲
 - Kota Ambon
 - Kota Tual

- **Provinsi Papua Barat**
 - Kabupaten Sorong
 - Kabupaten Manokwari
 - Kabupaten Fakfak
 - Kabupaten Sorong Selatan
 - Kabupaten Raja Ampat
 - Kabupaten Teluk Bintuni

- Kabupaten Teluk Wondama ▲
 - Kabupaten Kaimana
 - Kabupaten Tambrauw
 - Kabupaten Maybrat
 - Kabupaten Manokwari Selatan
 - Kabupaten Pegunungan Arfak
 - Kota Sorong

- **Provinsi Papua**
 - Kabupaten Merauke
 - Kabupaten Jayawijaya
 - Kabupaten Jayapura
 - Kabupaten Nabire ▲
 - Kabupaten Kepulauan Yapen
 - Kabupaten Biak Numfor
 - Kabupaten Puncak Jaya
 - Kabupaten Paniai
 - Kabupaten Mimika
 - Kabupaten Sarmi
 - Kabupaten Keerom ▲
 - Kabupaten Pegunungan Bintang
 - Kabupaten Yahukimo
 - Kabupaten Tolikara

- Kabupaten Waropen
- Kabupaten Boven Digoel
- Kabupaten Mappi
- Kabupaten Asmat
- Kabupaten Supiori
- Kabupaten Mamberamo Raya
- Kabupaten Mamberamo Tengah
- Kabupaten Yalimo
- Kabupaten Lanny Jaya
- Kabupaten Nduga
- Kabupaten Puncak
- Kabupaten Dogiyai
- Kabupaten Intan Jaya
- Kabupaten Deiyai
- Kota Jayapura

- (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian
- (WDP) Wajar Dengan Pengecualian
- (TW) Tidak Wajar
- (TMP) Tidak Menyatakan Pendapat

- ▲ Naik dari WDP
- ▲ Naik dari TMP
- ▼ Turun dari WTP
- ▼ Turun dari WDP

2.C. Pemeriksaan Kinerja

(Berdasarkan Entitas Pemeriksaan)

Hasil Pemeriksaan Pada Pemerintah Pusat yang Signifikan

2. C.1. Perekonomian dan Keuangan Negara

Pemeriksaan kinerja terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

TUJUAN

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) 2015–semester I 2019.

HASIL ANTARA LAIN:



BPS telah mampu menyediakan indikator TPB yang sesuai dengan konsep global.



Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur lebih lanjut mekanisme pemantauan dan evaluasi TPB.



19 Pemerintah Provinsi telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB.

CATATAN: Goal 4 (pendidikan) TPB belum terintegrasi dan tepat sasaran, di antaranya: pembangunan gedung dan pemenuhan peralatan dilakukan di tahun anggaran berbeda, penyebaran Kartu Indonesia Pintar tidak tepat sasaran.

2. C.2. Pendidikan

Pemeriksaan kinerja meliputi pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian.

TUJUAN

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian tahun 2016–semester I tahun 2018 pada Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN.

HASIL ANTARA LAIN:



Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 dan Prioritas Riset Nasional (PRN) 2017-2019 di Kemenristekdikti belum memadai.

serta penetapan target renstra kegiatan penelitian belum mengarah hilirisasi.

CATATAN: Perlu penetapan kegiatan PRN yang memuat: koordinasi antarlembaga penelitian, pembagian dan penyusunan anggaran yang tepat dan jelas.

2. C.3. Ketersediaan Pangan

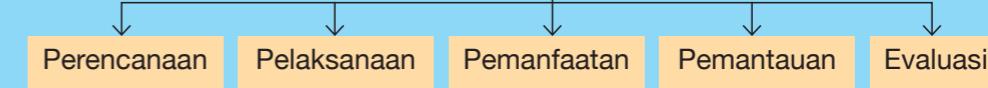
Pemeriksaan kinerja meliputi pengelolaan irigasi.

TUJUAN

Pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi guna mewujudkan ketahanan air untuk mendukung kedaulatan pangan tahun anggaran 2015–semester I 2018 pada Kementerian PUPR.

HASIL ANTARA LAIN:

Kementerian PUPR belum efektif dalam aspek



guna mendukung peningkatan kedaulatan pangan antara lain karena

Koordinasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian belum optimal dan belum dilaksanakan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) 2015-2019.

CATATAN: Perlu kebijakan/pedoman baku tentang koordinasi dengan instansi terkait dan pelibatan instansi terkait.

BUMN

Pertamina (Persero)

Pemeriksaan kinerja pada PT Pertamina (Persero) atas tema perekonomian dan keuangan negara.

TUJUAN

Pemeriksaan atas efektivitas kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk mendukung ketersediaan kebutuhan energi bagi masyarakat.

HASIL ANTARA LAIN:

Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG oleh PT Pertamina (Persero) tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2018 **belum sepenuhnya efektif**, antara lain

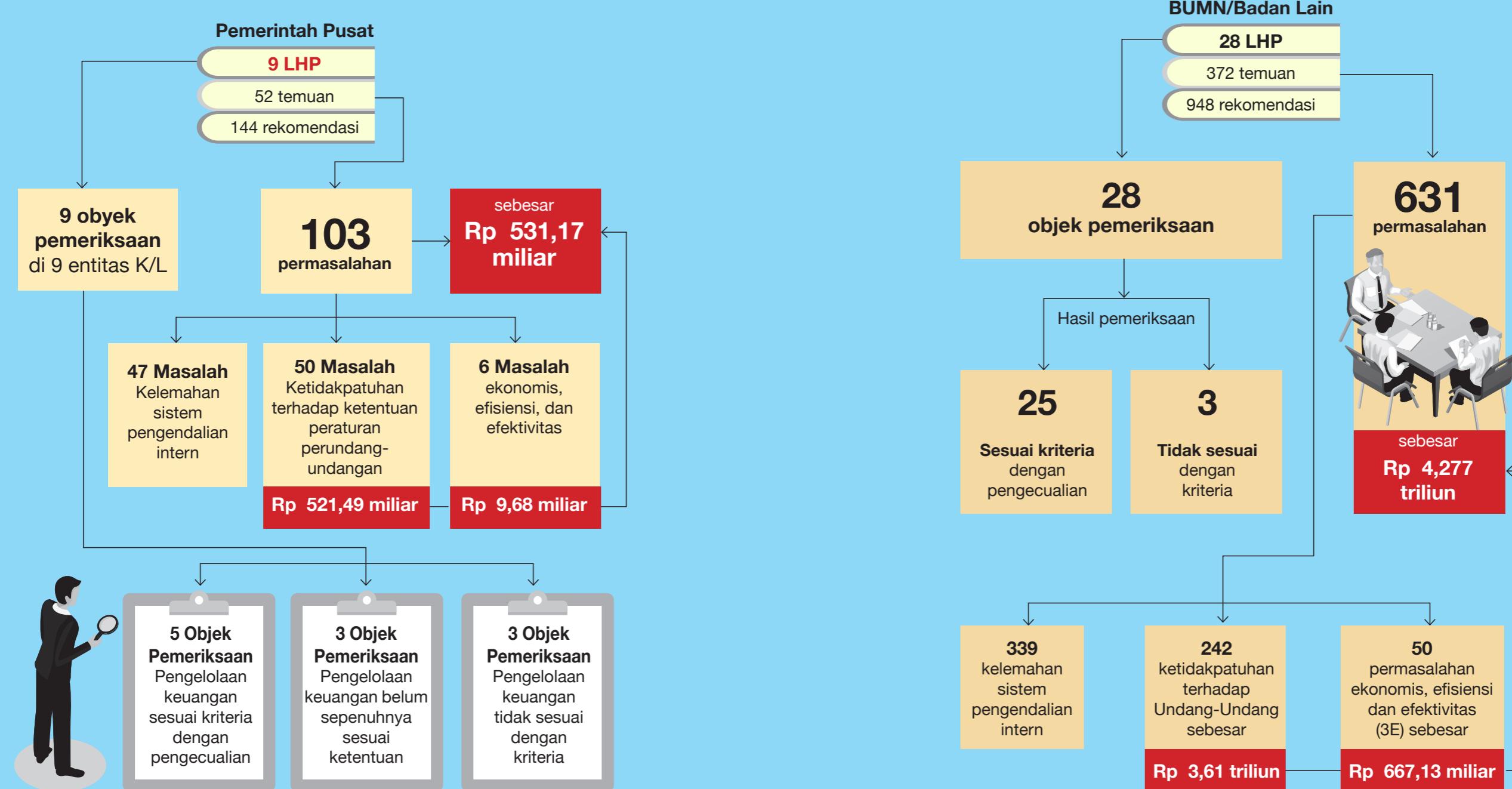
karena sarana dan fasilitas storage LPG, baik di darat maupun *floating storage* hanya dapat meng-cover **52,37%** dari kapasitas storage LPG nasional.

CATATAN: Hasil pemeriksaan mengungkapkan 18 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

2. D. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 2019

(Berdasarkan Entitas Pemeriksaan)

HASIL pemeriksaan dengan tujuan tertentu sampai dengan semester I tahun 2019 menunjukkan ada lebih banyak masalah ditemukan di BUMN/badan lain dibanding di Pemerintah Pusat. Rata-rata ada 13 temuan per LHP di BUMN/badan lain, sementara pada LHP pemerintah pusat hanya 5,7 per LHP.



2. D.1. Hasil Pemeriksaan Signifikan PDTT 2019

Temuan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Perizinan Minerba
Terdapat kekurangan PNBP sebesar
Rp 223,46 miliar dan US\$20,81 juta, terdiri atas

4.444
dari **4.726 perusahaan** pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi belum menempatkan jaminan reklamasi atau jaminan pascatambang.

983 perusahaan telah menempatkan jaminan reklamasi

31 perusahaan telah menempatkan jaminan pascatambang

3.430 perusahaan Belum menempatkan kedua jenis jaminan

23 perusahaan pertambangan kurang bayar

Rp 90,42 miliar dan US\$20,81 juta

(untuk iuran tetap, royalti, Dana Hasil Produksi Batu Bara, dan denda)

5 perusahaan pertambangan di kawasan hutan kurang bayar

Rp 126,10 miliar

akibat perhitungan PNBP-PKH yang tidak tepat karena perbedaan luasan dan kriteria baseline.

6 perusahaan harus setor PNBP

Rp 6,94 miliar

karena melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan di luar konsesi PKP2B dan belum didukung dengan IPPKH.

Temuan Pengelolaan Program Beasiswa di Kemenristekdikti

17 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan dan Aspek Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Senilai **Rp 2,945 miliar**.

Permasalahan Utama

Alokasi 55.000 beasiswa Bidikmisi jalur khusus tidak memiliki dasar jelas, proses seleksi tidak sesuai ketentuan.

Monitoring atas dosen penerima beasiswa tidak optimal

452 dosen (80 tugas belajar S2 dan 372 tugas belajar S3) yang tidak menyelesaikan kuliah dan 26 dosen (11 tugas belajar S2 dan 15 tugas belajar S3) yang tidak tercatat lagi sebagai dosen di perguruan tinggi asal, belum dikenakan sanksi dan belum menyetorkan penggantian uang beasiswa ke kas negara.

502 dosen penerima beasiswa Dikt (196 tugas belajar S2 dan 306 tugas belajar S3) yang tidak menyelesaikan kuliah dan 26 dosen (11 tugas belajar S2 dan 15 tugas belajar S3) yang tidak tercatat lagi sebagai dosen di perguruan tinggi asal, belum dikenakan sanksi dan belum menyetorkan penggantian uang beasiswa ke kas negara.

Rekomendasi

- Merencanakan dan mengalokasikan kuota Bidikmisi secara proporsional ke PTN dan PTS.
- Membuat sistem pelaporan dan pemberitahuan kepada karyasiswa yang akan habis masa tugas belajarnya.
- Membuat perencanaan kebutuhan beasiswa sesuai dengan kebutuhan PT.
- Sanksi tegas terhadap dosen yang tidak menyelesaikan tugas belajar.
- Dirjen SDID dan perguruan tinggi terkait meningkatkan monitoring dan evaluasi serta menetapkan sanksi.

3. Pemeriksaan Investigatif

IHPS I 2019 memuat Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, serta Pemberian Keterangan Ahli periode 2017-30 Juni 2019.

Pemeriksaan Investigatif:	Penghitungan Kerugian Negara:	Pemberian Keterangan Ahli:
16 laporan	184 laporan	163 kasus persidangan
(indikasi kerugian Rp 8,57 triliun)	(nilai kerugian Rp 11,30 triliun)	

PEMANFAATAN LAPORAN

Pemanfaatan laporan hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, serta Pemberian Keterangan Ahli periode 2017-30 Juni 2019 oleh instansi berwenang.

Pemeriksaan Investigatif (PI)

PI yang telah disampaikan	7	9
PI yang dimanfaatkan dalam proses penyelidikan	3	3
PI yang dimanfaatkan dalam proses penyidikan	4	6

Penghitungan Kerugian Negara (PKN)

PKN yang telah disampaikan	33	127	24
PKN yang dimanfaatkan dalam proses penyelidikan	8	36	7
PKN yang dimanfaatkan dalam proses penyidikan	25	91	17

Pemberian Keterangan Ahli (PKA)

PKA yang telah disampaikan	31	116	16
PKA yang dimanfaatkan dalam proses penyelidikan	31	116	16

 Pemerintah Pusat  Pemerintah Daerah dan BUMD  BUMN

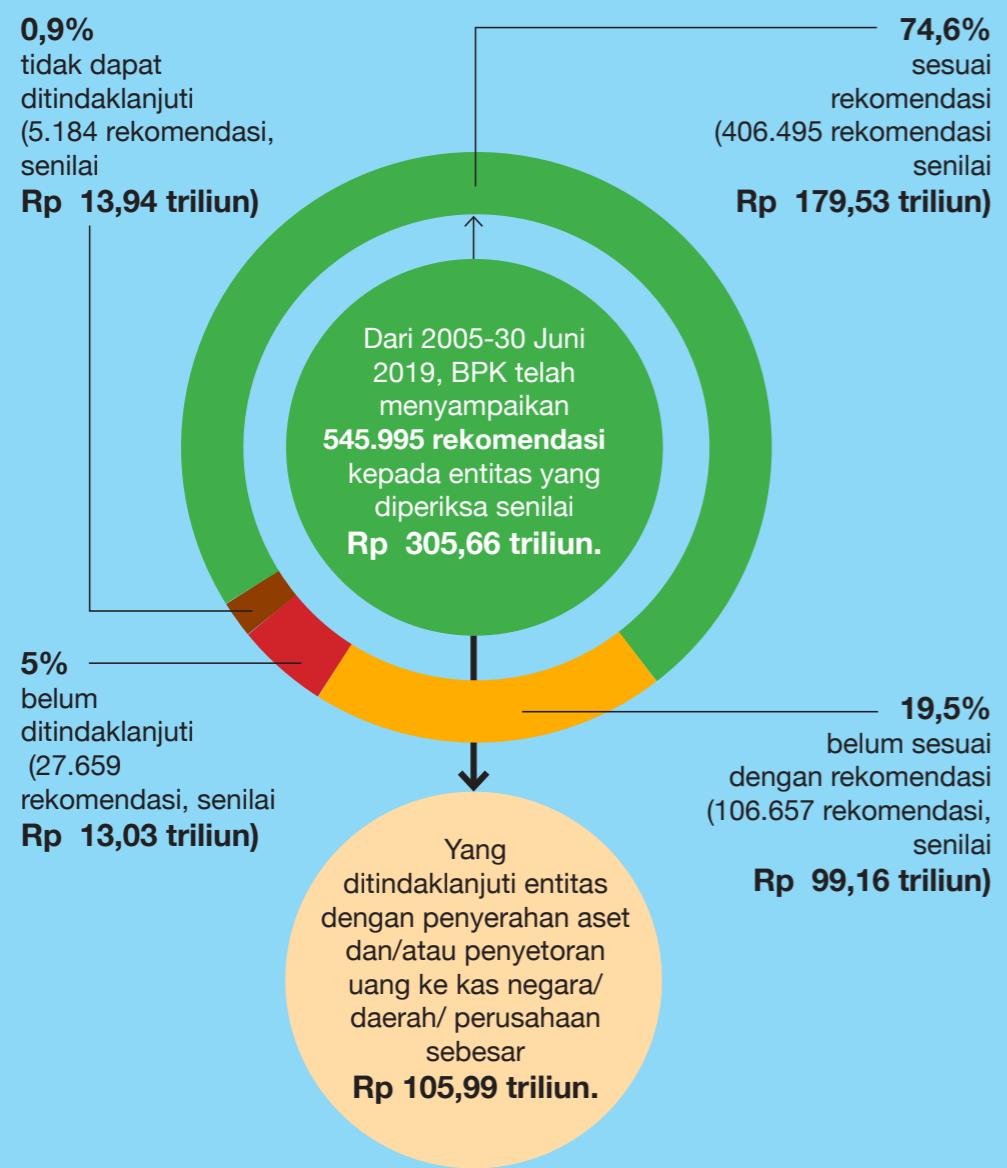
Pemeriksaan Investigatif 2019



4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BPK tak hanya bertugas melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan, tapi juga melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP), penyelesaian kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) 2005-30 Juni 2019



5. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-30 Juni 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp 3 triliun, yang terjadi di pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan BUMD, dengan sisa kerugian sebesar Rp 1,71 triliun.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-30 Juni 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



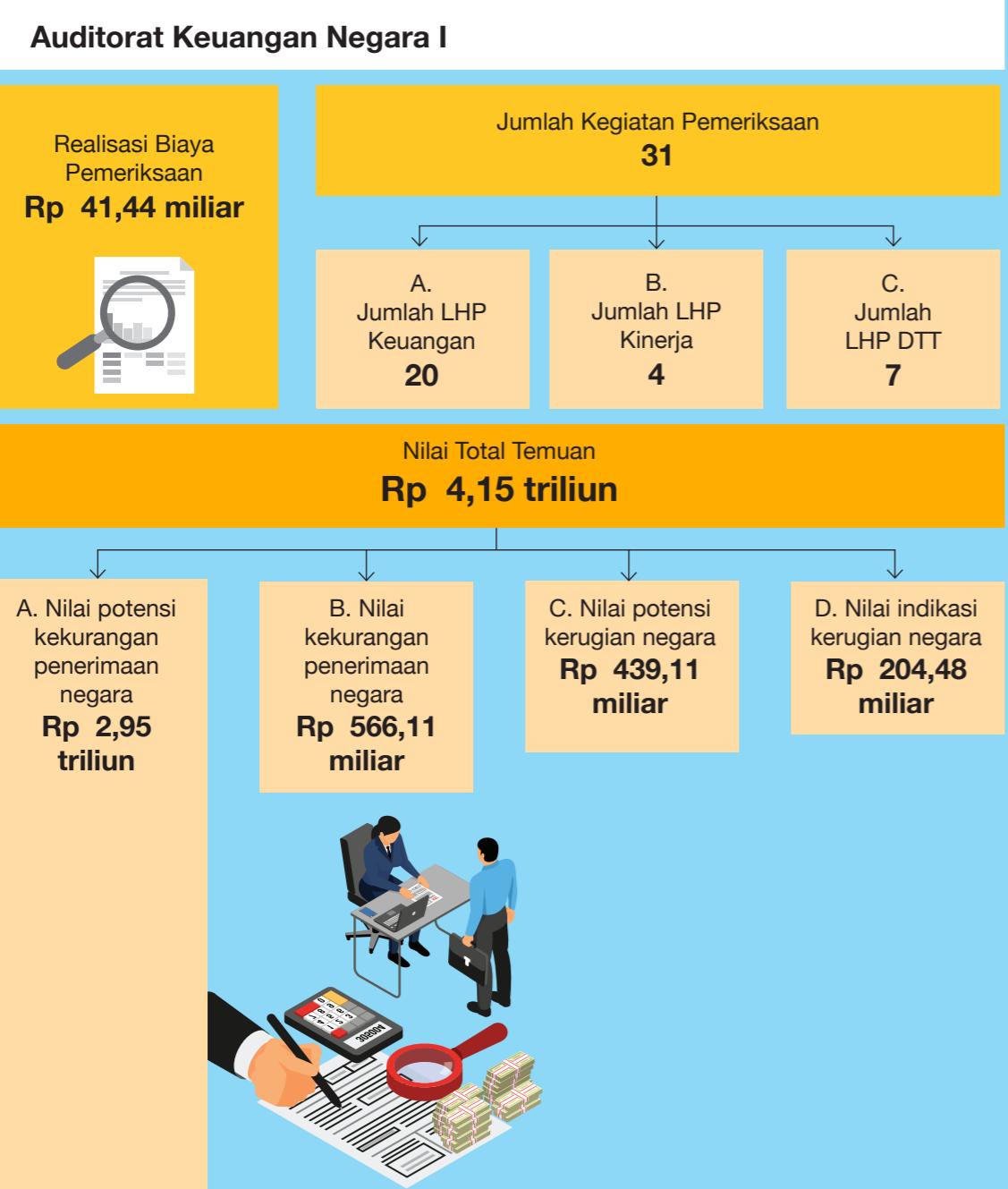
Pemantauan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA)



6. Auditorat Keuangan Negara

BPK mempunyai delapan kompartemen pemeriksa yang disebut Auditorat Keuangan Negara (AKN), yang masing-masing memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada entitas tertentu. Beberapa hasil pemeriksaan AKN selama tahun 2019 antara lain:

PERFORMANCE HIGHLIGHT 2019



Dampak: Perbaikan Tata Kelola Keuangan di K/L

	1. Mendorong terbitnya PMK 143/PMK.05/2018 terkait Pengelolaan Keuangan di Kementerian	4. Revitalisasi Balai Harta Peninggalan melalui RRUU dan/atau PeRp res	6. Pemeriksaan Kinerja berdampak peningkatan PNBP atas Surat Uji Tipe (SUT) dan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Rp 711,86 M (2018) menjadi Rp 1,23 T (2019)	7. Mempercepat penyelesaian Peraturan Kepala Lemdiklat tentang standar pendidikan dan pelatihan Polri
	2. Rekomendasi BPK efektif dalam menyelesaikan masalah sistemik pelaksanaan anggaran	5. Assesment atas beban kerja, cakupan atau wilayah kerja pelayanan keperdataan, potensi PNBP serta tugas dan fungsi BHP	8. Mempercepat proses penyelesaian revisi Sistem Pendidikan Kepolisian (Sisdikpol)	9. Mempercepat pemberlakuan Jabatan Fungsional pada Polri"

Auditorat dalam Angka (dalam miliar rupiah)

Satuan

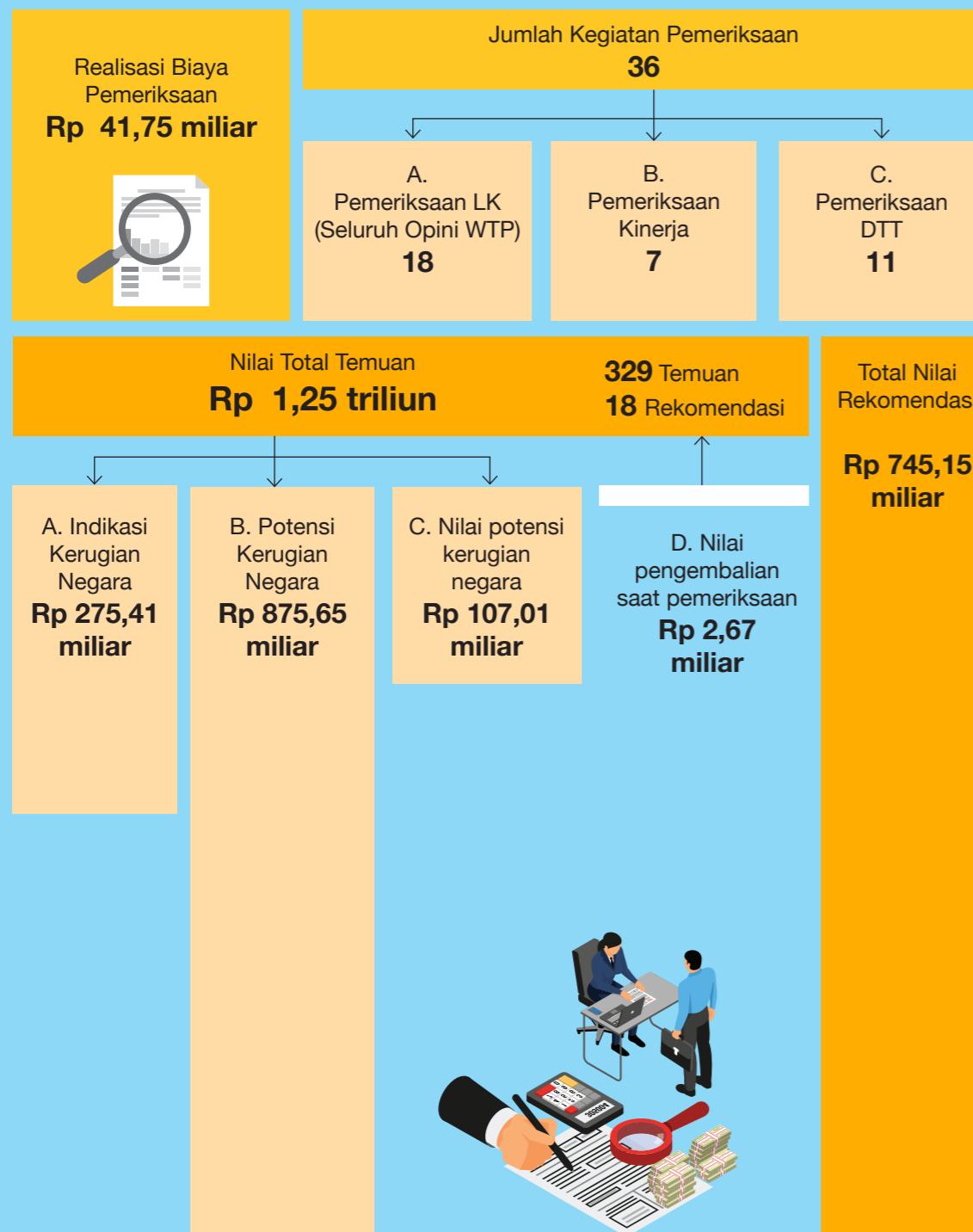
a. Anggaran & Realisasi per Auditorat	I.A	I.B	I.C
Anggaran	14,80	9,87	20,00
Realisasi	13,36	9,87	18,21
b. Jumlah LHP per Auditorat			
LK	7	7	6
Kinerja	1	2	1
PDTT	3	4	2
Tematik	-	-	2

Highlight Hasil Pemeriksaan	I.A	I.B	I.C
Nilai temuan atas LHP terbit 2019 per Auditorat	2.338,27	416,23	1.405,27
a. Indikasi kerugian per Auditorat	54,92	30,14	119,42
b. Potensi kerugian per Auditorat	50,36	348,99	39,76
c. Kekurangan penerimaan per Auditorat	135,76	37,10	393,25
d. Potensi kekurangan penerimaan per Auditorat	2.097,23	-	852,84
Nilai pemulihan keuangan negara per Auditorat	20,15	7,31	66,81



PERFORMANCE HIGHLIGHT 2019

Auditorat Keuangan Negara II



Highlight Dampak Rekomendasi: Perbaikan tata Kelola Keuangan Negara



Kinerja Auditorat Pemeriksaan Keuangan Negara II

(dalam miliar rupiah)

Auditorat Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase

1. Auditorat II.A	2. Auditorat II.B	3. Auditorat II.C	TOTAL
7,612	21,793	18,613	48,019
7,610	21,729	18,527	47,867
99,98%	99,71%	99,54%	99,68%



PERFORMANCE HIGHLIGHT 2019

Auditorat Keuangan Negara III

Hasil Pemeriksaan	Semester 1 2019	Semester II 2019
Laporan Keuangan:	41	-
Laporan Kinerja:	1	7
PDTT:	5	17
Temuan Signifikan		
LK 2018 LIPI Kontribusi Tiket Masuk Pengunjung Kebun Raya Melebihi PP No. 32 Tahun 2016 dan digunakan langsung sebesar Rp 635,87 juta		
LK 2018 Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) salah sasaran (mahasiswa mangkir, cuti, mundur) di UNS dan Undip Rp 730,8 juta .		
Realisasi belanja dan pengelolaan dana penelitian tidak sesuai ketentuan Rp 27,31 miliar	Pertanggung jawaban dana penelitian tidak lengkap Rp 75,53 miliar	
PDTT Kominfo Jakarta Koefisien Transfer Pricing sebagai dasar perhitungan pendapatan LPU PT Pos Indonesia dalam Perjanjian Kerjasama tidak berdasarkan data yang mutakhir sehingga memboroskan keuangan negara Rp 929,53 juta		
PDTT Program Kewajiban Pelayanan Universal Tahun Jamak pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, Kominfo		
Klaim penyedia jasa tidak didukung dokumen Rp 611,50 miliar.	Koreksi pembayaran prestasi kerja Rp 347,44 miliar dan US\$ 513,27ribu.	
PDTT Universitas Hasanuddin Saldo kas belum dilaporkan Rp 718,82 juta	PDTT ITS Surabaya Belum mengembalikan sisa UMK Rp 323,8 juta	
PDTT Universitas Diponegoro Pengelolaan SPBU Undip tidak sesuai ketentuan:		
Discrepancy atas pembelian BBM melebihi toleransi 0,15% 2016-2019 Rp 2,24 miliar	Losses penjualan 2016 sampai Semester I 2019 Rp 3,58 miliar	Pengelolaan Dana Kerjasama belum memadai Rp 11,04 miliar
PDTT USU Medan		
Penyelesaian Sisa Dana Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan Rp 28,43 miliar	Pertanggungjawaban Belanja Dana Non PNBP USU Rp 5,79 miliar	

PERFORMANCE HIGHLIGHT 2019

Auditorat Keuangan Negara IV



Dampak: Perbaikan Tata Kelola Keuangan di Kementerian dan Lembaga

Auditorat dalam Angka (dalam miliar rupiah)

Anggaran dan Realisasi	IVA	IVB	IVC	Total
RKP atas LHP terbit	12,40	9,49	6,78	28,68
Realisasi atas LHP terbit	12,11	8,99	6,77	27,87
Jumlah LHP	IVA	IVB	IVC	Total
Laporan Keuangan	10	3	5	18
Laporan Kinerja	0	1	0	1
PDTT	6	2	2	10

Highlight Hasil Pemeriksaan (dalam miliar rupiah)

Nilai temuan atas LHP terbit 2019		IVA	IVB	IVC
a. Indikasi kerugian	Rupiah	844.794,69	302,23	1.343,68
b. Potensi kerugian	Rupiah	150.768,86	1.718,89	-
	USD	0,12 juta	-	-
c. Kekurangan penerimaan	Rupiah	95.190	418,55	4,67
	USD	0,12 juta		
d. Potensi kekurangan penerimaan	Rupiah	92.57		2,13

Nilai Pemulihan Keuangan Negara (dalam miliar rupiah)

Auditorat IV A	92,57
Auditorat IV B	-
Auditorat IV C	2,13



LHP Kinerja atas Efektivitas Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional

Temuan:

Mekanisme harga yang disediakan oleh pemerintah belum efektif untuk meningkatkan investasi di bidang energi baru terbarukan	PP Nomor 79/2014: Feed-in tariff harga jual energi terbarukan ke PLN ditetapkan pemerintah
---	--

Permen ESDM 50/2017:
feed-in tariff harga jual energi terbarukan ke PLN diubah menjadi berdasarkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan listrik lokal yang telah dikeluarkan oleh PT PLN dan telah ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Disharmonisasi:
antara Pemerintah Nomor 79/2014 dan Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tersebut dianggap pengembang menghambat investasi.



PERFORMANCE HIGHLIGHT 2019

Auditorat Keuangan Negara V



Dampak:

Dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, BPKS, BP Batam, BNPP, BPWS, dan BPKH baik pada aspek pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap perundang-undangan;

Mempertegas dan memperbaiki Tata Pengelolaan Keuangan Haji sesuai peraturan perundang-undangan dan mengatur lebih jelas hubungan kewenangan antara Ditjen PHU (Kementerian Agama) dengan BPKH dalam Pengoloaan Keuangan Haji dan penyelenggaraan ibadah haji;

Membantu Kementerian Agama melakukan efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, sehingga tidak membebani keuangan haji;

Auditorat dalam Angka

Anggaran Auditorat VA **Rp 16,89 Miliar**

Realisasi Auditorat VA **Rp 16,32 Miliar**



PERFORMANCE HIGHLIGHT 2019

Auditorat Keuangan Negara VI

Jumlah Kegiatan Pemeriksaan		
AKN VI A:	Satker Perwakilan:	Jumlah:
3 LHP Keuangan, 6 LHP Kinerja, 3 LHP PDTT	259 LHP Keuangan, 99 LHP Kinerja, 2.214 LHP DTT	262 LHP Keuangan, 105 LHP Kinerja, 2.217 LHP DTT
Biaya Pemeriksaan: →	Rp 22,05 miliar	Rp 166,14 miliar
		Rp 188,19 miliar
Temuan	Rp 51,3 miliar dan SAR 178.796,2	Rp 1,64 triliun Rp 1,69 triliun dan SAR 178.796,2
a. Nilai kekurangan penerimaan negara:	Rp 16,38 miliar dan SAR 88.735,2	Rp 466,96 miliar Rp 483,34 miliar dan SAR 88.735,2
b. Nilai potensi kerugian negara:	Rp 4,76 miliar	Rp 391,73 miliar Rp 396,49 miliar
c. Nilai indikasi kerugian negara	Rp 30,16 miliar dan SAR 90.061	Rp 777,36 miliar Rp 807,52 miliar dan SAR 90.061
Dampak Perbaikan Tata Kelola Keuangan di Kementerian dan Lembaga:		
1. Perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan dan lebih optimalnya pelaksanaan program JKN	AKN VI A:	2. Perbaikan tata kelola peningkatan kualitas pembelajaran melalui penggantian UN dengan:
Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Survei Karakter karena UN dianggap hanya menilai aspek kognitif saja, belum menyentuh karakter siswa. Dengan Survei Karakter diharapkan dapat sekaligus memberikan gambaran/mengukur dampak implementasi PPK di sekolah, misalnya dengan mengetahui kondisi akhlak dan kerukunan peserta didik diantaranya tentang pembelajar, gotong royong, kebhinekaan, dan perundungan.;		

Satker Perwakilan:

Perbaikan penatausahaan keuangan daerah yang ditandai dengan terjadinya peningkatan Opini WTP atas LKPD Tahun 2018 pada 29 Pemerintah Daerah di wilayah AKN VI dibandingkan tahun sebelumnya (LKPD Tahun 2017).

Auditorat dalam Angka

Anggaran per Auditorat	Realisasi per Auditorat
Rp 22,06 miliar	AKN VI A Rp 22,05 miliar
Rp 171,09 miliar	Satker Perwakilan Rp 166,14 miliar
Rp 193,15 miliar	Jumlah Rp 188,19 miliar

Nilai Temuan atas LHP Terbit 2019

AKN VI A: Rp 34,25 miliar dan SAR 178.796,2	Satker Perwakilan: Rp 1,64 triliun	Jumlah: Rp 1,67 triliun dan SAR 178.796,2
a. Indikasi kerugian per Auditorat	b. Potensi kerugian per Auditorat	c. Kekurangan penerimaan per auditoriat
AKN VI A	Rp 16,90 miliar dan SAR 90.061	Rp 4,76 miliar dan SAR 88.735,2
Satker Perwakilan	Rp 777,36 miliar	Rp 391,73 miliar Rp 466,96 miliar
Jumlah	Rp 807,52 miliar dan SAR 90.061	Rp 396,49 miliar Rp 483,34 miliar dan SAR 88.735,2

PERFORMANCE HIGHLIGHT 2019

Auditorat Keuangan Negara VII

	Hasil Pemeriksaan <table border="1"> <tr> <td>Laporan Keuangan:</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Laporan Kinerja:</td><td>3</td></tr> <tr> <td>PDTT:</td><td>44</td></tr> </table>	Laporan Keuangan:	1	Laporan Kinerja:	3	PDTT:	44
Laporan Keuangan:	1						
Laporan Kinerja:	3						
PDTT:	44						
Temuan Signifikan							
<p>Perhitungan subsidi listrik TA 2017 PLN mengajukan Rp 55,81 triliun Koreksi BPK Rp 7,71 triliun</p>							
<p>PT Pertamina (Persero) tidak mendapatkan manfaat atas pengelolaan Lapangan Golf Kenten Palembang oleh pihak ketiga, menanggung pembayaran PBB 2014 s.d. 2018 Rp 68,29 miliar.</p>							
Transaksi Sewa Stasiun yang Dibayarkan PT KCI kepada PT KAI (Persero) yang ditagihkan ke Pemerintah di dalam Laporan Pertanggungjawaban PSO tidak sesuai ketentuan.	Pengelolaan Pendapatan Pas Pelabuhan untuk Orang dan Kendaraan belum memadai dan terdapat kehilangan potensi pendapatan Rp12,87 miliar.						
<p>Pendanaan kegiatan investasi yang berasal dari pinjaman perbankan oleh PTPN VII mengakibatkan perusahaan terbebani bunga kredit investasi Rp 291,78 miliar per tahun</p>							
PT Petrokimia Gresik berpotensi kehilangan pendapatan atas denda keterlambatan pengambilan pupuk oleh distributor yang belum tertagih Rp 2,67 miliar.	Direksi PT Pesonna Optima Jasa (anak perusahaan PT Pegadaian) belum menyusun peraturan direksi yang mengatur tentang pedoman pengelolaan aset tetap.						
<p>Sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas pada PT JP belum memadai, karena tidak ada ketentuan tentang plafon komponen perjalanan dinas dan bukti yang sah lainnya.</p>							

PERFORMANCE HIGHLIGHT 2019

Auditorat Utama Investigasi

Jumlah Kegiatan Pemeriksaan 444	A. Jumlah Pemeriksaan Investigatif 22	B. Jumlah Penghitungan Kerugian Negara 229	C. Jumlah Pemberian Keterangan Ahli Persidangan 193
--	--	---	--

Nilai Indikasi Kerugian/Kerugian

A. Pemeriksaan Investigatif Rp 8,7 triliun	B. Penghitungan Kerugian Negara Rp 11,7 Triliun
---	--

Nilai Kasus yang diserahkan ke APHß

A. Pemeriksaan Investigatif 991,4 Miliar	B. Penghitungan Kerugian Negara Rp 11,77 Triliun
---	---

Jumlah Kasus yang diserahkan ke APH

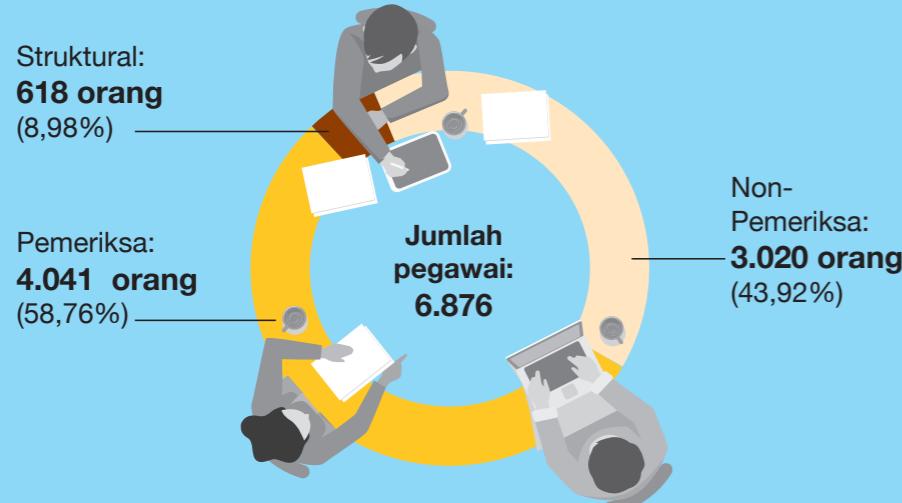
 A. Pemeriksaan Investigatif 23	 B. Penghitungan Kerugian Negara 350
---	--



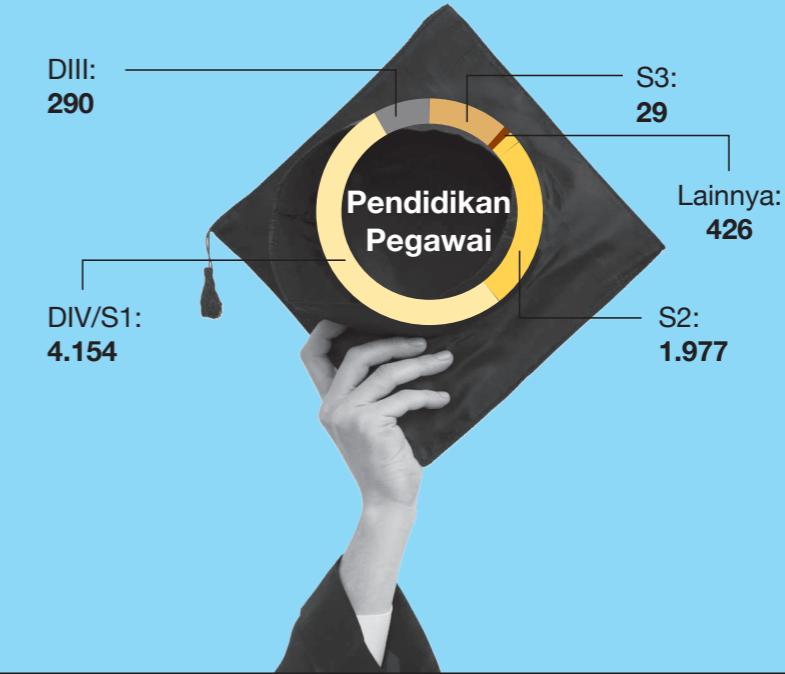
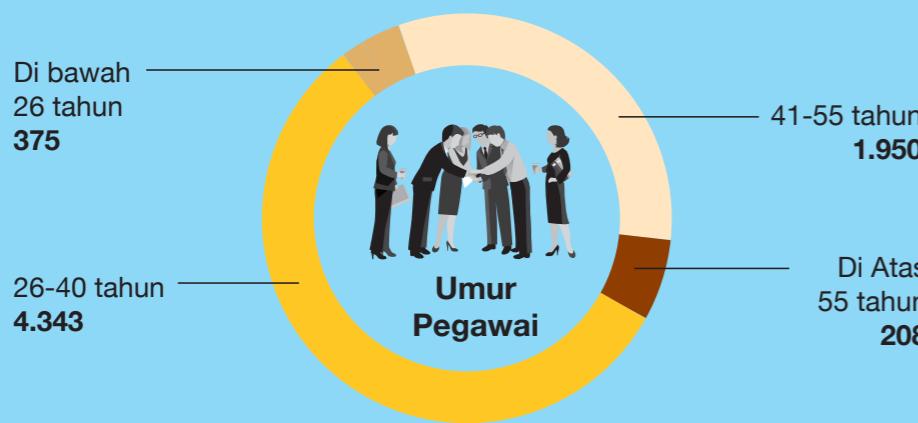
BAB 2 **PENGUATAN ORGANISASI** **DAN CAPAIAN KELEMBAGAAN**

1. Sumber Daya Manusia di BPK

Profil Pegawai BPK 2019

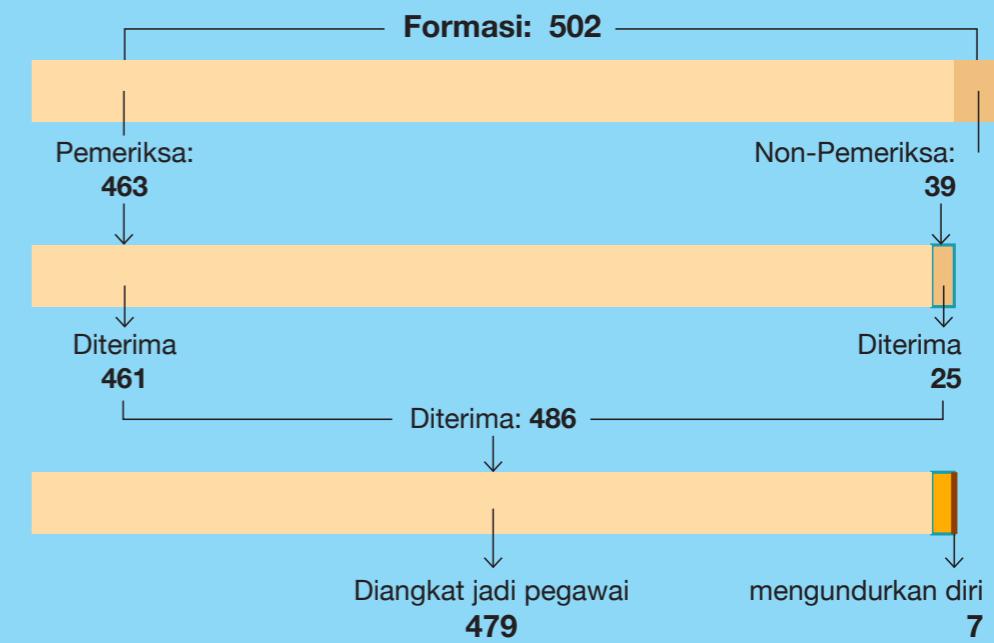


Ketua BPK periode 2017-2019 bersama CPNS BPK 2019.



Perekrutan CPNS 2019

Rekrutmen CPNS tahun 2019 merupakan lanjutan dari proses rekrutmen formasi CPNS tahun 2018.



Hasil Rekrutmen Formasi 2018 yang Dilaksanakan Tahun 2019

Jabatan	Pendidikan	Formasi
Pemeriksa	S-1 Akuntansi	194
Ahli Pertama	S-1 Hukum	50
	S-1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan	45
	S-1 Komunikasi	10
	S-1 Manajemen	50
	S-1 Sarjana Sastra	10
	S-1 Teknik Informatika / S-1 Sistem Informatika	48
	S-1 Teknik Lingkungan	10
	S-1 Teknik Sipil	46
Assessor Sdm Aparatur Ahli Pertama	S-1 Psikologi	5
Juru Informasi dan Komunikasi	D-III Public Relation/ D-III Komunikasi / D-III Jurnalistik	5
Pengelola Kepegawaian	D-III Administrasi Perkantoran/ D-III Manajemen Perkantoran	2
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	D-III Otomotif /D-III Mesin/ D-III Bangunan / D-III Elektro	4
Pengelola Teknologi Informasi	D-III Teknologi Informasi	17
Pranata Kearsipan	D-III Manajemen Sistem Informasi/ D-III Kearsipan	7
JUMLAH		502

Pada 2019, BPK melakukan rekrutmen CPNS, yang proses seleksinya berlangsung sampai tahun 2020.



2. Karier di BPK

Sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, Pemeriksa merupakan posisi penting di BPK. Namun begitu, jabatan di bagian administrasi juga sangat diperlukan untuk mendukung tugas BPK.

Jenis dan Jabatan Pekerjaan di BPK:

1. Pemeriksa/Fungsional

Lingkup kerja: melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Syarat: Sarjana S1 (hampir semua jurusan), D4 STAN

2. Administrasi

Lingkup kerja: menjalankan organisasi kelembagaan, memberikan dukungan pada pemeriksa

Syarat: D3 dan S1 sesuai bidang yang dibutuhkan

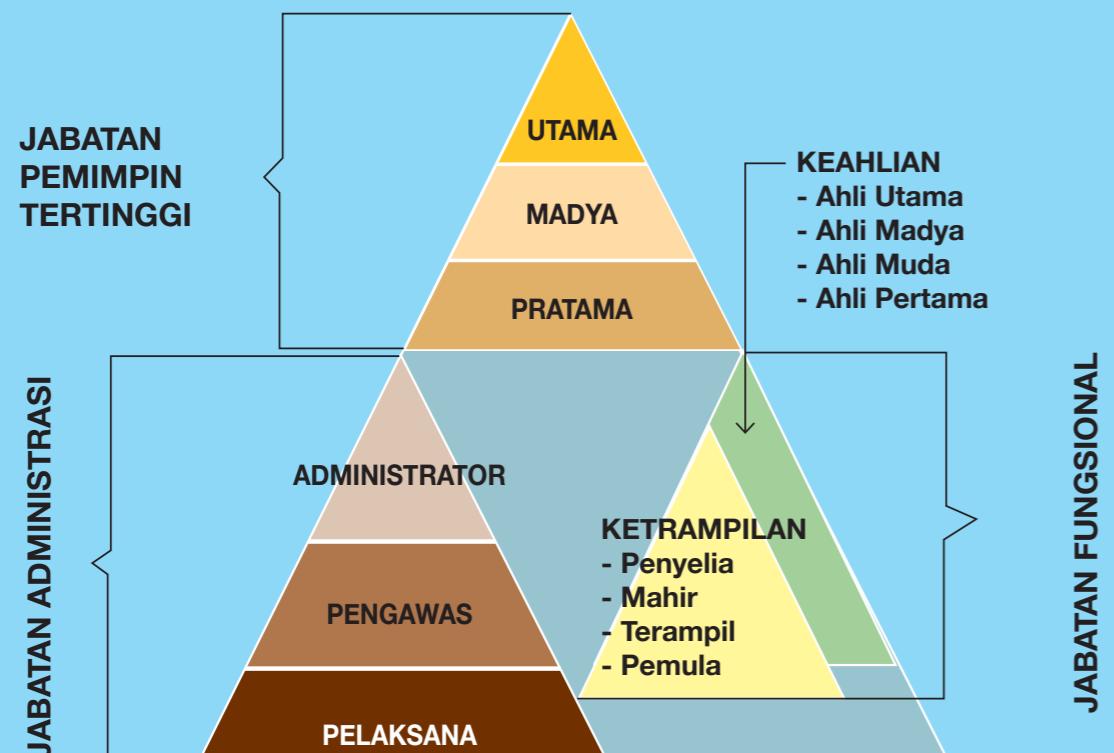
3. Pimpinan

Lingkup kerja: Jabatan administrasi maupun jabatan fungsional dapat dipromosikan ke jabatan pimpinan



Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahtiar Arif melantik sejumlah pejabat struktural di lingkungan BPK Pusat dan BPK Perwakilan, pada Selasa (16/7), di Jakarta. Pelantikan 24 pejabat tersebut terdiri atas 17 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan 7 orang pejabat Administrator (Eselon III).

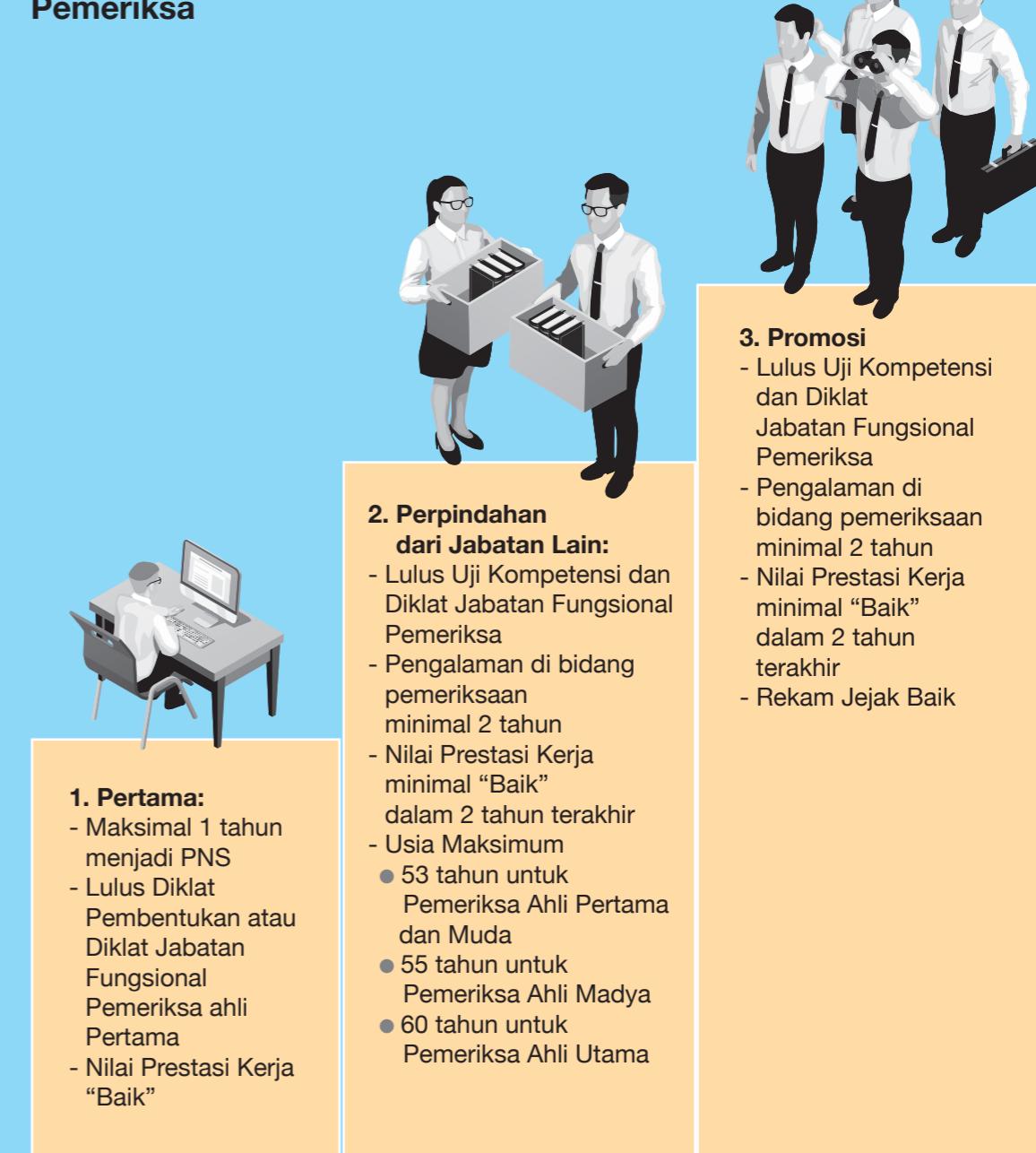
Jenjang Jabatan di BPK



Cara Berkariere Menjadi Pemeriksa BPK



Jalur Menjadi Pemeriksa





3. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia

Mulai Tahun 2012, Biro SDM BPK mulai mengembangkan Aplikasi berbasis *Web*, yang memuat *Single database*, rekam/update data berdasarkan dokumen, dan integrasi dengan presensi, peningkatan keamanan data pegawai dan akses terbuka, yang bisa dilakukan dari mana saja.

Sistem informasi ini sangat memudahkan pegawai dalam mendapatkan pelayanan terkait SDM seperti Cuti dan presensi, DUPAK Otomatis, KP4, dan Medis.

Menjawab peningkatan kebutuhan pegawai, pada Tahun 2017 mulai dikembangkan SISDM Versi 2.0. Pada tahun 2018 SISDM Versi 2.0 dirilis. Terdapat 11 modul baru yang telah dikembangkan dan siap digunakan, yaitu :

1. Modul Mutasi
2. Modul Hukuman Disiplin
3. Modul Assesment
4. Modul KP4
5. Modul Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
6. Modul Rekam Medis
7. Modul Penilaian Angka Kredit(PAK)
8. Modul Arsip Digital
9. Modul Tunjangan Kinerja
10. Modul Tugas Belajar
11. Modul Management Information System (MIS)

Banyak fitur-fitur baru yang ada dalam SISDM Versi 2.0 ini, karena dirancang lebih *mobile friendly*, pegawai bisa dengan mudah membuka SISDM dari *gadget*.

4. Peningkatan Kompetensi Pegawai

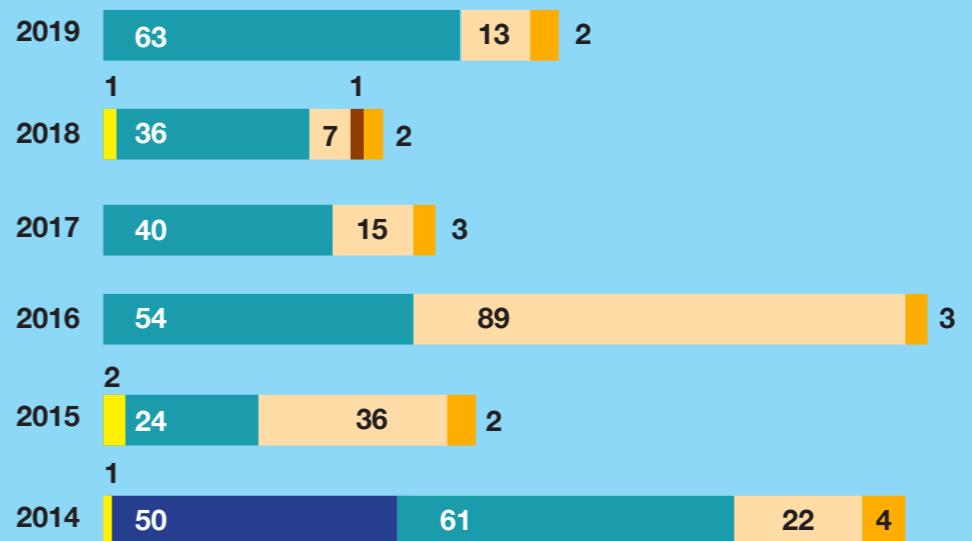
BPK memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dengan memberikan beasiswa, izin belajar, sertifikasi, *secondment*, dan kursus singkat.

Tugas Belajar dan Izin Belajar

352 pegawai memanfaatkan berbagai beasiswa dari sponsor/sumber dana maupun biaya sendiri.

Sponsor/Sumber Dana	DIII		S1		S2		S3	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
Australia Award Scholarship							1	
BPK (kelas khusus MEP UGM)							27	
Kementerian Kominfo							1	
LPDP							4	12
Pusbindiklatren Bappenas							31	
Charles University, Ceko Rep.								1
Chinese Government Scholarship								1
Biaya Sendiri	2		64		206		2	
Jumlah	2		64		269	13	2	2

Jumlah Karyasiswa 2014-2019



■ DIV ■ S1 ■ S2 Dalam Negeri ■ S2 Luar Negeri ■ S3 Dalam Negeri ■ S3 Luar Negeri

Sertifikasi

Selama tahun 2019, BPK membiayai perolehan tiga sertifikasi profesi dan membiayai pemeliharaan sertifikasi profesi 144 pegawai.

No. Sertifikasi	Jumlah Peserta	Jumlah Lulus
1. Certified Forensic Auditor (CFrA)	20	20
2. Certified Fraud Examiner (CFE)	21	17
3. Certified Public Accountant (CPA)	2 Anggota, 13 Pejabat Tinggi Pratama	15

Rekapitulasi jumlah pemegang sertifikasi profesi di BPK per 31 Desember 2019:



Program Magang, Secondment dan Attachment

BPK setiap tahun mengirimkan pegawai terbaik untuk menjalani program *secondment/attachment* ke Australia yaitu ke *Australian National Audit Office* (ANAO) di Canberra, maupun ke *Audit Office of New South Wales* (AO NSW) di Sydney.

Secondment

merupakan penugasan dengan menempatkan pegawai di sebuah unit organisasi (biasanya 3 bulan) untuk membangun sinergi antar unit/instansi/lembaga, *transfer of knowledge* dan *enrichment program* sebagai bentuk pengembangan pegawai, mengoptimalkan efektivitas pertukaran data/informasi serta peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai.

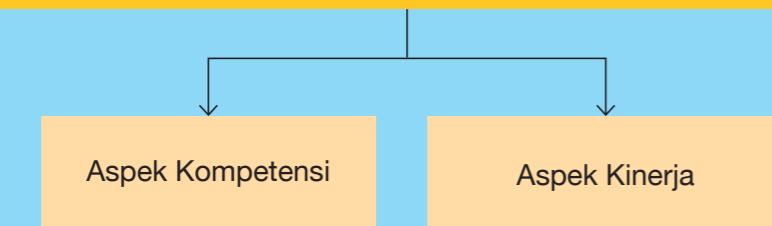
Attachment

adalah penempatan pegawai dalam jangka waktu tertentu (biasanya 2 minggu) di unit organisasi lain untuk pengembangan kompetensi dengan tujuan memperoleh pengalaman praktis dalam bidang pekerjaannya.

No.	Kegiatan	Tanggal	Lokasi
1.	Secondment Pemeriksaan Laporan Keuangan	Tahap Perencanaan: Maret – Mei 2019	Kantor Pusat AO NSW
		Tahap Pelaksanaan: Juli – September 2019	(Audit Office of New South Wales), Sydney, Australia dan entitas pemeriksaan
2.	Attachment to Quality Assurance Review	6 – 18 Mei 2019	
3.	Attachment of Quality Assurance on Financial Audit	25 November – 6 Desember 2019	Kantor ANAO (Australian National Audit on Performance Audit Office) di Canberra, Australia
4.	IT Audit Secondment (piloting)	Januari 2020	

5. Manajemen Talenta

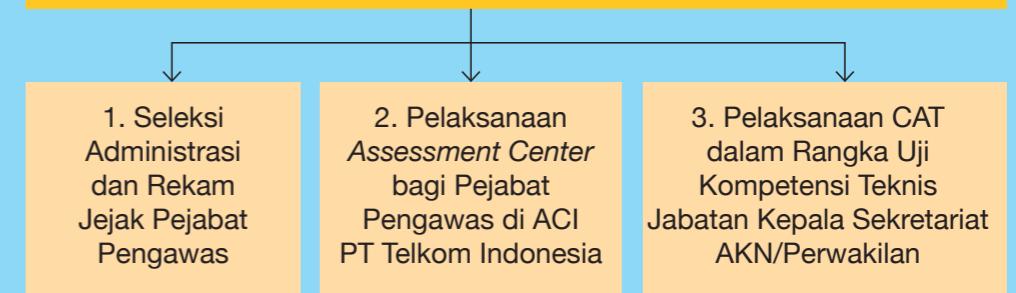
Talent Management adalah suatu proses untuk mengidentifikasi pegawai yang memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin masa depan. Proses identifikasi *talent mapping* tersebut didasarkan pada dua aspek, yaitu:



Kegiatan implementasi Manajemen Talenta:



Piloting Manajemen Talenta
Implementasi Manajemen Talenta dimulai pada Jabatan Administrator dengan target Kepala Sekretariat AKN/Perwakilan berupa:



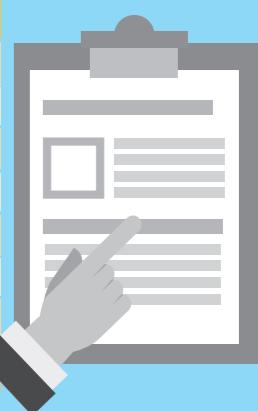
Assessment Center BPK 2019

Assessment Center adalah metode penilaian kompetensi untuk mendapatkan penilaian objektif mengenai keterampilan, pengetahuan, potensi, serta minat dan kepribadian individu, sebagai dasar melaksanakan pengelolaan SDM yang tepat guna.

Jabatan Fungsional Pemeriksa		Jabatan Struktural
✓	SDM	✓
✓	Assessment Center	✓
✓	Rekomendasi	✓
✓	<i>The Right Man at the Right Place at the Right Time</i>	✓

Penilaian Kompetensi 597 Pegawai 2019

No.	Keterangan	Jumlah
1	Anggota Tim Senior (ATS)	149
2	Ketua Tim Senior (KTS)	204
3	Pengendali Teknis (PT)	5
4	Pengendali Mutu (PM)	10
5	Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	50
6	Jabatan Administrasi Pengawas	173
7	PNS Pindah Instansi	6
Jumlah		597

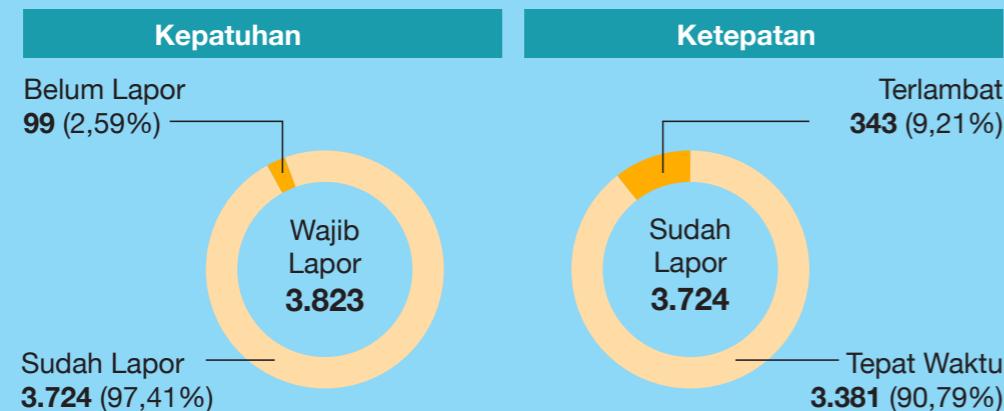


6 Ketaatan Pelaporan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) BPK 2019

Jumlah Pegawai BPK	Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN
3.823	97,41% (3.724)
Wajib Lapor LHKPN	Tepat waktu penyampaian LHKPN
3.823	90,79% (3.381)

Monitoring Kepatuhan Penyelenggara Negara



Jabatan Fungsional BPK

Jabatan Fungsional yang telah diterapkan di BPK meliputi Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP), Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK), Jabatan Fungsional Widyaaiswara (JFW), Jabatan Fungsional Medis Paramedis (JFMP), Jabatan Fungsional Asessor (JFA), dan Jabatan Fungsional Arsiparis (JFAr).

Profil Jabatan Fungsional di BPK Tahun 2019

Jenjang Jabatan	JFP1	JFPK2	JFW3	JFMP	JFA4	JFAr5	Total
Utama	13	-	1	3	-	-	16
Madya	415	-	2	6	-	6	429
Muda	1.930	6	5	-	-	1	1.942
Pertama	1.236	-	8	-	-	1	1.245
Penyelia	-	-	-	2	-	-	2
Pelaksana Lanjutan/Mahir	-	-	-	1	-	1	2
Pelaksana	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah	3.594	6	16	13	-	9	3.638

Keterangan:

1. Jumlah Pejabat Fungsional Pemeriksa aktif.
2. Jumlah Pejabat Fungsional pranata komputer aktif, 11 pejabat fungsional Pranata Komputer sedang dalam pemberhentian sementara.
3. Jumlah Pejabat Fungsional Widyaaiswara aktif, 2 Widyaaiswara berstatus pemberhentian sementara karena tugas belajar dan CLTN.
4. Seluruh Assessor saat ini berstatus diberhentikan sementara karena memperoleh penugasan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di luar JF Assessor.
5. Jumlah Pejabat Fungsional Arsiparis aktif baik di Biro Umum maupun BPK Perwakilan.

Pelaksanaan Crash Program JFP

Crash Program dilaksanakan untuk penyelarasan kompetensi sebagai tindak lanjut perubahan pengelolaan JFP berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 49 Tahun 2018 tentang JFP yang semula karier pemeriksa berdasarkan peran dan jabatan menjadi hanya berdasarkan jabatan. *Crash program* dilaksanakan untuk Para Pemeriksa Ahli Muda dan Ahli Madya yang belum memenuhi kompetensi jabatannya.

Peserta Crash Program JFP Tahun 2019

Jenjang JFP	Usulan PFP Wajib Crash Program			PFP Mengikuti Crash Program		
	Diklat & CAT	CAT	Total	Diklat & CAT	CAT	Total
Ahli Madya	130	133	263	128	132	260
Ahli Muda	643	408	1.051	618	408	1.026
Jumlah	773	541	1.314	746	540	1.286

Hasil CAT menunjukkan rentang nilai yang cukup lebar, yaitu sebesar 35-90 pada Pemeriksa Ahli Madya dan 23-92 pada Pemeriksa Ahli Muda. Nilai rata-rata CAT untuk Pemeriksa Ahli Madya adalah 64,80 dan untuk Pemeriksa Ahli Muda adalah 64,48.

7. Pembentukan Institut Pemeriksa Keuangan Negara

BPK berencana membentuk organisasi profesi pemeriksa keuangan negara dengan nama Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) pada 2020.

IPKN adalah organisasi profesi bagi para pemeriksa keuangan negara yang bertujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa bagi kepentingan bangsa dan negara.

Sebelumnya pada 1996-1997 pernah terbentuk Ikatan Auditor Indonesia (IAul) yang digagas Adna Bokim, waktu itu Widya Iswara di BPK, untuk mewadahi auditor di BPK maupun di luar, seperti di Inspektorat.

Anggota V BPK Bahrullah Akbar saat menjadi Wakil Ketua BPK berupaya mendorong terbentuknya organisasi profesi baru yang tetap membawa semangat baru, yaitu mewadahi pemeriksa keuangan negara, baik di dalam BPK maupun lembaga lainnya.



Landasan Hukum

PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Permenpan RB 49/2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa. BPK ditetapkan sebagai instansi pembina JFP dan ditugaskan untuk membentuk organisasi profesi JFP berdasarkan Permenpan ini.



“BPK sebagai instansi pembina jabatan fungsional pemeriksa wajib memfasilitas pembentukan organisasi profesi jabatan pemeriksa.”

Tujuan

Sertifikasi Profesi CSFA



BPK menggagas sertifikasi profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) untuk pemeriksa keuangan negara.

Landasan hukum Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN):

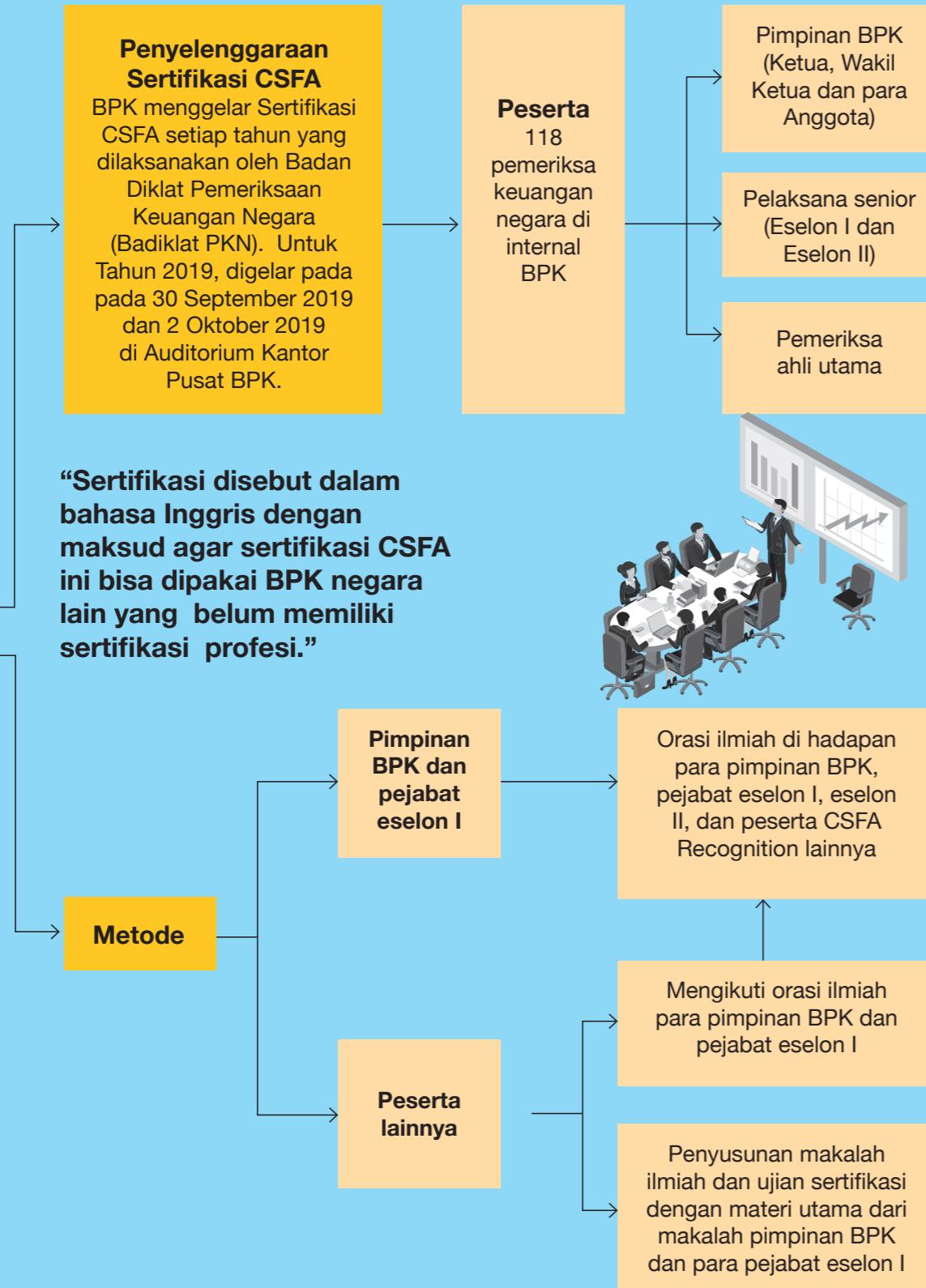
Menjadi syarat bagi pemeriksa untuk bisa menandatangani hasil pemeriksaan dalam lingkup keuangan negara

Menjamin hasil pemeriksaan memiliki kualitas yang sama

Mewajibkan pemeriksa memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk menjalankan tugas pemeriksaan

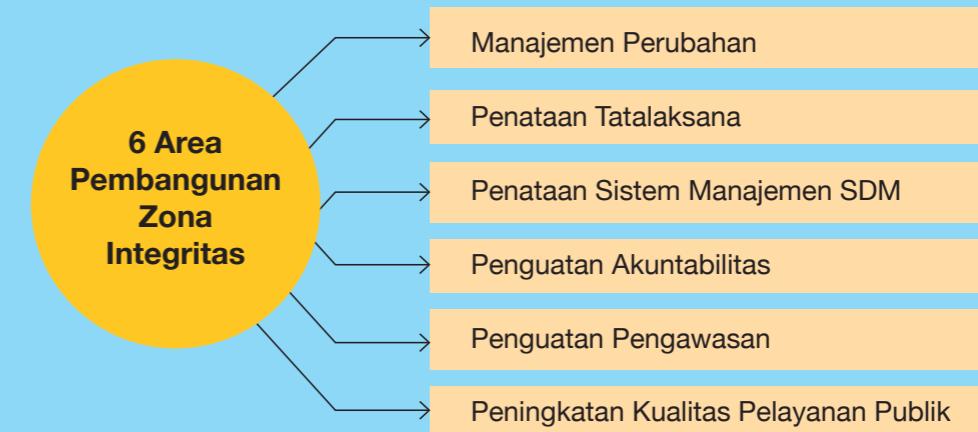
Mewajibkan BPK menjamin pemeriksanya memiliki kompetensi teknis yang memadai dan melalui proses pendidikan berkelanjutan

Kompetensi pemeriksa dibuktikan melalui sertifikasi profesi



8. Capaian Pembangunan Zona Integritas

BPK mencanangkan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPK sejak 30 September 2013, sebagai bagian Program Reformasi Birokrasi. Program Zona Integritas yang merupakan “miniatur” Program Reformasi Birokrasi itu dilaksanakan pada level satuan kerja Eselon I dan Eselon II sejak 2014.



47 Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas

1 Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

15 Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

1	Pusdiklat BPK RI	WBK (2015) WBBM (2016)
2	Perwakilan Prov.1 Jawa Timur	WBK (2015)
3	Perwakilan Prov. Banten	WBK (2016)
4	Perwakilan Prov. D.I .Yogyakarta	WBK (2016)
5	Perwakilan Prov. Kalimantan Selatan	WBK (2016)
6	Perwakilan Prov. Aceh	WBK (2017)
7	Perwakilan Prov. Riau	WBK (2017)
8	Perwakilan Prov. Jawa Tengah	WBK (2017)
9	Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan	WBK (2017)
10	Perwakilan Prov. Sumatera Barat	WBK (2018)
11	Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara	WBK (2018)
12	Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah	WBK (2018)
13	Perwakilan Prov. Jawa Barat	WBK (2019)
14	Perwakilan Prov. Jambi	WBK (2019)
15	Auditorat Utama Investigasi (AUI)	WBK (2019)

Daftar Satker Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan BPK



9. SAI Performance Measurement Framework (SAI PMF)

SAI PMF atau Kerangka Pengukuran Kinerja Lembaga Pemeriksa adalah metodologi pengukuran yang digunakan untuk menilai kapasitas internal lembaga pemeriksa (SAI) dalam memberikan manfaat dan nilai serta membuat perubahan pada kehidupan masyarakat, secara holistik berdasarkan bukti dukung (evidence based)



Keputusan Ketua BPK untuk mengikuti *Self Assessment SAI PMF IDI Facilitating Program*.

Tujuan:

1. Mengevaluasi secara holistik kapasitas SAI berdasarkan INTOSAI dan international best practise
2. Membantu mengidentifikasi nilai dan manfaat SAI bagi masyarakat dan pemangku kepentingan
3. Melakukan penilaian berbasis bukti atas kekuatan, kelemahan dan kebutuhan pengembangan kapasitas
4. Memfasilitasi pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan kapasitas SAI.

Manfaat

1. Sebagai langkah dalam penerapan INTOSAI Principles on the Value and Benefits of SAIs
2. Menampilkan peran BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat melalui good governance, tata kelola organisasi yang transparan dan berakuntabilitas
3. Meningkatkan proses pengukuran kapasitas internal organisasi
4. Sebagai baseline dalam upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas organisasi BPK

Pelaksana SAI PMF

Seluruh jajaran BPK

Kapan diterapkan

Komitmen BPK menggunakan SAI PMF sebagai alat ukur kinerja ditegaskan melalui surat pernyataan komitmen kepada IDI (INTOSAI Development Initiative) pada Januari 2019 tentang keikutsertaan pada SAI PMF Facilitation Program.

Bagaimana menerapkannya

1. Menjaga Independensi SAI
2. Melaksanakan audit untuk memastikan pemerintah dan entitas sektor publik bertanggung jawab atas penggunaan daya publik
3. Mengaktifkan pihak bertanggung jawab atas tata kelola sektor publik menanggapi temuan dan rekomendasi audit dan mengambil tindakan yang tepat
4. Pelaporan hasil audit sehingga memungkinkan publik meminta pertanggungjawaban pemerintah dan sektor publik
5. Responsif terhadap lingkungan yang berubah dan risiko yang muncul
6. Berkommunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan
7. Menjadi sumber wawasan dan bimbingan independen dan obyektif yang kredibel untuk mendukung perubahan yang menguntungkan sektor publik
8. Memastikan transparansi dan akuntabilitas SAI yang sesuai
9. Memastikan tata kelola SAI yang baik
10. Mematuhi kode etik SAI
11. Layanan yang unggul dan berkualitas
12. Peningkatan kapasitas dengan mempromosikan pembelajaran dan berbagi pengetahuan



Training of assessor di Abu Dhabi.

1. Review workshop di Dhaka
2. Qualitative assessment
3. Integrated analysis
4. Penyusunan Foreword, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, [Chapter 4], dan Chapter 5
5. Quality control level lembaga (forum eselon I dan FGD dengan seluruh satker terkait)
6. FGD validasi pengungkapan bersama tim humas



Penyusunan TOR, assessment team dan perencanaan field work.



Pelaksanaan field work (collect evidence, score indicators and country context)

10. Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006



KEGIATAN MKKE BPK 2019

10 Juli
Workshop Implementasi Penegakan Kode Etik pasca terbitnya Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 di Auditorium lantai 2 Gedung Tower BPK Pusat

1. Pencegahan Pelanggaran Kode Etik

10 September
Workshop Implementasi Penegakan Kode Etik pasca terbitnya Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 di Hotel Santika Premiere Jakarta

20 September
Workshop Implementasi Penegakan Kode Etik BPK di Kantor Perwakilan Provinsi Maluku Utara di Ternate

25 September
Workshop Implementasi Penegakan Kode Etik BPK di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Manado

Susunan Keanggotaan MKKE 2019

Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., C.A.

Ketua merangkap Anggota dari unsur BPK

29 April 2017 - 28 Oktober 2019



Dari kiri: Jusuf Halim, Rusmin, Agus Joko P., Isma Yatun, Indriyanto S. Adjie.

Ir. Isma Yatun, M.T.

Anggota dari unsur BPK

29 April 2017 - 28 Oktober 2019

Dr. Jusuf Halim, S.E., Ak., M.H., C.A.

Anggota dari unsur profesi

4 Oktober 2017 - 18 April 2020

Prof. Rusmin, M.B.A., Ph.D.

Anggota dari unsur akademisi

10 April 2019 - 9 Oktober 2021

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Anggota dari unsur akademisi

10 April 2019 - 9 Oktober 2021



Pada 29 Oktober 2019 ada perubahan susunan keanggotaan MKKE, Dr. Achsanul Qosasi jadi Ketua MKKE, dan Dr. Hendra Susanto, ST menjadi anggota MKKE.



Pelantikan Dr. Achsanul Qosasi dan Dr. Hendra Susanto, ST menjadi anggota MKKE periode 29 Oktober 2019-29 April 2022 di Kantor Pusat BPK, pada Rabu (8/1/2020).

Penanganan Laporan Gratifikasi dan Pengaduan 2019



19 laporan/pengaduan atas dugaan pelanggaran yang terindikasi pelanggaran disiplin PNS maupun kode etik BPK yang telah dan sedang dalam proses oleh Itama

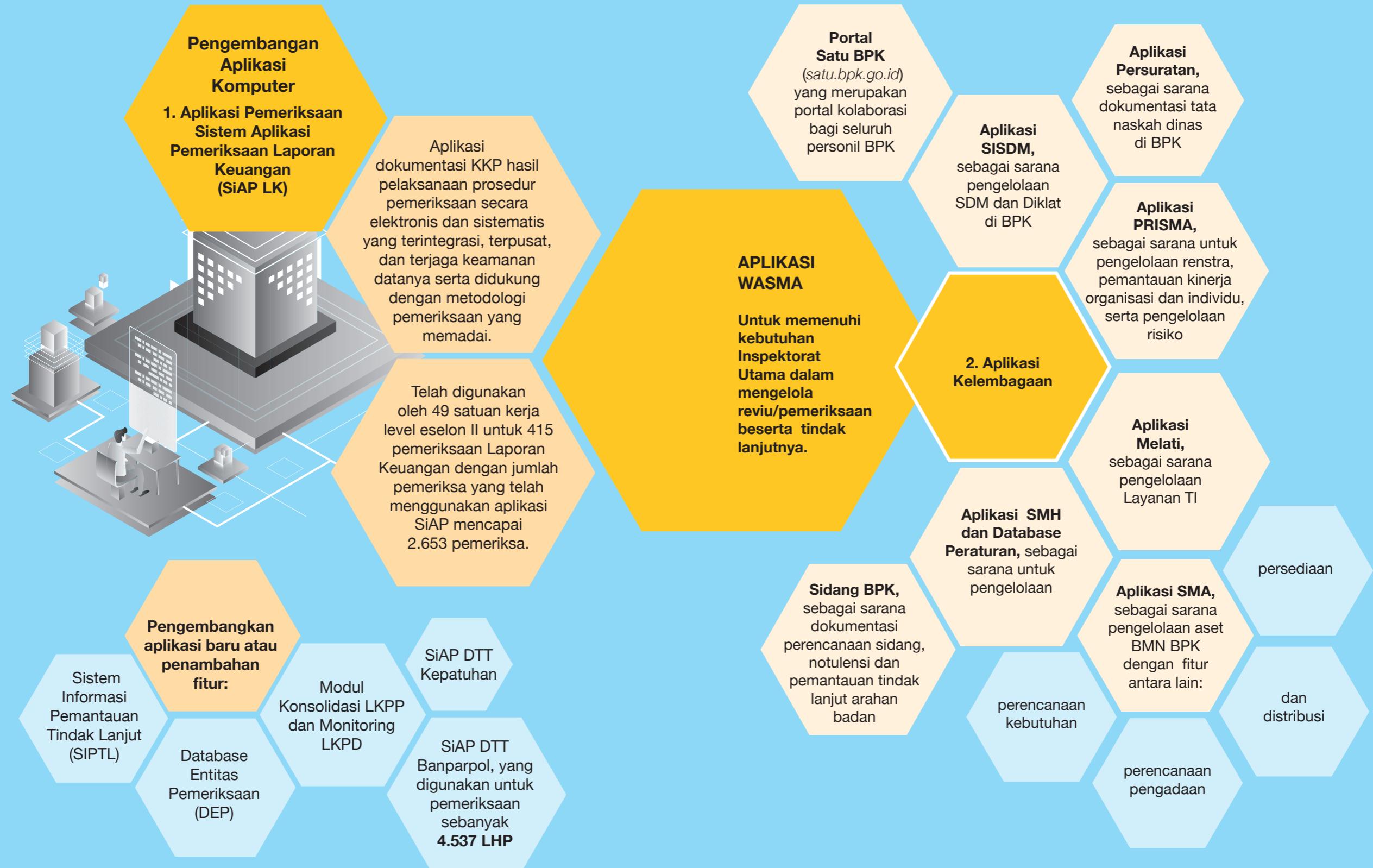
Laporan Gratifikasi

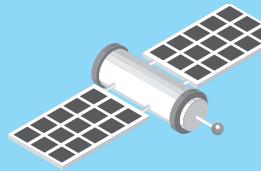
Pada Tahun 2019 terdapat 18 pelaporan penerimaan gratifikasi yang terdiri dari 7 berupa uang dan 11 berupa barang, seluruhnya merupakan gratifikasi yang terkait kedinasan. Semua pelaporan telah ditelaah dengan simpulan gratifikasi berupa uang dapat dimanfaatkan oleh penerima karena telah sesuai ketentuan yang berlaku (ketentuan tentang honor narasumber), sedangkan barang dimanfaatkan sebagai display/peraga di kantor BPK.



Pengaduan







Dukungan Sarana dan Prasarana TI

Teknologi Informasi BPK di Dunia Internasional

Sarana dan Prasarana Pusat

Standarisasi perangkat, meliputi penyelarasan akses *point* di seluruh Gedung Kantor Pusat termasuk segmentasi IP wireless akses *point*. Peningkatan layanan melalui perbaikan konfigurasi dan arsitektur seperti:

Rekonfigurasi jaringan utama/core switch untuk optimisasi konfigurasi dan perangkat jaringan dengan tujuan mengurangi beban kerja dan menghilangkan efek "Bottle Neck" pada jaringan.



Rekonfigurasi pola *routing* menggunakan konfigurasi dinamis untuk pencarian jalur komunikasi alternatif secara otomatis saat ada masalah koneksi.



Sarana dan Prasarana Kantor Perwakilan, Badiklat, Balai Diklat, dan Museum



Peningkatan kapasitas jaringan interkoneksi di setiap perwakilan yang menggunakan koneksi WAN VPN IP dengan *bandwidth* 2 mbps dan *internet* 10 Mbps menjadi teknologi SDWAN.



Peremajaan jaringan LAN (pembaruan perangkat akses *point*) di kantor Perwakilan BPK Provinsi Lampung dan Bengkulu.



Dukungan Pemeriksaan TI

Dukungan Biro TI dalam memeriksa keandalan dan keamanan teknologi informasi entitas pemerintah yang relevan pada saat BPK melakukan pemeriksaan Keuangan/Kinerja/DTT



Dukungan pemeriksaan teknologi informasi tahun 2019 sebanyak 13 pemeriksaan, yakni:

- LKPP
- LK Kementerian Pertahanan
- LK Kementerian Sosial
- LK BPKP
- LK Kementerian Hukum dan HAM
- LK Kejaksaan Agung
- PDTT Subsidi Pupuk di PT Pupuk Indonesia
- PDTT Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia
- PDTT atas Pengelolaan Bisnis Penunjang pada PT Pegadaian
- Kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan pada Kemendagri
- Kinerja Pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT-PPFM OTM) dalam Penyaluran Bansos Tahun 2018 s.d. Semester I 2019 pada Kemensos dan instansi terkait lainnya
- PDTT Kemenkumham
- LK dan Kinerja IAEA

Kegiatan dengan Pihak Eksternal BPK

Kerjasama dengan Perkumpulan Information System Audit and Control Association (ISACA) Indonesia Chapter

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BPK oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Hasil Evaluasi SPBE BPK



Predikat: **Sangat Baik**
Skor: **3,81**
+ naik dari 3,51 pada tahun sebelumnya

Teknologi Informasi BPK di Dunia Internasional

Research For Auditing Technology Innovation - WGBD

BPK menjadi *project leader* untuk proyek yang beranggotakan Austria, Norwegia, Denmark, Inggris, Brazil, Rusia, Ekuador.

Mulai 2018, proyek ini masih berjalan sampai saat ini.

Kegiatan BPK dalam INTOSAI untuk *Working Group on IT Audit (WGITA)* dan *Working Group on Big Data (WGBD)*.

Data Analytics (area IT Audit Techniques) - WGITA

BPK menjadi *project leader* untuk proyek penyusunan *Data Analytics Guidelines* -INTOSAI. Proyek ini beranggotakan Bangladesh, Brazil, Ekuador, Georgia, India, Iran, Irak, Jepang, Malaysia, Pakistan, Afrika Selatan, Amerika. Diselesaikan tahun 2019, proyek ini menghasilkan *guidelines* tentang *Data Analytics* yang dapat dijadikan acuan bagi anggota INTOSAI.

Anggota V BPK (saat menjabat sebagai Wakil Ketua BPK), Bahrullah Akbar memaparkan pengalaman BPK memanfaatkan Teknologi Informasi dalam melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di pertemuan Tahunan ke-28 INTOSAI *Working Group on IT Audit (WGITA)* di Nadi, Fiji pada 2- 3 April 2019

Pimpinan pemeriksaan keuangan negara Anggota V BPK.



12. Dukungan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK diselenggarakan oleh Biro Umum, yang bertugas merumuskan, merencanakan dan menyiapkan semua keperluan pelaksanaan tugas BPK.

Sepanjang 2019, BPK melakukan banyak pembaruan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kinerja karyawan. Di antara yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan adalah:

Pembangunan gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan mes pegawai di Kota Tarakan.

Dukungan untuk Keluarga dan Karyawan seperti Fasilitas Tempat Penitipan Anak dan kantin modern.

Ruang kerja berdasarkan desain *coworking space* yang menjadi tuntutan perkantoran modern.

Sistem keamanan di Kantor Pusat dan Perwakilan BPK.

Gerakan *Go Green* dalam bentuk penggunaan lampu LED yang lebih hemat energi, pengurangan penggunaan botol plastik sekali pakai, penerapan e-paper untuk Laporan IHPS.

Sarana/Prasarana



Sistem keamanan di Kantor Pusat dan Perwakilan BPK



X-tray

Pengadaan X-tray di pintu masuk lobi Gedung Tower



Face.id

- Untuk mendeteksi wajah pegawai atau tamu yang dipasangkan pada *flap barrier*, sehingga *flap barrier* tidak dapat terbuka jika tamu belum teregistrasi
- Ditempatkan di Lobby Gedung Tower, Umar Wirahadikusumah, Arsip, Menara Tujuh, dan Pintu masuk Masjid di Lantai 2 gedung Umar Wirahadikusumah

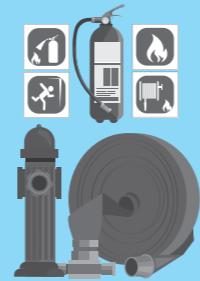


CCTV

Penambahan kamera CCTV di Lantai 14, 16 dan 20 gedung tower, area halaman/parkiran, Tempat Penitipan Anak.

Sistem Pemadam Kebakaran Gedung

- Peremajaan dan pengaktifan kembali sistem pemadam kebakaran gedung pada Gedung Umar Wirahadikusumah, Gedung Arsip dan Gedung Menara tujuh
- Pembuatan dan pelatihan *hydrant* BPK perwakilan provinsi Kalimantan Timur dan Jambi yang sebelumnya belum memiliki *hydrant*.



Digital Forensik

- Pengadaan perangkat *digital forensic* yang digunakan oleh Auditorat Utama Investigasi berupa 217 Notebook SiAP-LK
- *Personal Computer* dan *notebook* berspesifikasi khusus yang digunakan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara II



Co Working Space



Ruang kerja Tortama KN III di lantai 4 gedung Umar Wirahadikusumah dan ruang kerja Biro Teknologi Informasi (TI) di lantai 2 gedung Menara Tujuh.

Desain *co working office space* mengusung konsep *open space* sehingga ruang kerja terkesan lebih luas dan nyaman.

Mengusung konsep kepemilikan meja/kursi secara bersama.

Tujuan agar pegawai lebih semangat dan berkolaborasi dengan pegawai lain sehingga terjalin sebuah ikatan kerja yang lebih dinamis.



Tempat Penitipan Anak dan Kantin Modern

- Renovasi Tempat Penitipan Anak (TPA) pada kantor BPK RI Pusat
- Kantin ditata seperti pujasera, pembayaran menggunakan *Go Pay* dan *OVO*
- Renovasi Tempat Penitipan Anak (TPA) dan *Employee Care Center* (ECC) di kantor BPK RI Perwakilan provinsi Sulawesi Selatan, Makassar
- Renovasi *Employee Care Center* Yogyakarta
- Ditujukan untuk menciptakan rasa aman dan percaya karena putra/ putri dari pegawai BPK bisa diasuh oleh tenaga profesional di sekitar lingkungan kerja pegawai.

Pembangunan di Kantor Perwakilan



Gedung kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan mes pegawai di Kota Tarakan.



Teknologi Informasi untuk Pemeliharaan

Biro umum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk melakukan berbagai pekerjaan di antaranya:



Aplikasi Sistem Manajemen Aset (SMA)

Pelaksanaan kegiatan laporan harian pada aplikasi portal Biro Umum untuk monitoring dan evaluasi pekerjaan baik secara individu maupun kerjasama tim, sehingga pekerjaan dapat dengan mudah dipantau dan diselesaikan tepat pada waktunya.



Penggunaan Database Kendaraan Operasional

Penggunaan database kendaraan untuk memudahkan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dan barang inventaris.



BAB 3 CAPAIAN KELEMBAGAAN

1. Pencapaian Internasional Pada 2019

Badan Energi Atom Internasional

Melanjutkan tugas sebagai *External Auditor* tahun buku 2018-2019



Dalam sidang umum ke-61 IAEA (International Atomic Energy Agency) di Wina, Austria tanggal 21 September 2017, BPK terpilih sebagai *external auditor* untuk tahun buku 2018 dan 2019.



Tim *external auditor* IAEA, di Wina, Austria.

BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan kinerja IAEA tahun buku 2018 dalam IAEA Programme and Budget Committee Meeting, 8 Mei 2019.



Ketua BPK periode 2017-2019 dan sekjen BPK di rapat IAEA, di Wina.

Sebagai *external auditor* IAEA untuk tahun buku 2018-2019, Auditor BPK telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan IAEA tahun buku 2018 pada Oktober –November 2018.



UN Panel of External Auditor

Menjadi Anggota UN Panel of External Auditor



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Harry Azhar Azis dan Sekjen BPK, Bahtiar Arif pada sidang tahunan UN Panel of External Auditors ke 60, di Bonn, Jerman.

Sebagai *External Auditor* IAEA, BPK menjadi anggota *UN Panel of External Auditor*.

Panel *External Auditor* PBB merupakan forum bagi lembaga pemeriksa yang menjadi *External Auditor* badan-badan dalam komunitas PBB.

Panel bertugas memberikan masukan kepada Sekjen PBB dalam memperbaiki tata kelola keuangan dalam komunitas PBB.

Pada Tanggal 2-3 Desember 2019, Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis, menghadiri sidang tahunan UN Panel of External Auditors ke 60 di Bonn, Jerman. BPK dalam kesempatan ini menyampaikan komitmennya untuk mendukung semua rekomendasi yang disampaikan Panel kepada Sekretariat Jenderal PBB untuk tata kelola badan-badan PBB.



Thomas Gatot Hendarto bersama *joint audit team* dari SAI Russia dan Thailand.

IACA

Melanjutkan tugas sebagai *External Auditor* IACA



Auditor BPK Thomas Gatot terpilih sebagai anggota *joint external auditor* International Anti-Corruption Academy (IACA) untuk laporan keuangan 2018-2020, bersama auditor dari SAI Thailand dan Russia.

Pada 2019, pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan pada 26-28 Maret 2019.

IMO

Penunjukkan sebagai *External Auditor* International Maritime Organization



Pada 2019 BPK mencalonkan diri sebagai *external auditor* laporan keuangan IMO, yang membawahi World Maritime University (WMU), International Maritime Law Institute (IMLI). BPK bersaing dengan Corte de Conti (SAI Italia) dan National Audit Office (SAI Inggris).

Pada pemilihan 29 November 2019, BPK mengalahkan Italia dan Inggris:

Pemilihan putaran pertama, BPK mengantongi suara 64, Italia 24, dan Inggris 45.

Pemilihan putaran kedua, BPK menang atas Inggris dengan perolehan suara 75, Inggris mendapat 64 suara.



Wakil Ketua dalam penggalangan dukungan di kantor IMO, London.



Wakil Ketua memberikan sambutan dalam *diplomatic reception* penggalangan dukungan untuk menjadi *external auditor* laporan keuangan IMO.



“Menteri Perhubungan, Ketua BPK, dan Menteri Luar Negeri seusai konferensi pers keberhasilan BPK menjadi auditor eksternal IMO di Kantor Pusat BPK RI, Sabtu 30 November 2019”

INTOSAI WGEA

Menyelesaikan tugas sebagai Ketua dan Sekretariat INTOSAI WGEA



Tahun 2019 merupakan tahun terakhir BPK sebagai Ketua dan Sekretariat INTOSAI WGEA periode 2017 – 2019.

BPK berhasil menyelesaikan semua project WGEA dan telah di-endorse di XXIII INCOSAI di Moskow, Rusia, pada September 2019.



Wakil Ketua BPK saat masih menjabat sebagai Anggota II BPK Agus Joko Pramono mempresentasikan pengalaman BPK pada Information and Tecnology for Development of Public Administration di XXIII INCOSAI di Moskow, Rusia.

ASEANSAI

Longer term Secretariat ASEANSAI periode 2018 – 2023



Dalam ASEANSAI Summit ke-4 di Vientiane, Laos, pada November 2017, BPK secara konsensus terpilih menjadi *longer term Secretariat ASEANSAI* untuk 6 tahun ke depan.

Tugas BPK adalah menjadi penggerak kegiatan ASEANSAI dan bertanggung jawab atas kegiatan kesekretariatan dan administrasi ASEANSAI.



ASOSAI

Menjalankan peran strategis sebagai anggota ASOSAI Governing Board periode 2018 – 2021



Suasana voting Asosai Governing Board.

Pada tahun 2019 BPK melanjutkan peran untuk menentukan arah strategis ASOSAI ke depan, dengan memberikan saran dan masukan dalam implementasi program-program ASOSAI

General Auditing Bureau of Saudi Arabia

Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Pemeriksaan Sektor Publik



Pada tahun 2019 BPK menandatangani MoU kerja sama bilateral baru dengan General Auditing Bureau of Saudi Arabia (GAB Arab Saudi).

Kerja sama dimaksudkan untuk memberikan, memperkuat, mendorong dan mengembangkan kerangka kerja sama dan interaksi yang efisien antara kedua institusi di bidang pemeriksaan sektor publik dalam kerangka kerja INTOSAI, ASOSAI dan organisasi regional lainnya

Kerja sama meliputi bidang peningkatan SDM melalui program pelatihan bagi pemeriksa, penyelenggaraan seminar bilateral, dan pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan.



Presiden General Auditing Bureau of the Kingdom of Saudi Arabia Hussam Alangari dan Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam penandatanganan MoU terkait peningkatan kapasitas pemeriksaan sektor publik di Kantor BPK, Jakarta, pada (5/12/2019)

22 Januari 2019

BPK bekerja sama dengan Australian National Audit Office (ANAO) menyelenggarakan workshop pemeriksaan kinerja untuk mendiskusikan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh dari pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK pada semester II tahun 2018.

1 Mei 2019

BPK dan Australian National Audit Office (ANAO) menyelenggarakan Senior Management Dialogue (SMD) dalam rangka implementasi kerja sama bilateral antara kedua institusi pada tanggal 30 April - 1 Mei 2019 di kantor ANAO, Canberra, Australia. Topik yang dibahas adalah peran manajer senior dalam pemeriksaan kinerja, long form audit reporting, risk management dan indikasi kecurangan dalam pemeriksaan.



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK dan ANAO.

8 Oktober 2019

BPK menyelenggarakan Senior Management Dialogue (SMD) dengan Australian National Audit Office (ANAO) dalam rangka memperkuat kapasitas pemeriksaan kinerja pada 8-9 Oktober 2019 di Jakarta untuk membahas beberapa isu pemeriksaan terkini di kedua institusi, seperti partnership procurement and ensuring value for money, penjaminan mutu pada pemeriksaan kinerja serta pemeriksaan kepatuhan.

The 6th Annual International Training on Forestry Audit

Menyelenggarakan *the 6th Annual International Training on Forestry Audit*

BPK sebagai Ketua WGEA dan penyusun *audit guidance on forestry audit* menyelenggarakan dan memberikan *training forestry audit* kepada anggota INTOSAI pada bulan September 2019.

Training ke-6 ini mengusung tema *SDG's in assessing social benefits of forest for society.*

Pembicara konferensi internasional

- Pengalaman BPK mengaudit SDGs yang telah diakui dunia internasional.

- Pembicara dalam *Asia Pasific Forum for Sustainable Development Forum* yang diselenggarakan oleh UN ESCAP di Bangkok, 28 Maret 2019.



Suasana Forum.



Suasana Forum.

- Memberikan sambutan dalam *High Level Political Forum on Sustainable Development Goals* (HLPF on SDGs) pada 15-16 Juli 2019 terkait tahapan audit SDGs yang disepakati dalam rencana strategis INTOSAI di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York.

- Pembicara dalam Gaidar Forum ke-10 di Moskow, Rusia, dengan tema *“Russia and The Worlds: National Development Goals and Global Trend”*. Gaidar Forum merupakan forum diskusi tahunan untuk membahas tantangan utama yang dihadapi dunia saat ini.



Ketua BPK periode 2017-2019, Moermahadi Soerja Djanegara menjadi salah satu pembicara dalam Gaidar Forum di Moskow, Rusia, pada 16 Januari 2019

Training Internasional

Mengirimkan *Resources Person* dan *Trainer* ke berbagai *Training Internasional*

Mengirimkan *trainer* ke berbagai *training* atau seminar internasional selama 2019, antara lain INTOSAI WGEA *International Training on Environmental Audit*, di Jaipur, India, dan *Forestry Training* di Jakarta; IDI ASOSAI *Blended learning Specialist Certification Programme*.

Menjadi *reviewer* di program IDI ASOSAI *auditing SDGs preparedness*.

Satu pegawai BPK menjadi IDI *Short Term Resources Persons* di IDI mulai tahun 2020.

Mengirimkan narasumber *training/workshop* ke beberapa SAI mitra kerjasama bilateral seperti SAO Lao PDR mengenai *Risk Based Audit* dan *Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan*, ke NAA Cambodia mengenai *Audit Guidelines* dan *Training Management*, serta ke SAI Myanmar mengenai Independensi SAI.

Seminar Bilateral/*High Level Meeting*

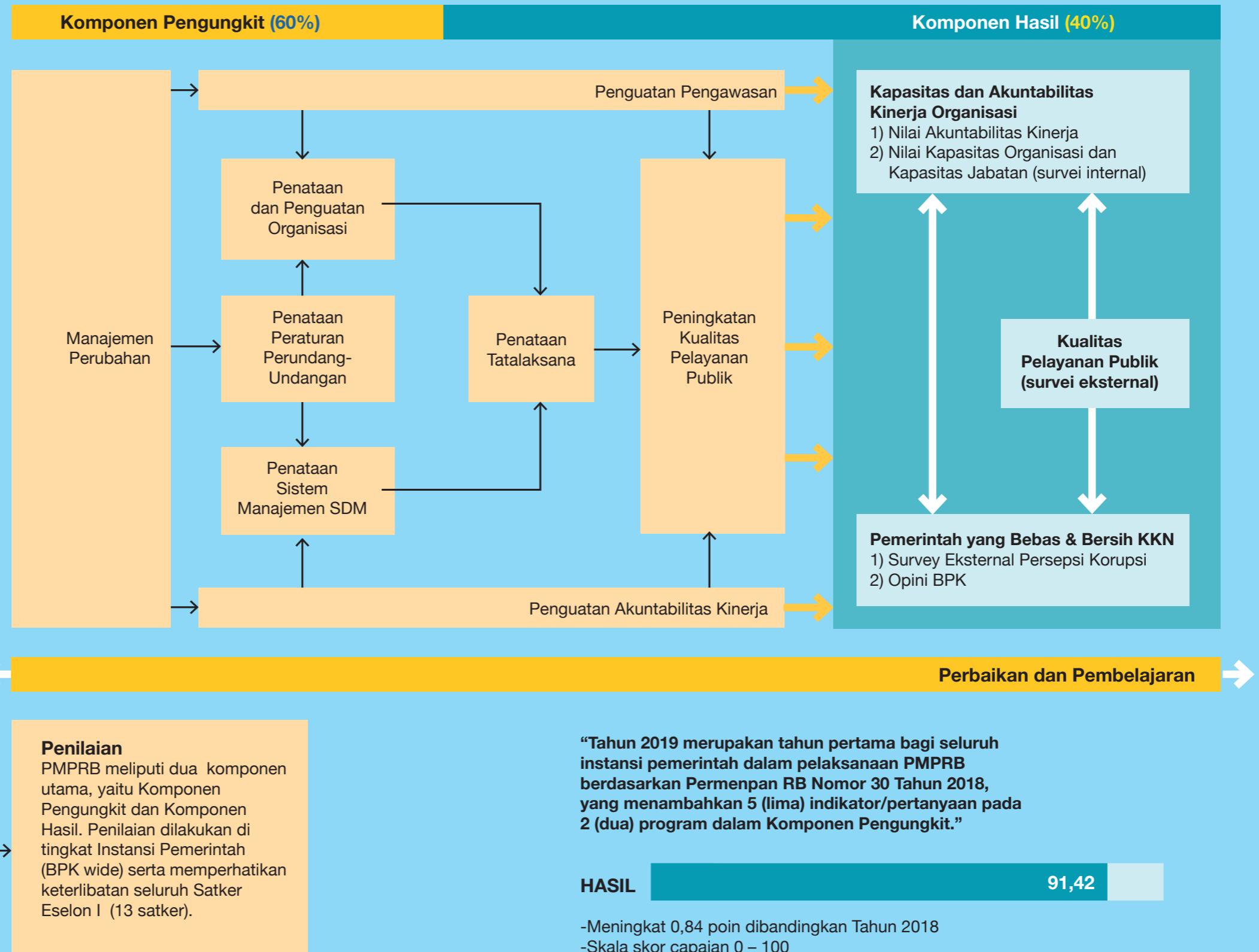
Tuan Rumah seminar *bilateral* dan *high level meeting*

BPK menjadi tuan rumah untuk 11 kegiatan *High Level meeting* dan pertemuan bilateral.

Pertemuan tersebut di antaranya dengan SAI *Counterpart*, diantaranya NIK Polandia, CNAO, ANAO, dan Arab Saudi.

2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Inspektorat Utama (Itama) telah melaksanakan Evaluasi Internal atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui capaian Program Reformasi Birokrasi BPK Tahun 2018 berdasarkan model yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 30 Tahun 2018 untuk disampaikan kepada Kemenpan RB.



Nilai RB

PENILAIAN		Hasil Evaluasi Kemenpan Tahun 2017	Hasil Evaluasi Kemenpan Tahun 2018	Hasil Evaluasi Kemenpan Tahun 2019	Nilai Maksimal
A. KOMPONEN PENGUNGKIT (60)					
I.	Manajemen Perubahan	4,76	4,78	4,80	5,00
II.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	4,38	4,38	4,38	5,00
III.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	6,00	6,00	6,00
IV.	Penataan Tatalaksana	4,75	4,76	4,31	5,00
V.	Penataan Sistem Manajemen SDM	11,93	12,88	12,99	15,00
VI.	Penguatan Akuntabilitas	5,74	5,74	5,76	6,00
VII.	Penguatan Pengawasan	10,19	10,38	10,40	12,00
VIII.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,25	5,24	5,29	6,00
TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT		53,00	54,16	53,91	60,00
B. KOMPONEN HASIL					
I.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	16,25	15,51	15,71	20,00
	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja	11,39	11,40	11,51	14,00
	b. Nilai Kapasitas Organisasi dan Kapasitas Jabatan (survei internal)	4,86	4,11	4,20	6,00
II.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	9,37	9,07	9,53	10,00
	a. Survey Eksternal Persepsi Korupsi	6,37	6,07	6,53	7,00
	b. Opini BPK	3,00	3,00	3,00	3,00
III.	Kualitas Pelayanan Publik (survei eksternal)	8,48	8,40	8,95	10,00
TOTAL KOMPONEN HASIL		34,10	32,98	34,18	40,00
NILAI PMPRB		87,10	87,14	88,12	100,00

Nilai SAKIP

PENILAIAN		Hasil Evaluasi Kemenpan Tahun 2017	Hasil Evaluasi Kemenpan Tahun 2018	Hasil Evaluasi Kemenpan Tahun 2019	Nilai Maksimal
I.	Perencanaan Kinerja	27,06	27,08	27,21	30,00
II.	Pengukuran Kinerja	20,59	20,77	20,98	25,00
III.	Pelaporan Kinerja	13,17	13,14	13,22	15,00
IV.	Evaluasi Internal	8,69	8,82	8,94	10,00
V.	Capaian Kinerja	11,92	12,37	12,79	20,00
NILAI HASIL EVALUASI		81,43	82,18	83,15	100,00
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA		A	A	A	

3. Capaian Bidang Komunikasi dan Layanan Publik



28 Maret 2019

PREDIKAT SANGAT BAIK Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
BPK memperoleh predikat "Sangat Baik" dalam Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Tujuan SPBE untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE mencapai tujuan, dilakukan evaluasi secara berkala.	
Bagi BPK, pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik bukan hal baru.		
Dalam beberapa tahun terakhir ini sudah digunakan pemeriksaan menggunakan e-Audit, yaitu pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK).	Selain itu, BPK dalam pemeriksaan menggunakan KKP Elektronik dan Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan (SiAP LK).	BPK juga mempunyai Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), Data Entitas Pemeriksaan (DEP), dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL).
Sedangkan aplikasi mendukung otomasi perkantoran antara lain adalah		
Sistem Sumber Daya Manusia (SISDM)	dan Sistem Kearsipan (SEKAR).	

4. Capaian Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pembinaan dan Pengembangan Hukum merupakan *leading sector* dalam hukum pemeriksaan keuangan negara.

Pada 2019 BPK mengeluarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pembaruan dari Keputusan BPK Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga perlu diganti;

Isi:

Pelaksana BPK terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal
- b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
- c. Inspektorat Utama
- d. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara
- e. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
- f. AKN I
- g. AKN II
- h. AKN III
- i. AKN IV
- j. AKN V
- k. AKN VI
- l. AKN VII
- m. Auditorat Utama Investigasi
- n. BPK Perwakilan
- o. Staf Ahli
- p. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Capaian Produk Pedoman SOP

Nomor	Daftar Pedoman Dan Prosedur Operasional Standar Tahun 2019
1	2 Tahun 2019 13 Februari 2019 Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Profil Satuan Kerja Objek Reviu Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2	3 Tahun 2019 13 Februari 2019 Peraturan Sekjen tentang Ketentuan Biaya Bagasi Tercatat dalam Rangka Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan BPK

3	4 Tahun 2019 27 Februari 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Perpustakaan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
4	7 Tahun 2019 21 Maret 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Pelayanan Permintaan Informasi Publik pada Pusat Informasi dan Komunikasi BPK
5	8 Tahun 2019 25 Maret 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Penyiapan Prasarana dan Sarana Kegiatan Kantor
6	9 Tahun 2019 26 Maret 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Satuan Kerja pada Biro Umum
7	10 Tahun 2019 26 Maret 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Biro Keuangan
8	61 Tahun 2019 29 April 2019	Peraturan Sekjen tentang Pedoman Penanganan Khusus bagi Pegawai dengan Masalah Kesehatan Fisik dan Psikis di Lingkungan BPK
9	62 Tahun 2019 10 Mei 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Keprotokolan Kunjungan Kerja Pimpinan BPK dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ke Daerah
10	64 Tahun 2019 22 Mei 2019	Peraturan Sekjen tentang Peraturan Sekjen tentang Pedoman Manajemen Talenta di Lingkungan Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
11	65 Tahun 2019 22 Mei 2019	Peraturan Sekjen tentang Pedoman Klasifikasi Akun Aset Tetap
12	66 Tahun 2019 19 Juni 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Laporan/Aduan (Whistleblowing) Menggunakan Aplikasi Whistleblowing System
13	67 Tahun 2019 4 Juli 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Pengunggahan Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Website Badan Pemeriksa Keuangan
14	68 Tahun 2019 4 Juli 2019	Peraturan Sekjen tentang Kode Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
15	69 Tahun 2019 4 Juli 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Monitoring dan Analisis Berita pada Badan Pemeriksa Keuangan
16	70 Tahun 2019 7 Agustus 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Layanan Perpustakaan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan

17	72 Tahun 2019 22 Agustus 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Pusat Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan
18	73 Tahun 2019 6 September 2019	Peraturan Sekjen tentang Pedoman Akuntansi Persediaan pada Badan Pemeriksa Keuangan
19	74 Tahun 2019 23 September 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah pada Badan Pemeriksa Keuangan
20	76 Tahun 2019 21 Oktober 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Pengurusan Bukti Kepemilikan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
21	77 Tahun 2019 21 Oktober 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Pencatatan Perolehan/Perubahan/Penghapusan/Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Cash dan Noncash di Lingkungan Badan Pemeriksa keuangan
22	78 Tahun 2019 21 Oktober 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Pengujian Konsekuensi Badan Pemeriksa Keuangan
23	79 Tahun 2019 21 Oktober 2019	Peraturan Sekjen tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan
24	80 Tahun 2019 25 Oktober 2019	Peraturan Sekjen tentang Peta Jabatan pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
25	81 Tahun 2019 4 November 2019	Peraturan Sekjen tentang Jenis Jabatan Fungsional Selain Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan
26	82 Tahun 2019 18 November 2019	Peraturan Sekjen tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengadaan Kantor Akuntan Publik yang Bekerja Untuk dan Atas Nama Badan Pemeriksa Keuangan
27	83 Tahun 2019 9 Desember 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Badan Pemeriksa Keuangan
28	84 Tahun 2019 16 Desember 2019	Peraturan Sekjen tentang Ketentuan Pelaksanaan Standar Biaya Keluaran Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2020
29	85 Tahun 2019 30 Desember 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Biro Keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan
30	86 Tahun 2019 30 Desember 2019	Peraturan Sekjen tentang Prosedur Operasional Standar Pembayaran Tagihan Melalui Mekanisme Langsung pada Badan Pemeriksa Keuangan
31	87 Tahun 2019 30 Desember 2019	Peraturan Sekjen tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pemeriksa Berdasarkan Beban Kerja Pem



Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyerahkan penghargaan JDIH 2019 terbaik kepada Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Blicer W Rajagukguk di Swiss-Belhotel, Jakarta.

10 September 2019

JDIH Terbaik

BPK menerima penghargaan sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik tingkat lembaga negara tahun 2019. Ini adalah langkah maju BPK setelah tahun sebelumnya berada di urutan kedua.

JDIH merupakan “portal” pencarian dokumen hukum dan basis data dokumen hukum yang mudah diakses, lengkap, akurat dan terpercaya. BPK sendiri mengembangkan JDIH sejak 2014 dan terus mengalami penyempurnaan demi memberikan pelayan pada publik. Semua produk hukum BPK bisa diakses melalui situs <https://www.bpk.go.id/>

30 September 2020

PR Indonesia Award (PRIA) 2019

BPK kembali terpilih sebagai Lembaga Terpopuler di Media Online 2019 dalam PR Indonesia Award (PRIA) 2019. PRIA adalah kompetisi yang rutin diadakan PR Indonesia sejak 2016. Kompetisi yang diselenggarakan diikuti oleh korporasi dan organisasi, baik pemerintah maupun nonpemerintah. PRIA merupakan bagian dari komitmen PR Indonesia dalam mengapresiasi kinerja humas/public relation (PR) yang unggul dari korporasi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.



5 Oktober 2019

Penghargaan Abiwara 2019 untuk Museum BPK



Musem BPK yang berada di Magelang, Jawa Tengah, memenangkan Penghargaan Abiwara 2019 untuk kategori objek wisata yang dikelola pemerintah. Penghargaan ini digelar Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk sosok dan lembaga yang dinilai berkontribusi besar pada pariwisata di Jawa Tengah.

Museum BPK yang diresmikan pada 4 Desember 1997 dan dibuka untuk umum pada 1999, semula hanya memiliki dua ruang pamer museum seluas 270 m², dengan memanfaatkan bekas kantor BPK di masa Perang Kemerdekaan. Kini, setelah mengalami renovasi besar-besaran pada tahun 2016, Museum BPK bertransformasi menjadi museum *post modern*. Luas bangunan menjadi 3.880 m² dan memiliki 18 ruang dilengkapi ruang audio visual, ruang *interactive floor*, dan ruang informasi berbasis teknologi.

21 November 2019

Keterbukaan Informasi Publik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh kualifikasi sebagai Badan Publik Menuju Informatif untuk Kategori Badan Publik Lembaga Negara pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019. Anugerah ini diberikan kepada Badan-badan Publik yang telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).



5. Peer Review BPK 2019

Peer Review adalah pemeriksaan internal yang dilakukan lembaga pemeriksa negara lain. Berbeda dengan *peer review* sebelumnya, pada tahun 2019 pemeriksaan dilakukan dengan metode *joint review* oleh 3 SAI negara lain yakni NIK (Najwyzsza Izba Kontroli) Polandia sebagai *team leader*, OAG (Office of the Auditor General) Norwegia dan NAOE (National Audit Office of Estonia) Estonia.

Peer Review atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK dengan menggunakan kriteria *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF).



Tim Peer Review 2019

Peer Review 2004-2019

Peer Review BPK 2004

Pelaksana:
OAG New Zealand



Hasil: saran pengembangan organisasi BPK

- Terbitnya UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK
- Penyusunan Renstra BPK 2006-2010
- Penyusunan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) 2007
- Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) 2009
- *Human Resource Management Plan* 2009

Peer Review BPK 2009

Pelaksana:
ARK Belanda



Hasil: Peningkatan fungsi Itama

- Peningkatan Fungsi *Quality Assurance*
- Implementasi *Assesment Center*
- *Competence Based Curricukulum*
- Transformasi Laporan Pemeriksaan
- Revisi Juklak Pemeriksaan Kinerja

Fokus 6 Domain

- a. Independensi dan Kerangka Hukum
- b. Perencanaan Pemeriksaan
- c. Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan
- d. Teknologi Informasi
- e. SDM dan Pelatihan
- f. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Peer Review 2019

Pelaksana:
NIK Polandia,
OAG Norwegia,
NAOE Estonia.



Peer Review BPK 2014

Pelaksana:
NIK Polandia

Hasil: Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi BPK

- Tata Kerja Badan
- Auditoriat Utama Investigasi (2017)
- Penyederhanaan Renstra
- Rotasi Pegawai yang lebih ramah

Fokus: 6 Domain

- Independensi dan Kerangka Hukum,
- Perencanaan Pemeriksaan,
- Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan
- Teknologi Informasi
- SDM dan Pelatihan
- Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Rekomendasi:
26

Pelaksanaan Rekomendasi Tahun 2020

6. Hasil Audit Laporan Keuangan BPK

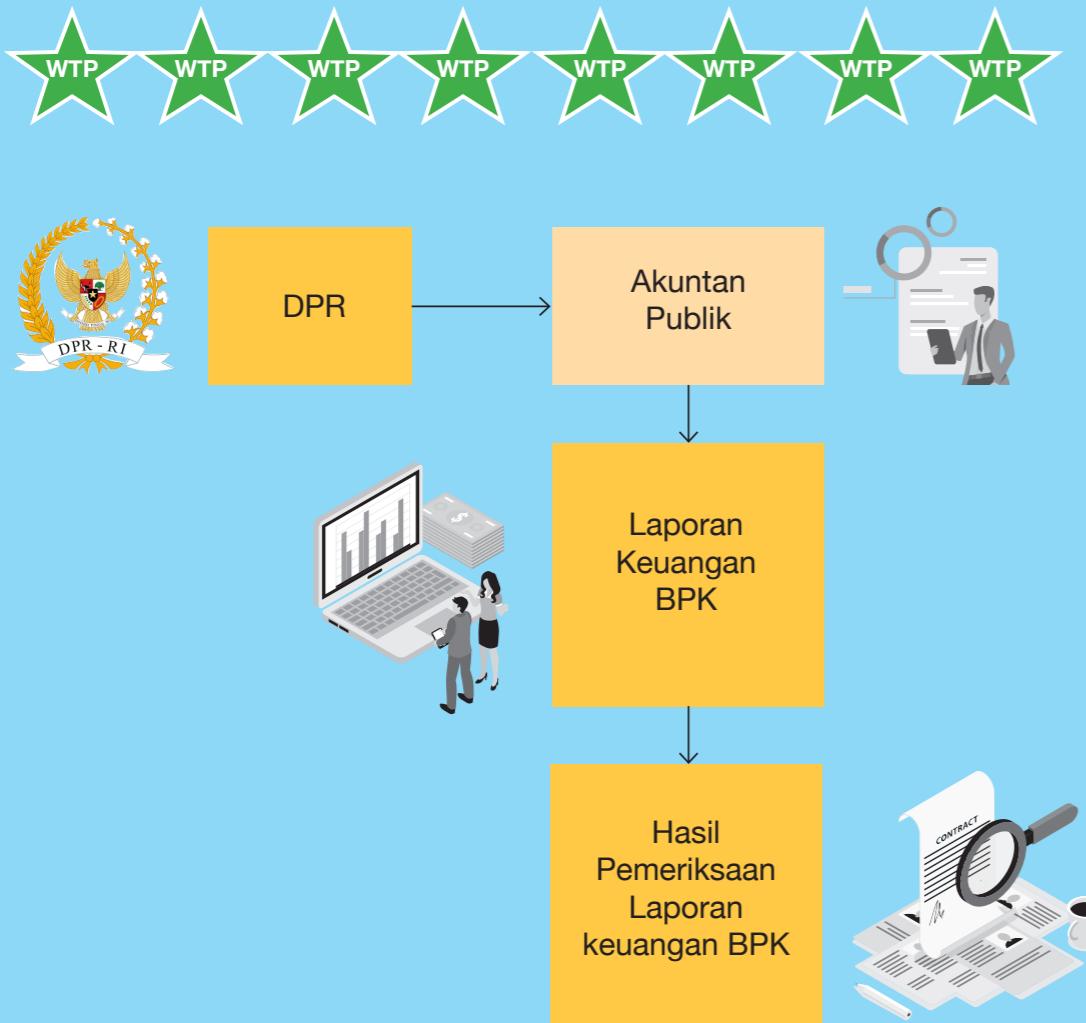
Sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan keuangan negara, BPK juga menjalani pemeriksaan yang dilakukan kantor akuntan publik (KAP).

Dasar Hukum:

Pasal 32 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik, yang ditunjuk DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan.

Hasil Pemeriksaan:

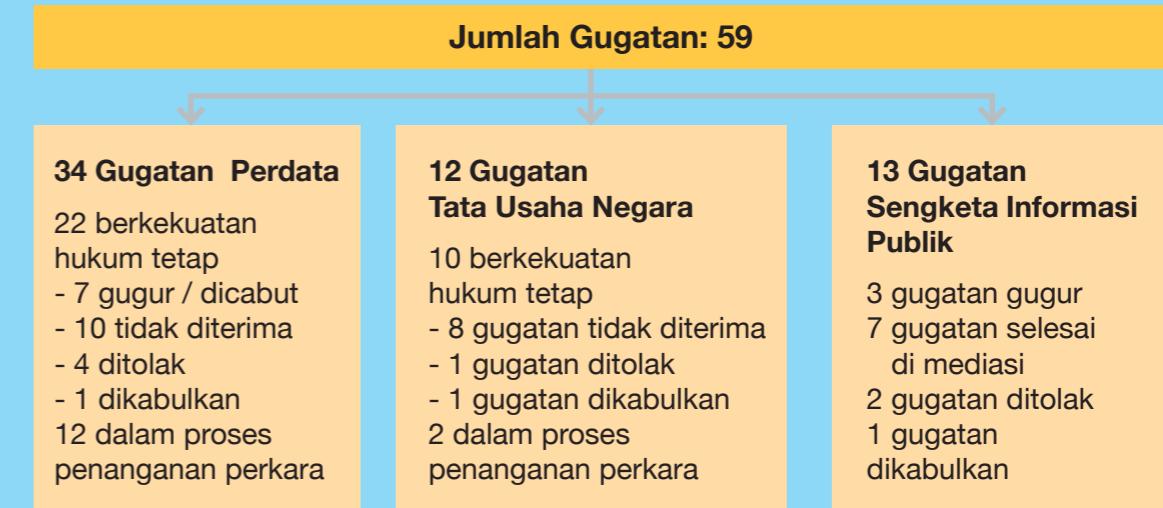
BPK mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut sejak 2009.



7. Gugatan terhadap BPK

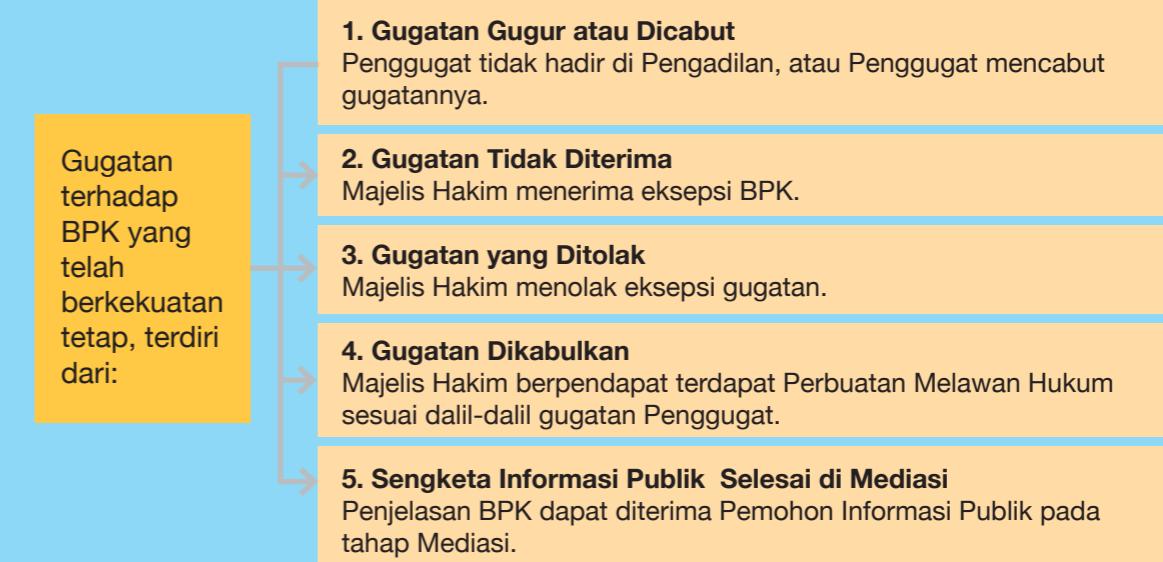
BPK menjalankan perannya sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI-PMF) serta telah melalui kontrol mutu terhadap prosedur, *quality assurance* terhadap hasil, dan klarifikasi kepada pihak yang diperiksa. Meskipun begitu, BPK tetap terbuka terhadap masukan, kritik dan juga gugatan dari terperiksa sebagai proses *checks and balances*.

Gugatan 2019



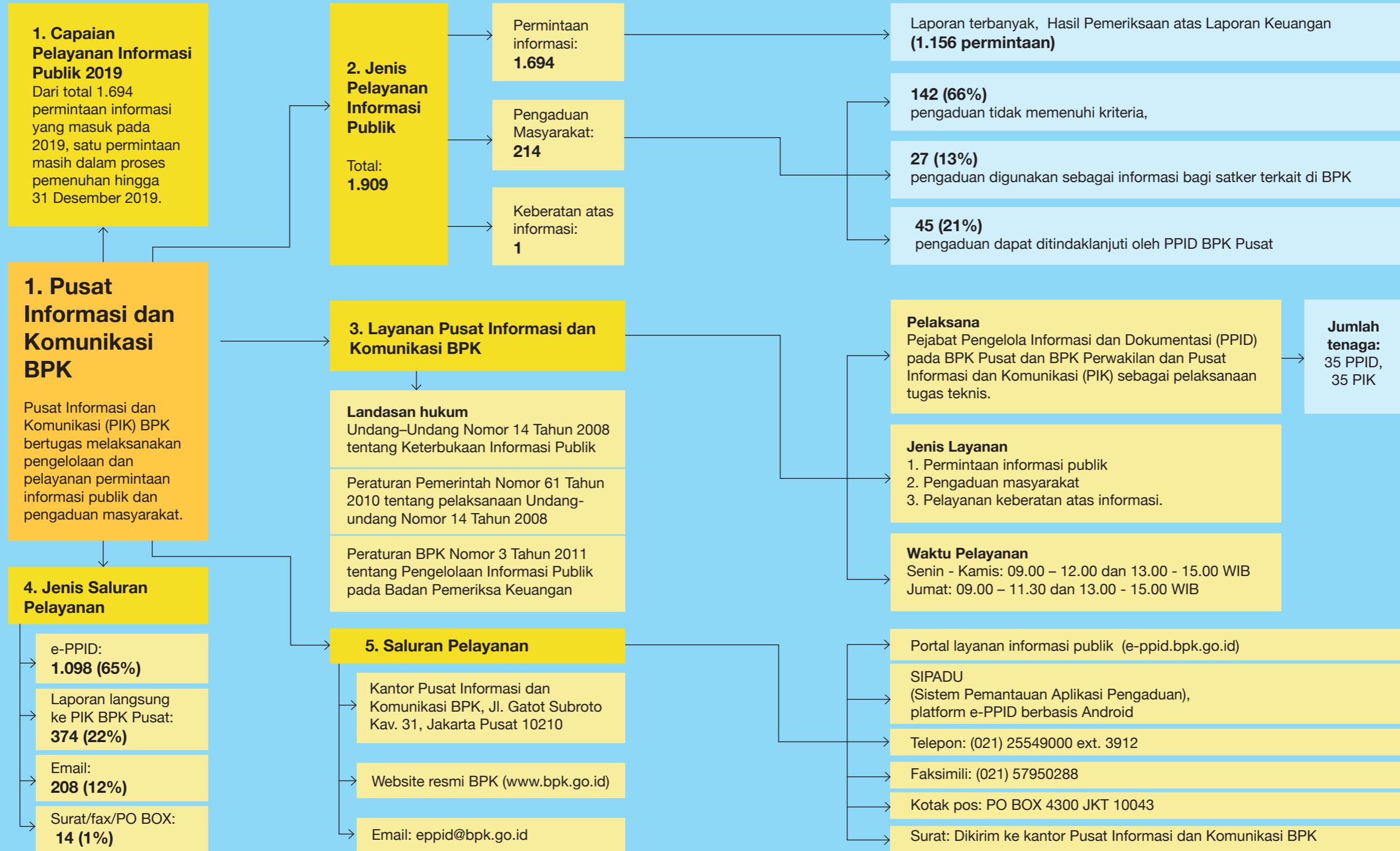
Jumlah Somasi: 6

Somasi diajukan pihak yang keberatan atas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Semua somasi dapat diselesaikan tanpa melalui proses persidangan.





BAB 4 KOMUNIKASI KEPADA PUBLIK



Capaian PIK



Penghargaan

BPK Pusat meraih penghargaan sebagai Badan Publik Menuju Informatif untuk Kategori Badan Publik Lembaga Negara pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat pada 21 November 2019. Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Narayana memberikan penghargaan Badan Publik Menuju Informatif kepada Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional, Juska Meidy Enyke Sjam,

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kategori Instansi Vertikal se-Sumatera Barat Tahun 2019 sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Sumatera Barat pada 6 Desember 2019.



2. Museum BPK RI

Museum BPK RI merupakan salah satu museum modern di Indonesia. Berada di komplek eks Karesidenan Kedu, Jln. P. Diponegoro No.1 Kota Magelang, Jawa Tengah, museum yang diresmikan pada 4 Desember 1997 itu memiliki luas 3.880 m² dengan 14 ruangan.

VISI

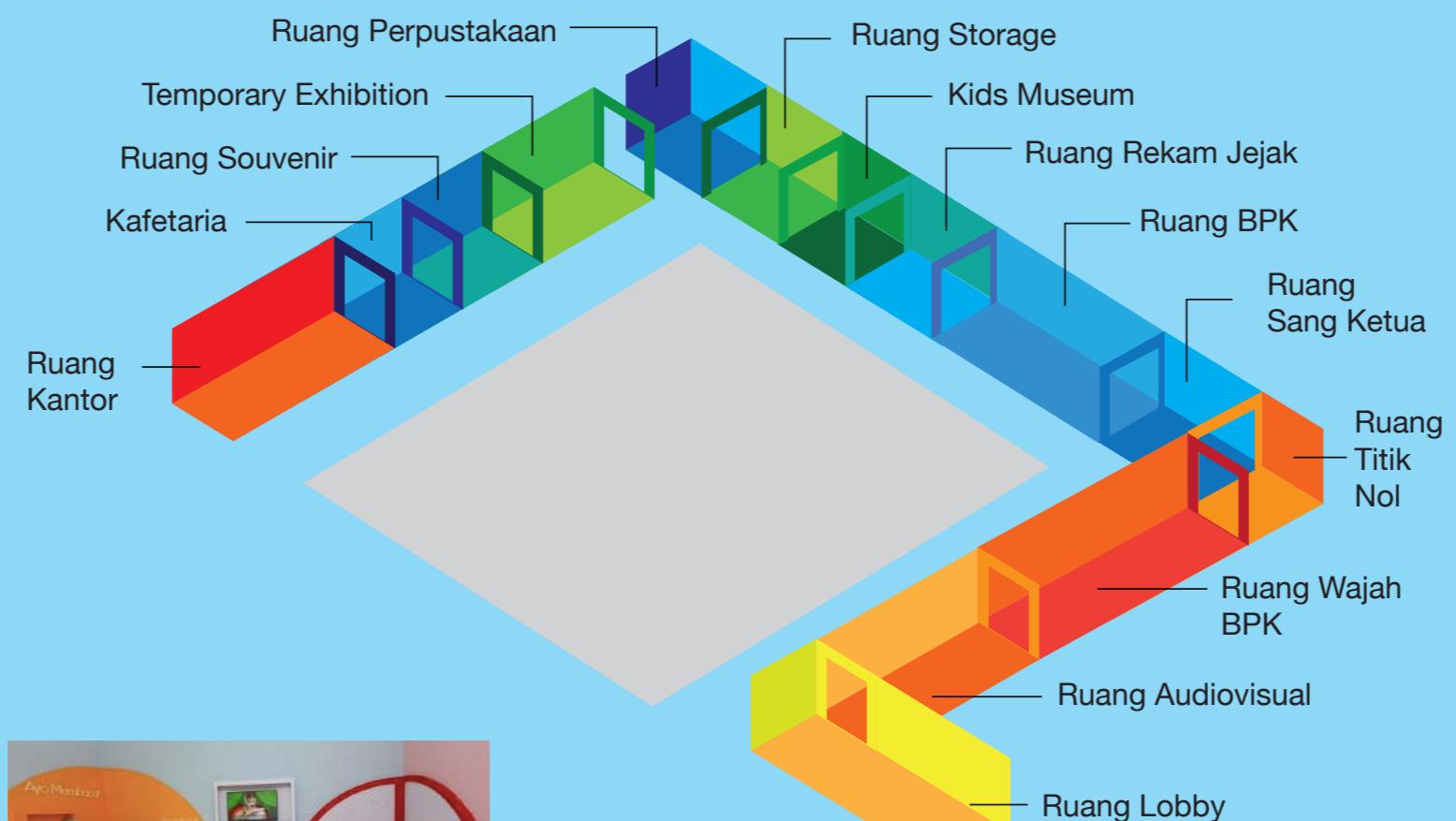
Menjadi pusat pelestarian nilai dan pengetahuan serta hasil kerja BPK yang komunikatif, edukatif, dan rekreatif yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

MISI

Menyelenggarakan pembelajaran tentang tugas, peran, dan sejarah BPK bagi pegawai BPK dan masyarakat umum.

Menyebarluaskan informasi tentang kinerja BPK dalam mengawal pengelolaan keuangan negara melalui pameran dan program-program publik.

Melaksanakan riset yang terkait perlindungan, pengembangan, pemanfaatan nilai dan pengetahuan tentang BPK.





Kantor pertama BPK di bekas Gedung ANIEM (Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteits Maatschappij), perusahaan listrik umum Hindia Belanda, yang sekarang dikelola Yayasan Pendidikan Kristen Pantekosta di Jalan Tentara Pelajar. Kantor BPK kemudian pindah lagi ke Gedung Bea Cukai Magelang di Jalan Diponegoro No. 36, dan kemudian berpindah lagi ke gedung yang kini menjadi Museum BPK.

Mengapa di Magelang?

1945	1946	1947	1948	1997	1999	2016
18 Agustus	28 Desember	1 Januari	6 November	4 Desember		
UUU 1945 disahkan. Pasal 23 ayat 5 UUD 1945 mengamanatkan pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).	Pemerintah menerbitkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tentang pembentuk Badan Pemeriksa Keuangan.	BPK RI resmi berdiri. Memiliki 9 pegawai, sebagai ketua BPK R. Soerasno, Dr. Aboetari sebagai Anggota dan Djunaedi sebagai Sekretaris. Kantor pertama BPK ditetapkan di Magelang, tapi belum di sayap kiri gedung Kantor Karesidenan Kedu yang kini menjadi Museum BPK.	Kantor BPK dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta, setelah ibukota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta.	Pimpinan Badan Periode 1993-1998 mencanangkan program pembangunan Museum BPK RI di kantor BPK pertama, dalam upaya membuat BPK RI lebih dikenal masyarakat. Museum diresmikan oleh Ketua BPK RI, Prof. DR. JB. Sumarlin pada 4 Desember 1997.	Museum mengalami pengembangan sehingga luasnya menjadi 260,16 m ² .	Museum BPK RI kembali diperluas sehingga luasnya menjadi 3.880m ² sampai sekarang.

Fasilitas Museum

Museum BPK RI adalah museum sejarah yang pertama memanfaatkan teknologi canggih seperti augmented reality, virtual reality, dan game. Fitur baru itu ditambahkan dalam program renovasi yang diserahkan pada 9 Januari 2017.



Ruang Pamer 1

Berada di bagian depan, seluas 16,3 meter kali 6 meter. Di ruang ini ditampilkan koleksi foto sejarah perjalanan BPK pada waktu berkantor di Magelang, Yogyakarta, Bogor, hingga Jakarta. Ada pula lukisan batik yang dibuat oleh Koeswadij (almarhum) pada 1980 atas ide Ketua BPK periode 1973-1983, Umar Wirahadikusumah. Lukisan tersebut menggambarkan filosofi Pelaksanaan Tugas Pokok BPK dan mengilhami motto BPK: Tri Dharma Arthasantosa.



Ruang Pamer 2

Ruang ini berukuran 8 x 6,05 meter, menampilkan 14 item barang/peralatan kantor BPK pada waktu berkantor di Karesidenan Kedu tahun 1947, dari meja dan kursi Ketua BPK, mesin ketik, pesawat telepon dan kamera. Jumlah semuanya ada 14 item. Semua diletakkan seperti ketika BPK berkantor di ruangan ini.



Ruang Pamer 3

Berukuran 6,05 x 4,35 meter, di ruang ini ditampilkan patung Ketua BPK pertama R. Soerasno, tanda pangkat, dan pataka (bendera-bendera daerah), yang merupakan simbol yang menunjukkan luas wilayah pemeriksaan BPK.



Ruang Audio Visual

Di ruangan ini pengunjung akan disuguhkan tontonan sejarah BPK dan perjalanan BPK secara audio visual.

3. Website BPK dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

Situs web BPK RI menambah layanan baru, yakni situs web versi bahasa Inggris. Informasi di laman ini diterjemahkan secara verbatim dari laman bahasa Indonesia. Tujuan penyediaan layanan ini adalah untuk memperluas penyebaran informasi BPK.

Situs web BPK terus mendapat penyempurnaan dari waktu ke waktu, baik dari sisi tampilan maupun kelengkapan informasi. Pengadaan situs web merupakan bagian dari program Reformasi Birokrasi di lingkungan BPK RI, yang dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih.

Situs web BPK tersedia dalam versi desktop dan mobile.

Bahasa Indonesia
www.bpk.go.id



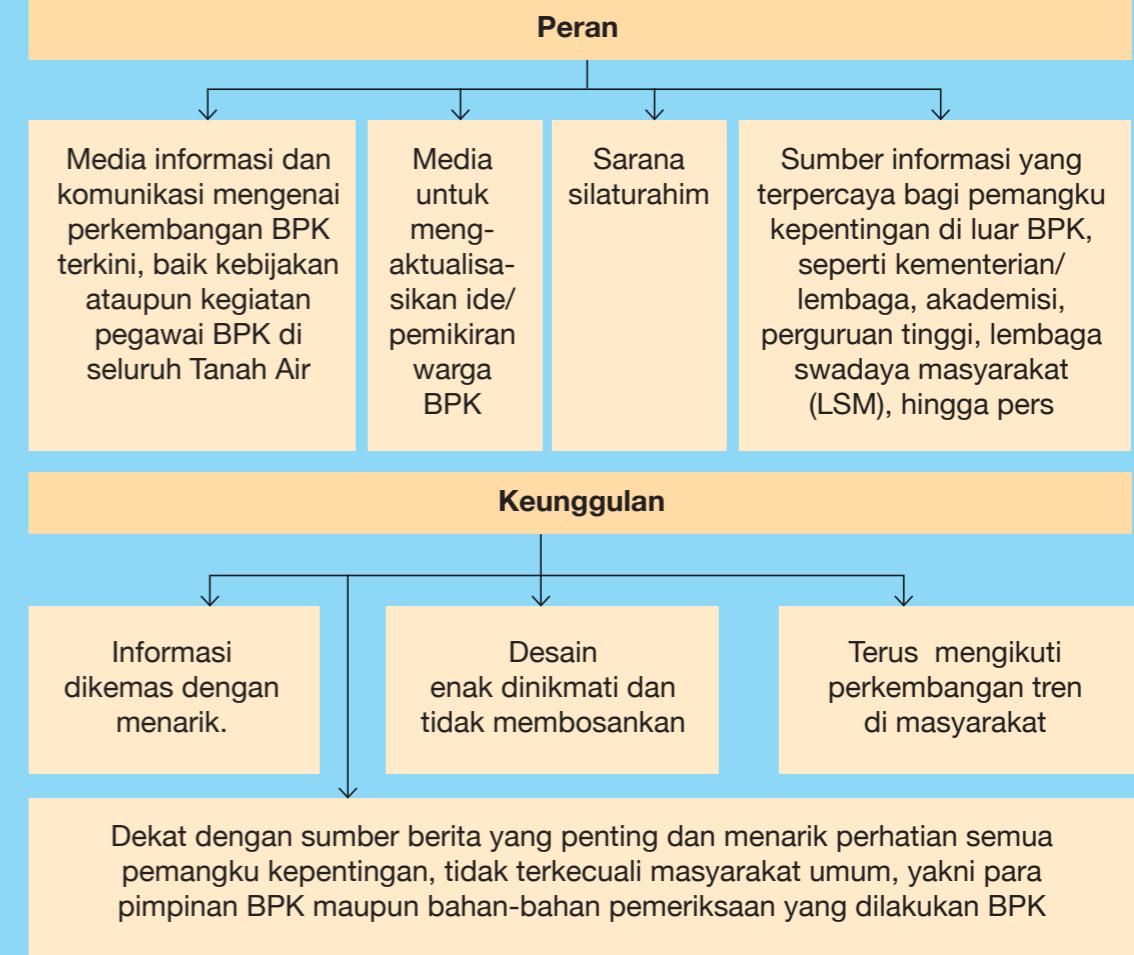
Bahasa Inggris
www.bpk.go.id/en

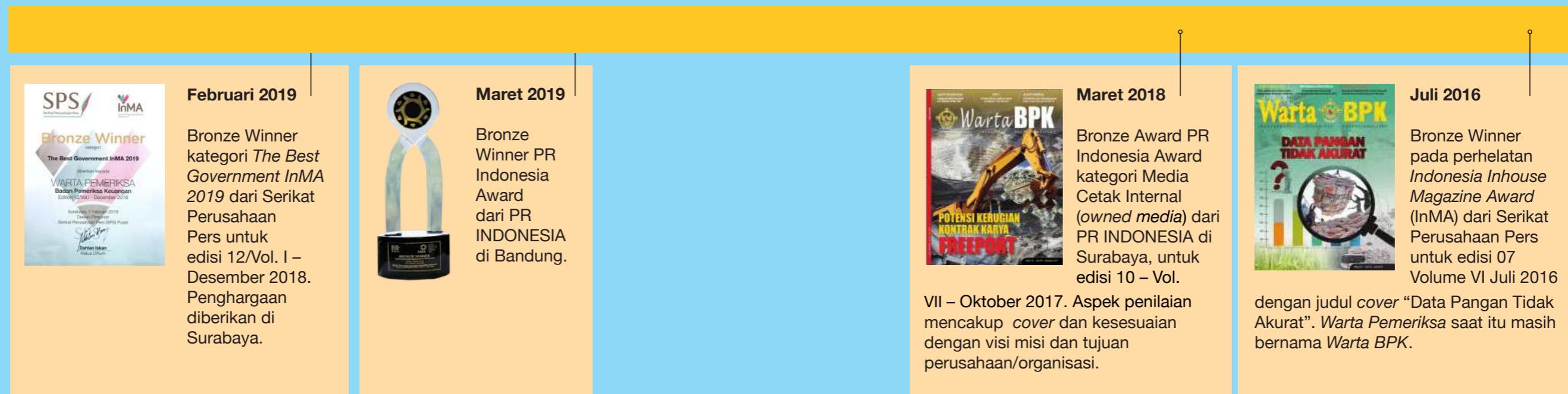


Warta Pemeriksa merupakan sumber informasi terdepan dan terpercaya mengenai segala hal tentang BPK, dari kegiatan internal hingga hasil pemeriksaan BPK terhadap entitas yang diperiksa.

4. Warta Pemeriksa

Warta Pemeriksa adalah *inhouse magazine* yang diterbitkan BPK. Setelah sukses *go internet* dengan menghadirkan versi PDF, majalah yang sebelumnya bernama *Warta BPK* ini sedang bersiap untuk sepenuhnya *go digital* melalui aplikasi.





Go Digital

Untuk mengikuti tren yang terjadi di masyarakat, *Warta Pemeriksa* sedang menyiapkan aplikasi berbasis android via Play Store dan iOS via App Store.

Mengapa harus go digital?

64 persen penduduk Indonesia (sekitar 175,4 juta orang) sudah terkoneksi* dengan jaringan internet

Pengguna berusia 16 hingga 64 tahun menghabiskan rata-rata 7 jam 59 menit per hari* untuk berselancar di internet

Jumlah perangkat *mobile* di Indonesia yang terkoneksi ke internet mencapai 338,2 juta, lebih besar dari jumlah penduduk.

*) Sumber: Global Digital Reports 2020, HootSuite/We Are Social



Strategi

Karena pembaca membutuhkan kedalaman informasi, sajian yang enak dibaca, disegarkan foto, ilustrasi serta infografis, maka penyajian *Warta Pemeriksa* tetap dengan konsep majalah

Sesuai perkembangan zaman, konsep majalah dipadukan dengan teknologi, sehingga berformat majalah digital

Majalah digital *Warta Pemeriksa* dapat dibaca publik melalui aplikasi yang nanti akan ditempatkan di App Store (iOS) dan Play Store (Android)

Selama proses transisi, majalah versi cetak tetap penting diterbitkan, untuk memastikan *brand Warta Pemeriksa* tetap berada di ingatan pembaca

Keunggulan

Lebih mudah diakses

Lebih murah

Lebih cepat

Lebih menarik dengan tambahan video

5. Edukasi Peran BPK

BPK menggunakan berbagai saluran informasi untuk memasyarakatkan peran dan hasil-hasil pemeriksaannya. Kepada masyarakat umum, BPK melakukan sosialisasi di media massa, media internal, situs web, sosial media, hingga pameran. Untuk akademisi, BPK menggelar kegiatan BPK Goes to Kampus.

Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Tugas tersebut membutuhkan dukungan masyarakat agar bisa dilaksanakan dengan baik.

Pemasyarakatkan peran BPK dan hasil-hasil pemeriksaannya juga akan memunculkan *public awareness* dalam pengelolaan keuangan negara yang pada gilirannya akan membuat para pemangku kepentingan merasa tugasnya diawasi masyarakat.

Sosialisasi ke Seluruh Negeri

JANUARI

25 Januari 2019
Sosialisasi Anggota V BPK, saat masih menjabat Wakil Ketua BPK di IPDN Kampus Gowa, Kabupaten Gowa. Provinsi Sulawesi Selatan.



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK.

FEBRUARI

4 Februari 2019
Sosialisasi Anggota IV BPK, saat masih menjabat Anggota V BPK mengenai Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara di Balai Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat.



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK.



28 Januari 2019
Sosialisasi Anggota IV BPK, saat masih menjabat Anggota V BPK dengan Anggota Komisi XI DPR di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK.



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK.

18 Februari 2019
Sosialisasi Anggota VI dengan Anggota Komisi XI DPR di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

26 Februari 2019
Sosialisasi Anggota VI dengan Anggota Komisi XI DPR di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

MARET

8 Maret 2019

Sosialisasi Tortama V dengan Anggota Komisi XI DPR di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.

14 Maret 2019

Sosialisasi Anggota VI dengan Anggota Komisi XI DPR di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK.

15 Maret 2019

Sosialisasi Tortama III dengan Anggota Komisi XI DPR di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

18 Maret 2019

Sosialisasi Anggota V BPK, saat masih menjabat Wakil Ketua BPK di IPDN Kampus Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK.

22 Maret 2019

Sosialisasi Tortama V dengan Anggota Komisi XI DPR di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

25 Maret 2019

Sosialisasi Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan Anggota Komisi XI DPR di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

27 Maret 2019

Sosialisasi Tortama V dengan Anggota Komisi XI DPR di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

28 Maret 2019

Sosialisasi Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan Anggota Komisi XI DPR di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

APRIL

9 April 2019

Sosialisasi Anggota VI dengan Anggota Komisi XI di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK.

11 April 2019

Sosialisasi Anggota IV BPK, saat masih menjabat Anggota V BPK dengan Anggota Komisi XI DPR di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

11 April 2019 Sosialisasi Anggota VI dengan Anggota Komisi XI DPR terkait Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.

MEI

2 Mei 2019

Sosialisasi Anggota V BPK, saat masih menjabat Wakil Ketua BPK, terkait Peran BPK dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di IPDN Kampus NTB, Kota Lombok, Provinsi NTB.



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK.

AGUSTUS

5 Agustus 2019

Sosialisasi Anggota VI terkait peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK.

● Sosialisasi ke Seluruh Negeri

● BPK Goes to Campus



BPK Goes to Campus

FEBRUARI

14 Februari 2019

Kegiatan BPK Goes to Campus di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh. Diikuti 500 orang civitas academica, narasumber kegiatan bertema "Peran BPK dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara" oleh anggota V BPK saat masih sebagai Wakil Ketua BPK Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK.

20 Maret 2019

BPK Goes to Campus di Universitas Sriwijaya, Indralaya, Sumatera Selatan. Nara sumber kegiatan ini adalah Anggota III BPK, Dr. Achsanul Qosasi, dan Anggota Komisi XI DPR, Ir. H. Achmad Hafiz Tohir. Kegiatan yang diikuti 600 civitas academica Universitas Sriwijaya ini mengambil tema "Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara".



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK.

MARET

19 Maret 2019

Kegiatan BPK Goes to Campus di IAIN, Pontianak, Kalimantan Barat, dengan tema "Peran BPK dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara". Kegiatan yang diikuti 500 orang civitas academica ini menghadirkan narasumber Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A, kala itu Wakil Ketua BPK.



Ketua BPK saat masih menjabat sebagai Anggota I BPK.

20 Maret 2019

BPK Goes to Campus di Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, Sumatera Selatan, dengan narasumber Anggota VI BPK, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., dan Anggota Komisi XI DPR, Ir. H. Achmad Hafiz Tohir". Kegiatan yang diikuti 400 civitas academica Universitas Indo Global Mandiri ini mengambil tema "Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara".



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK.

APRIL

8 April 2019

Kegiatan BPK Goes to Campus di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan bertema Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara ini dengan narasumber Anggota VI BPK, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D. dan Anggota Komisi XI DPR, Ir. H. Achmad Hafisz Tohir. Kegiatan diikuti 200 civitas academica UIN Raden Fatah.

MEI

3 Mei 2019

BPK Goes to Campus di Universitas Islam Negeri Mataram, NTB. Narasumber dalam acara ini Anggota V BPK, saat masih menjabat Wakil Ketua BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A. Mengambil tema “Tugas, Fungsi, dan Kewenangan BPK dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”, acara dihadiri 1.000 civitas academica.

JULI

26 Juli 2019

Acara BPK Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat. Mengambil tema “Peran BPK dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara”, narasumber acara ini adalah Anggota V BPK, saat masih menjabat Wakil Ketua BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A. dan Wakil Dekan Pascasarjana Universitas Padjadjaran Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D. Acara diikuti 700 civitas academica Universitas Muhammadiyah Sorong.

AGUSTUS

8 Agustus 2019

BPK Goes to Campus di IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menghadirkan narasumber Anggota V BPK yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., acara dengan tema “Peran BPK dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara” ini dihadiri 1300 orang civitas academica IAIN Palangkaraya.



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK.

SEPTEMBER

13 September 2019

BPK Goes to Campus di Universitas Borneo, Tarakan, Kalimantan Utara. Anggota V BPK, saat masih menjabat Wakil Ketua BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A. menjadi nara sumber kegiatan yang diikuti 700 civitas academica Universitas Borneo. Tema acara ini adalah “Peran BPK dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara”.

Media Massa

- BPK terbuka melayani permintaan wawancara dari wartawan, baik berupa wawancara khusus atau wawancara di sela-sela kegiatan, seperti ketika BPK menyampaikan laporan pemeriksaan ke DPR, Presiden, atau DPD.



Pimpinan BPK saat menyampaikan laporan pemeriksaan IHPS I 2019 ke Presiden, di Istana Negara.

- BPK secara rutin menyampaikan informasi seputar kegiatan lembaga melalui berbagai saluran informasi, termasuk jumpa pers atau membuat siaran pers.



Ketua BPK saat Konferensi pers terkait terpilihnya BPK sebagai Pemeriksa Eksternal IMO di Kantor Pusat BPK.

- BPK mempublikasikan setiap kegiatan di situs web yang bisa dipergunakan wartawan sebagai bahan untuk diberitakan.

Pameran/Bedah Buku

27 Februari 2019

BPK menggelar Pameran Perpustakaan dan Produk Hukum BPK RI di Jakarta Convention Center, Jakarta, 27 Februari 2019.



Ketua BPK periode 2017-2019, Moermahadi Soerja Djanegara saat mengunjungi Pameran Perpustakaan dan Produk Hukum BPK RI.

5 Maret 2019



BPK menggelar acara bedah buku “Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi” karangan Theodorus M. Tuanakotta di Auditorium BPK Pusat, di Jakarta. Nara sumber utama dalam acara ini adalah penulis buku, sedangkan Auditor Utama Investigasi, I Nyoman Wara dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Direktorat Utama Binbangkum, Akhmad Anang Hernady sebagai pembahas, serta Staf Ahli Bidang Keuangan Daerah, Syamsudin sebagai moderator.



Anggota V BPK, saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua BPK turut meramaikan sosialisasi di ruang terbuka “Mengawal Harta Negara” pada acara Car Free Day di Jakarta, 3 Februari 2019.



BPK turut berpartisipasi dalam acara Ministry Goes to PKN STAN di Kampus STAN Bintaro, 3 November 2019.



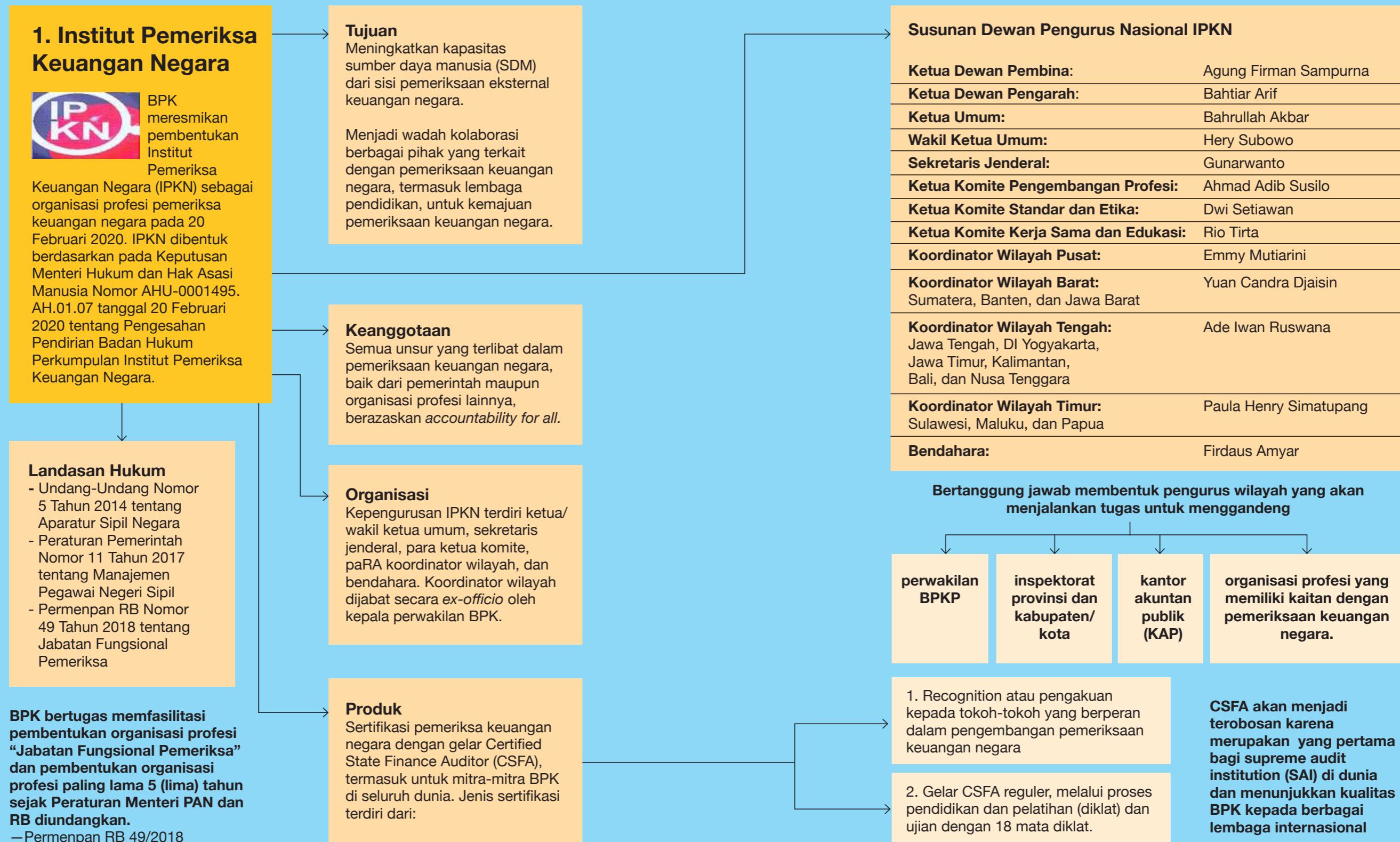
Sekretaris Jenderal BPK, berfoto bersama dengan peserta senam pada kegiatan sosialisasi di ruang terbuka “Mengawal Harta Negara” pada acara Car Free Day di Jakarta, 3 Februari 2019.



Antusiasme mahasiswa STAN mengunjungi booth BPK dalam acara Ministry Goes to PKN STAN di Kampus STAN Bintaro, 3 November 2019.

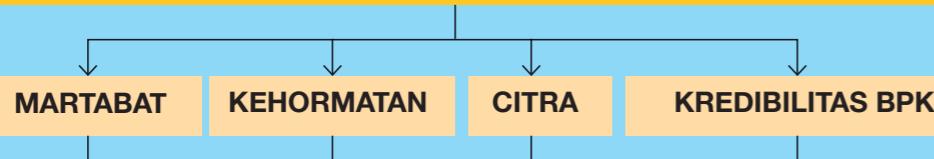


BAB 5 TANTANGAN KE DEPAN



2. Budaya BPK ber-IIP

Penguatan budaya BPK ber-IIP hingga saat ini masih menjadi tantangan besar yang harus dimitigasi melalui program perubahan dalam suatu sistem komprehensif yang mengharmonikan seluruh sistem integritas yang ada untuk mewujudkan



Target Perubahan

Target	Bentuk Pengubahan	Uraian Pengubahan
Para Pelaksana BPK, baik pemeriksa maupun non pemeriksa	1. Pola Pikir 2. Mekanisme Kerja 3. Atribut/ simbol	1. Pemahaman dan persepsi yang seragam atas visi, misi, dan nilai dasar BPK. 2. Penerapan nilai-nilai dasar BPK dalam setiap aktivitas operasional organisasi, baik dalam kegiatan pemeriksaan maupun non pemeriksaan.

Benefit yang diharapkan

1. Meningkatnya pemahaman Pelaksana BPK terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK.	2. Meningkatnya implementasi nilai dasar BPK.	3. Meningkatnya kepuhanan Pemeriksa BPK terhadap kode etik dan peraturan disiplin.
---	---	--

Budaya BPK ber-IIP diharapkan terwujud dengan tercemininya nilai-nilai dasar BPK, khususnya nilai integritas pada sikap dan perilaku para Pelaksana BPK dalam menjalani rutinitas pekerjaan maupun operasional organisasi BPK.

Tujuan

- 1. Memberikan jaminan bahwa pelaksanaan tugas BPK telah didasarkan pada nilai-nilai dasar BPK melalui upaya pencegahan terjadinya pelanggaran etik maupun disiplin.
- 2. Mendorong perwujudan manfaat dari Renstra BPK 2020–2024, yaitu pelaksanaan kewenangan lebih baik, kualitas pelaksanaan RB meningkat, akuntabilitas BPK meningkat, profesionalisme Pelaksana BPK meningkat, dan kualitas pelaksanaan penugasan meningkat.
- 3. Mendukung ketercapaian tujuan pengubahan (*adoption objective*) terkait pencapaian kapabilitas organisasi yang diharapkan, yaitu pegawai memahami dan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan dilandasi integritas individu.

Perwujudan Budaya BPK ber-IIP melalui Sistem Manajemen Integritas

- 1. Sistem yang memberikan keyakinan bahwa budaya ber-IIP telah menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPK. Sistem ini juga selalu berusaha memberikan jaminan zero toleransi dan zero korupsi atas kemungkinan dilanggarannya aturan Kode Etik BPK dan Disiplin ASN
- 2. Sistem yang dibangun untuk memitigasi semua risiko dilanggarannya nilai dasar BPK yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK
- 3. Sistem yang dibangun untuk menangani keterjadinya risiko atas pelanggaran nilai dasar BPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK, antara lain dibuat dalam melakukan penindakan/ penanganan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaksana BPK secara tegas dan cepat namun tetap memenuhi rasa keadilan

3. WBK dan WBBM

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) kepada unit kerja di instansi pemerintah, sekurang-kurangnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.

Payung Hukum

1. UU No. 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
2. Perpres No.54 / 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
3. PermenPAN dan RB No.52 Thn 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN dan RB No.10 Thn 2019

WBK	
Jumlah satker: 47	
13 eselon 1	34 BPK perwakilan

Satker dengan predikat WBK:
15 (per 2019)

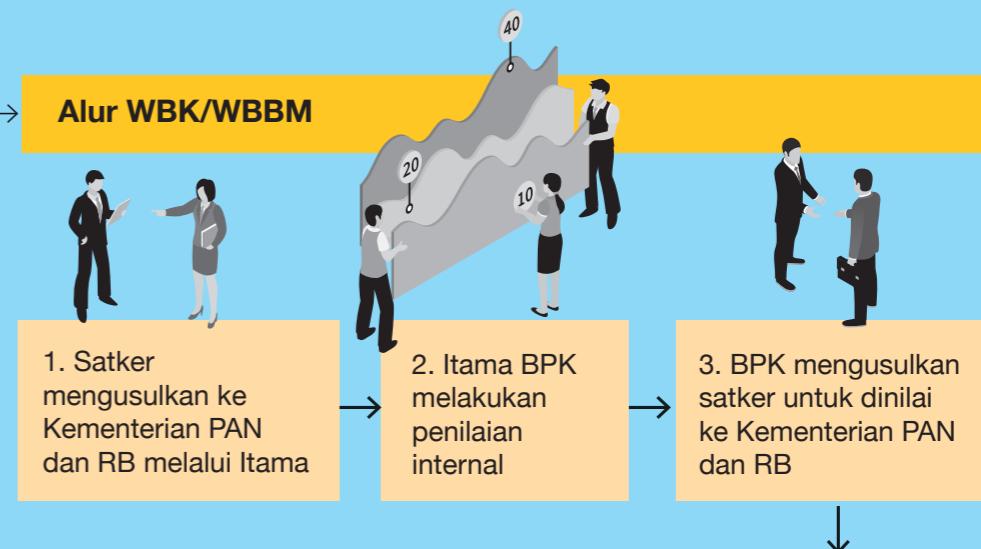


Sejak 2015, setiap tahun yang meraih predikat WBK di BPK rata-rata 3 satker.

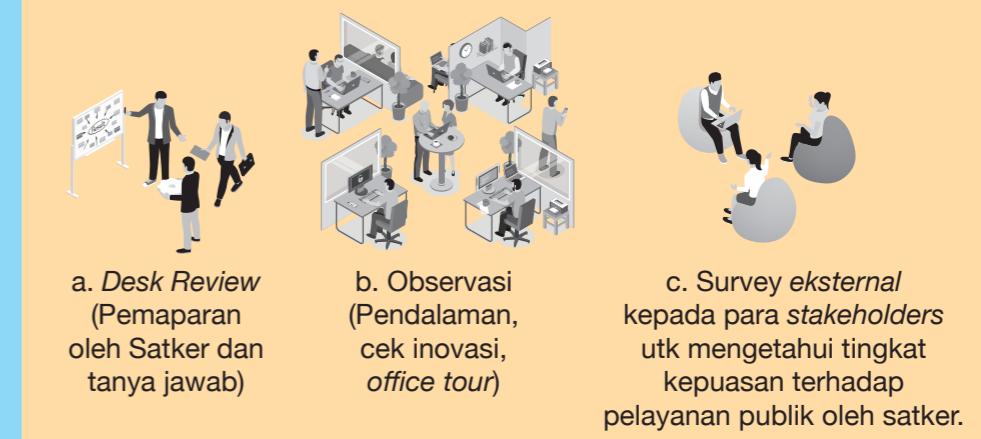
WBBM	
Jumlah satker: 47	
13 eselon 1	34 BPK perwakilan

Satker dengan predikat WBBM:
1 (per 2019)

Alur WBK/WBBM



4. Kementerian PAN dan RB melakukan penilaian. Tahapannya:



5. Kemen PAN dan RB menggelar panel dengan mengundang KPK dan Ombudsman dalam rangka memutuskan Satker yang layak mendapat predikat WBBK dan WBM.

Strategi



1. Tidak semua aktivitas dan inovasi Satker diketahui **stakeholders**.

Strategi: Memperbaiki strategi komunikasi untuk meningkatkan responsivitas **stakeholders** terhadap layanan yang telah diberikan.



2. Hasil survey eksternal belum optimal.

Strategi: Membuat program yang mendorong publik lebih dekat dan merasakan kehadiran satker.



3. Inovasi yang dilakukan masih fokus pada pelayanan internal.

Strategi: Menciptakan inovasi yang berkualitas yang berfokus pada pelayanan publik.



4. Pimpinan Satker belum mampu melakukan sharing vision mengenai Pembangunan ZI.

Strategi: Pimpinan satker perlu menetapkan arah kebijakan Pembangunan ZI pada satkernya.

Strategi:

Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pembangunan kegiatan pembangunan, penggerakan, dan penilaian Zona Integritas di lingkungan BPK untuk memperoleh rencana aksi yang mengarah pada perbaikan

Penutup

Membangun BPK untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi merupakan harapan sekaligus kebutuhan bersama. BPK merasakan perlunya senantiasa meningkatkan kualitas pemeriksaan. Dorongan ke arah itu bukan hanya datang dari masyarakat tapi juga dari internal organisasi, yang menginginkan kualitas audit tetap nomor satu.

Hal ini sejalan dengan Nilai-Nilai Dasar BPK yang ingin dikembangkan, yaitu



Integritas, Profesionalisme, dan Independensi.

Nilai Integritas

diwujudkan dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Nilai profesionalisme

dibangun dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

BPK menjunjung tinggi

Independensi,

baik secara **kelembagaan**, **organisasi**, maupun **individu**. Dalam semua hal yang berkaitan dengan **pekerjaan pemeriksaan**,

**BPK bebas menentukan sikap
tanpa pengaruh pribadi dan eksternal.**

Harus diakui, keterbatasan sumber daya merupakan satu kendala untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Karena itu, BPK terus berupaya meningkatkan kinerja dengan menambah jumlah pegawai dan menggelar pelatihan secara *in house training* maupun pendidikan di luar baik formal maupun kursus-kursus singkat. Pelatihan juga dilakukan dengan sistem magang di badan internasional dan Supreme Audit Institution sahabat.

Dalam hal pemeriksaan keuangan, BPK selama ini telah mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan negara.

Sebagai Lembaga Negara, BPK telah bekerja cermat dan selalu memastikan pengelolaan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setahun terakhir, BPK semakin **meningkatkan prioritas pemeriksaannya** pada program-program yang berkaitan dengan **peningkatan kesejahteraan rakyat**, khususnya untuk **menilai aspek ekonomi, efisiensi, efektifitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan**.

**Akuntabilitas
untuk
Semua**

